



I NENGAH DASI ASTAWA
GEDE SEDANA



KEARIFAN LOKAL BALI
DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Suatu Model Pembangunan Ekonomi Bali Berkelanjutan



Edisi Revisi

KEARIFAN LOKAL BALI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Suatu Model Pembangunan Ekonomi Bali Berkelanjutan

EDISI REVISI

**I NENGAH DASI ASTAWA
GEDE SEDANA**

**Pustaka Larasan
2017**

**Kearifan Lokal Bali dan Pembangunan Ekonomi
Suatu Model Pembangunan Ekonomi Bali Berkelanjutan**
Edisi Revisi

Penulis

I Nengah Dasi Astawa
Gede Sedana

Pracetak

Slamat Trisila

Penerbit

Pustaka Larasan

Jalan Tunggul Ametung IIIA No. 11B
Denpasar-Bali
Ponsel: 0817353433
Pos-el: pustaka_larasan@yahoo.co.id

Cetakan Kedua: 2017

ISBN 978-602-5401-06-0

KATA PENGANTAR

Buku edisi kedua ini merupakan revisi dan pengembangan dari buku edisi pertama karena diperkaya lagi dengan tambahan informasi mengenai kelembagaan lokal di tingkat subak. Sejak tahun 1970-an Bali mulai serius menjadikan industri pariwisata sebagai alternatif pembangunan ekonomi. Tatkala sektor primer masih menjadi andalan pembangunan Bali dan kala itu industri pariwisata belum dianggap sebagai subsektor pembangunan potensial, keterlibatan masyarakat pada industri pariwisata masih terbatas. Maklum saja, era tahun 1970 ke bawah belum banyak hotel dengan berbagai kemewahan fasilitas, seperti dekade 80-an. Hanya ada beberapa hotel mewah milik pemerintah, seperti Bali Beach. Masyarakat Bali masih fokus pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Bahkan, persepsi sebagian masyarakat terhadap wanita yang bekerja di sebuah hotel dan pulang malam hari, dianggap kurang pantas dan kurang pas kala itu.

Cerita masa keemasan sektor pertanian telah berubah. Masyarakat tersentak dan terperangah melihat industri pariwisata berkembang secara pesat. Banyak infrastruktur dibangun oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata. Lahan pertanian yang kurang bernilai ekonomi, kering, tandus dan sulit ditanami seperti Nusa Dua, berubah menjadi mahal karena di daerah itu dikembangkan industri pariwisata. Alih fungsi lahan pertanian tidak terbandung karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga, tekanan pemodal dan tekanan eksternal lain. Masyarakat yang dulunya merasakan himpitan ekonomi dan kemiskinan, akibat keterbatasan hasil, berubah secara tiba-tiba menjadi bergelimang harta dan memunculkan orang kaya baru (OKB). Sebagian masyarakat di daerah pengembangan industri pariwisata, seperti wilayah Kecamatan Kuta, cerdas dan cermat. Mereka tidak ingin kehilangan lahan pertanian. Hasil penjualan

lahan pertanian, sebagian dipergunakan untuk membeli lahan pertanian baru di daerah lain dan sebagian lagi dimanfaatkan memperbaiki kualitas kehidupan keluarga. Namun, ada pula sebagian masyarakat Bali, tatkala menerima hasil penjualan lahan pertanian dipergunakan untuk investasi, yakni membangun usaha. Apa lacur, bisnis mereka ambruk. Tampaknya perilaku kehidupan berbasis budaya agraris, tidak dapat diubah dengan mudah ke dalam kehidupan berpolakan budaya industri.

Budaya industri mengutamakan waktu, uang, profesional, mandiri dan individualisme, sedangkan budaya agraris berpijak pola permisif, tenggang rasa, sosial, religius dan kebersamaan. Mereka dihadapkan pada persaingan ketat dengan intensitas tinggi, dan menjungjung tinggi asas profesional, kerja keras, cermat dan kerja cerdas. Memang benar perubahan tatanan kehidupan ekonomi seperti terjadi di beberapa tempat telah memberikan dampak. Sebagian masyarakat dapat bertahan dan mampu eksis mengikuti gelombang perubahan dan sebagian lagi terhempas oleh gelombang perubahan, sehingga tersisih dari tata kehidupan baru tersebut.

Bagimanakah dengan posisi Bali kekinian dan ke depan menghadapi perubahan itu? Sejak era sebelum Adam Smith, David Ricardo, Marx, Engels sampai era Clifford Geertz, Antony Giddens, Kellner dan kita saat ini, perubahan tidak bisa dihindari. Orang harus beradaptasi dengan perubahan. Kendatipun tidak semua perubahan kita terima, begitu pula tidak semua perubahan kita tolak. Sebagaimana masyarakat Bali menerima berbagai implikasi positif dan implikasi negatif dari kemajuan industri pariwisata.

Bali, bagitu pula dengan daerah lain, telah memiliki kekuatan endogen. Kekuatan tersebut sekaligus merupakan identitas ke-Bali-an, yakni kearifan lokal. Leluhur kita telah menyediakan kearifan lokal untuk dimanfaatkan sebagai filter dan imunitet dalam mempertahankan, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi, termasuk sumber daya alam, agar berdaya guna dan berhasil guna. Kearifan lokal tumbuh dan ada pada setiap bidang pembangunan. Kearifan lokal ini dapat

menjadi spirit untuk meningkatkan ketahanan dan kelenturan pembangunan dari segala tekanan, baik tekanan internal maupun tekanan eksternal.

Dari pendekatan teori pembangunan modern, keberadaan kearifan lokal Bali, masih relevan dan adaptif dengan perkembangan pembangunan. Cukup banyak kearifan lokal itu dapat disandingkan dengan teori pembangunan modern dewasa ini. Masih banyak kearifan lokal butuh revitalisasi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai landasan pembangunan. Kelemahan mendasar dalam tradisi Bali, terletak pada pencatatan atau dokumentasi terhadap kearifan lokal. Contoh, sistem pengobatan tradisional Bali, disebut *usadha*, semakin tertinggal di tengah-tengah perkembangan obat-obatan modern. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi Cina. Masyarakat Cina benar-benar mendokumentasikan dengan lengkap sistem pengobatan tradisional, sehingga mudah ditumbuhkembangkan dan diwariskan pada generasi berikutnya. Bahkan media pernah mewartakan, bahwa Cina bukan sebagai negara penghasil bahan baku obat-obatan tradisional terbesar di dunia. Penghasil bahan obat-obatan tradisional terbesar di dunia, justru Negara Brasil.

Bali mempunyai teori pembangunan lokal dan sejalan dengan teori pembangunan modern. Dalam sistem pasar modern, orang telah mengenal pasar *supermarket* dan *hypermarket*. Padahal tata cara meletakkan barang-barang dalam pasar tersebut indentik dengan tata cara leluhur kita, menaruh beberapa barang dalam sistem perdagangan tradisional, disebut *ceraki*. Sistem meletakkan barang pada *ceraki* ini, memberikan banyak kemudahan kepada pembeli karena dilandasi konsep yang sejalan dengan sistem pasar modern, yakni *one stop shopping*.

Tatkala teori ekonomi modern mengungkapkan tentang pola pendekatan *profit sharing* dalam membangun bisnis melalui sinergi modal, bagi masyarakat Bali, bukan merupakan fenomena baru. Dalam tradisi Bali, integrasi kekuatan antara kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan kelompok masyarakat ekonomi kuat telah ada sejak lama, disebut pola *ngadas*, *nandu* atau *nyakap*. Pola sinergi itu dapat diekuivalenkan dengan pola

profit sharing. Kesamaan pola ini adalah sama-sama mendapatkan *share*. Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi kuat memberikan pemeliharaan ternak atau pengelolaan lahan mereka kepada kelompok masyarakat kondisi ekonomi lemah dengan sistem bagi hasil. Komposisi bagi hasil didasarkan atas kesepakatan antara mereka dan disesuaikan dengan kondisi ternak dan lahan pertanian. Begitu pula dalam bisnis dengan pola *profit sharing*, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara sesama pemilik modal dalam bisnis bersama itu.

Begitu pula pembangunan ekonomi berdasarkan konsep keseimbangan. Dalam tradisi Bali dikenal dengan sebutan *tri hita karana*. Sebuah kearifan lokal bermakna universal dalam menjaga hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Pada tujuan pembangunan modern, dikenal dengan istilah MDGs, telah pula meletakkan konsep seperti keselarasan, keserasian dan keseimbangan, terutama menyangkut masalah isu gender, kesehatan, kemiskinan, lingkungan serta isu-isu lain dengan sasaran kesejahteraan dan keadilan.

Pembangunan industri dengan mengadopsi nilai-nilai *tri hita karana* sejalan dengan konsep pembangunan modern. Suatu konsep pembangunan bertumpu pada *integrated, harmony and equilibrium*. Konsep ini sangat cocok dengan konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Semua kekuatan dalam industri disebut faktor produksi, wajib bersinergi secara seimbang dan harmoni, bila menginginkan industri berjalan sepanjang masa. Karyawan tidak semata-mata dianggap sebagai buruh dan dapat seenak hati diperintah dan diberhentikan oleh majikan, tanpa kejelasan alasan.

Pembangunan berkelanjutan memiliki esensi pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Konsep itu sejalan dengan tradisi Bali, yakni filosofi *cenik lantang*. Dasar pijakan dari *cenik lantang* ini adalah suatu realitas bahwa segala sesuatu di jagat raya ini memiliki keterbatasan. Berangkat atas fakta dan di lain sisi kebutuhan manusia tidak terbatas, maka kata kunci

dalam pemanfaatan sumber daya adalah manajemen. *Cenik lantang* adalah suatu konsep berfikir dalam tradisi masyarakat Bali dengan orientasi jauh ke depan yang sejalan dengan model pembangunan modern yakni *sustainable development*. Mempertimbangkan kebutuhan anak-cucu, tidak hanya berfikir sesaat, apalagi sesat. Bali adalah untuk kehidupan kita. *Forever* kata sahabat saya dari negeri seberang.

Pembangunan tidak boleh berhenti. Semua kelemahan dan kekurangan dieleminasi dan dicarikan solusi. Dalam tradisi Bali, sudah tidak aneh bahwa peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di pedesaan, acapkali terkendala oleh keterbatasan modal. Secara tradisional masyarakat memiliki pola pemupukan modal disebut *cingkrem*. Pola ini, selaras dengan sistem dikembangkan oleh pelaku ekonomi modern. Seperti simpanan pokok dalam koperasi dan konsorsium dalam bisnis besar. Jadi, benar kearifan lokal Bali relevan dengan beberapa pembangunan ekonomi berbasis moderinitas.

Dalam pembangunan SDM, Bali memiliki konsep tradisional dan selaras dengan teori modern, sebagaimana diungkapkan oleh McClelland dalam "*need for achievement theory*". Bagi masyarakat Bali spirit *pageh*, *puguh* dan *jengah* adalah sebuah konsep mengajarkan manusia produktif dan memiliki etos kerja, bermotivasi tinggi serta mencintai pekerjaan. Dalam teori McClelland di atas, disebutkan bahwa barang siapa yang ingin berprestasi, cenderung mencapai prestasi dan sukses dalam pelaksanaan. Jadi, sama esensi dengan *pageh*, *puguh* dan *jengah* dalam tradisi Bali. Siapa saja *pageh*, *puguh* dan *jengah*, cenderung berhasil dan dapat menghidupi keluarga. Oleh karena itu, masyarakat, termasuk pemimpin tidak perlu ragu dalam membangun ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Pembangunan ekonomi tidak cukup dengan dukungan sumber daya alam saja. Membangun itu membutuhkan motor penggerak dan motor penggerak itu disebut pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengendalikan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh adanya tiga kekuatan dasar, yakni (1) kemauan, (2) kemampuan, baik *managerial* maupun

leadership dan (3) keberanian. Tiga modal dasar kepemimpinan itu secara implisit dan eksplisit ada dalam *asta brata*. *Asta brata* ini menyajikan delapan sifat menjadi seorang pemimpin dan setelah ditelaah, sesuai dengan prinsip-prinsip dan gaya kepemimpinan modern, sehingga tidak sia-sia para leluhur kita menyediakan kekuatan endogen dalam bentuk kearifan lokal. Kita jangan cepat-cepat kagum dengan teori modern dan mencampakkan kekayaan lokal. Padahal kita telah memiliki semua itu. Mengapa kita tinggalkan? Sangat bijaksana, bila kita mengintegrasikan kekuatan kearifan lokal dengan kekuatan kearifan nasional dan kekuatan kearifan modern dalam tatanan kehidupan global ini.

Oleh karena itu, pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional hendaknya senantiasa memperhatikan dan menggalai serta menumbuhkembangkan kearifan lokal di dalam membangun wilayahnya. Setiap kearifan lokal memiliki kekuatan tersendiri dalam mendukung setiap kegiatan di masyarakat baik yang ada di perdesaan maupun perkotaan. Penguatan kearifan local ini akan menjamin adanya koneksitas dalam pencapaian SDGs. Pendekatan pembangunan dengan filosofi Tri Hita karena sebagai salah satu kearifan lokal di Bali memiliki hakikat tentang keharmonisan dan keberlanjutan. Misalnya filosofi *cenik lantang* dalam tradisi masyarakat Bali memiliki nilai orientasi pembangunan jangka panjang yang tanpa mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam jumlah terbatas.

Demikian pula halnya dalam ekonomi modern yang dikenal dengan sistem *profit sharing*, ternyata dalam ekonomi tradisional di Bali telah berkembang hingga saat ini dengan sistem *ngadas*, *nandu* dan *nyakap*. Pada dasarnya sistem tradisional ini identik dengan sistem modern tersebut karena adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja dengan sistem pembagian hasil yang disepakati bersama. Bahkan sistem pemupukan modal juga sudah dikenal sejak dahulu yang disebut dengan *cingkreman* yang dalam sistem ekonomi modern dikenal dengan saham, simpanan wajib, simpanan pokok dan konsorsium atau *joint-venture*. Ini berarti bahwa nilai kearifan lokal di Bali mengandung filosof profesionalisme yang disertai dengan semangat *pageh*, *puguh*

dan *jengah*. Dalam teori pembangunan, filosofi *pageh*, *puguh* dan *jengah* serupa dengan teorinya McClelland dalam *need for achievement theory*. Oleh karena itu, kearifan lokal yang ada di Bali sangat perlu untuk diperkuat dan ditumbuhkembangkan guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan mendukung pembangunan nasional.

Saya berharap isi buku ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca di dalam merencanakan model pembangunan yang dilandasi oleh kearifan lokal yang masih sangat relevan dalam era globalisasi. Sinergi antara nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai modern diperlukan untuk memperoleh hasil pembangunan yang optimal dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di segala bidang dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar tambahan bagi mahasiswa baik pada tingkat Diploma, sarja dan pascasarjana yang berkenaan dengan kelembagaan lokal dan sistem ekonomi lokal.

Denpasar, Oktober 2017

I Nengah Dasi Astawa
Gede Sedana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xii
Bab I Pendahuluan	1
1. Bali Pulau Mungil	1
2. Sekilas Wajah Struktur Ekonomi Bali	5
3. Harapan dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Bali	8
4. Hakikat Pembangunan Ekonomi Bali Berkelanjutan	12
5. Kearifan Lokal sebagai Kekuatan Endogen Bali	14
Bab II Sistem <i>Nyeraki</i> dalam Optimalisasi Pembangunan Pertanian	17
1. Prolog	17
2. Implikasi Pola <i>Nyeraki</i> dalam Perkebunan	20
3. Implikasi Pola <i>Nyeraki</i> dalam Tanaman Pangan	26
4. Implikasi Pola <i>Nyeraki</i> dalam Peternakan	37
5. Implikasi Pola <i>Nyeraki</i> dalam Perikanan	41
6. Implikasi Pola <i>Nyeraki</i> dalam Hortikultura	42
7. Epilog	44
Bab III <i>Ngadas</i> dan <i>Nandu</i> Atau <i>Nyakap</i> Suatu Sinergi Pemodal dan Pekerja	48
1. Prolog	48
2. <i>Ngadas</i> dan <i>Nandu</i> Identik Model <i>Profit Sharing</i>	49
3. Sistem <i>Ngadas</i> dalam Tradisi Pemeliharaan Ternak di Bali	52
4. Sistem <i>Nandu</i> atau <i>Nyakap</i> dalam Tradisi Penggara- pan Lahan Pertanian di Bali	54
5. Epilog	56

Bab IV Implementasi <i>Tri Hita Karana</i> Dalam Industri ...	59
1. Prolog	59
2. Hakikat <i>Tri Hita Karana</i>	61
3. Implementasi <i>Tri Hita Karana</i> dalam Industri	65
4. Epilog	78
Bab V <i>Cenik Lintang</i> Sebagai Dasar Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Industri Pariwisata	80
1. Prolog	80
2. <i>Cenik Lintang</i> dan Pembangunan Industri Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat	83
3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis <i>Cenik Lintang</i>	88
4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Umat	94
5. Makna Pemberdayaan Ekonomi Umat	98
6. <i>Cenik Lintang vs Tukad Bangka</i>	102
7. Epilog	103
Bab VI Cingkreman Sebuah Model Pemupukan Modal	105
1. Prolog	105
2. <i>Cingkreman</i> Modal Pembangunan Ekonomi Produktif dan Kreatif Masyarakat Bali	107
3. Hambatan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Kreatif di Bali	111
4. Epilog	113
Bab VII <i>Pageh, Puguh Lan Jengah</i> Suatu Konsep Pem- angunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	115
1. Prolog	115
2. Kualitas SDM Menentukan Keberlanjutan Pem- angunan Ekonomi	117
3. Strategi Pembangunan SDM Berkualitas	120
4. Epilog	123

Bab VIII Asta Brata Sebagai Pedoman Pemimpin	
Membangun Ekonomi Jagadhita	126
1. Prolog	126
2. Konsep Kepemimpinan <i>Asta Brata</i>	128
3. Kepemimpinan dan Ekonomi <i>Jagadhita</i>	136
4. Epilog	141
Bab IX Penutup	143
Referensi	147
Glosari	153
Indeks	157
Tentang Penulis	161

DAFTAR GAMBAR/BAGAN DAN TABEL

Bagan 01.	Struktur organisasi koperasi Subak Guama ...	30
Bagan 02.	Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan ekonomi Umat	88
Gambar 01.	Peta Pulau Bali	2
Gambar 02.	Sistem <i>nyeraki</i> di pasar tradisional	19
Gambar 03.	Sistem perdagangan pada super market	19
Gambar 04.	Perkembangan Penduduk Bali 2000-2005	118
Tabel 01.	Matrik Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat	90

BAB I

PENDAHULUAN

Keterbatasan waktu, ruang, prasarana sarana, dan sumber daya, termasuk faktor produksi, dapat mendorong manusia menjadi kreatif dan inovatif, termasuk cermat dan cerdas memanfaatkan secara efektif dan efisien dengan bertumpu pada keunggulan dan kekuatan lokal. Kekuatan lokal seperti beberapa kearifan lokal Bali dapat diimplementasikan dalam mendayagunakan dan memberhasilgunakan sumber daya untuk pembangunan secara harmonis, dinamis dan berkelanjutan menuju masyarakat Bali “jagadhita”.

1. Bali Pulau Mungil

Kecil, bukan berarti tidak bisa menjadi kuat. Apa yang diungkapkan oleh Schumacher (1981) dalam buku berjudul “*Small is Beautiful*”, ternyata mempertegas bahwa keterbatasan sumber daya alam, tidak hanya bermakna indah, tetapi dapat menjadi kuat dan bermafaat untuk memenuhi kepentingan, keinginan dan kebutuhan manusia. Tentu hal itu dapat terwujud dilandasi oleh pola dan sistem pengelolaan secara optimal, sistemik dan profesional atas seluruh keterbatasan potensi, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Pulau Bali merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas kecil dan terbatas, bila kita bandingkan dengan luas beberapa pulau di Indonesia. Luas Pulau Bali 5.636,66 Km² atau 0,29% dari luas total wilayah kepulauan Indonesia. Kendatipun Bali memiliki pulau-pulau kecil, seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan, namun tidak semua pulau tersebut dapat dimanfaatkan, terutama untuk pertanian dan perkebunan. Pulau Menjangan, misalnya sampai saat ini pulau ini tidak berpenduduk dan menjadi salah satu pengembangan objek wisata Bali Utara.

Gambar 01. Peta Pulau Bali



Implikasi luas Pulau Bali yang kecil dan terbatas, pertumbuhan industri besar, belum dapat berkembang setara dengan perkembangan industri menengah dan kecil, apalagi dengan sektor tersier. Membangun industri besar banyak kendalanya. Di antaranya; (a) aspek lokasi, industri besar yang rakus lahan sulit tumbuh, apalagi untuk ekspansi di kemudian hari, (b) bahan baku, Pulau Bali tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Apabila dikembangkan industri besar, tentu secara ekonomi tidak menguntungkan karena dapat menimbulkan *high cost economic* dan produk yang dihasilkan tidak *marketable* atau tidak mampu bersaing dengan produk sejenis. Di Bali tidak mungkin membangun industri baja dan sejenis karena sumber bahan bakunya hanya tersedia di luar Bali.

Tidak terpengkhiri bahwa Pulau Bali adalah mungil dan akan semakin mungil, karena alih fungsi lahan pertanian ke bidang lain, semakin tidak terbendung. Dalam perkembangan tiga dasa wara terakhir, masyarakat Bali mengalami perkembangan sangat signifikan di bidang ekonomi, terutama wilayah pusat-pusat pembangunan kepariwisataan. Bagus (1980) mengungkapkan bahwa perubahan dalam masyarakat

dan kebudayaan Bali terjadi sangat pesat sejak Bali menjadi pusat perkembangan pariwisata. Pengaruh pariwisata terjadi karena kegiatan industri pariwisata dinamis dan dinamika itu ditunjang oleh pembangunan prasarana dan sarana pariwisata.

Alih fungsi lahan pertanian Bali tidak dapat dibendung oleh kekuatan apapun. Banyak aturan hukum yang dibuat, tetapi hanya menjadi pajangan sehingga oleh banyak pihak disebut sebagai “macan ompong”. Dalam pemberitaan di beberapa media lokal disebutkan, bahwa lahan pertanian di Bali telah beralih fungsi cukup signifikan. Tidak kurang dari 1.000 hektar per tahun, lahan pertanian berubah peruntukkan. Lahan pertanian beralih fungsi untuk pembangunan infrastruktur sosial dan fasilitas umum, perumahan dan investasi swasta dan pembangunan berbagai usaha ekonomi produktif. Secara kasat mata lahan pertanian di Bali mengalami pengurangan secara gradual, karena berbagai tekanan dan kepentingan masyarakat dengan berbagai alasan.

Hasil penelitian Dasi Astawa (1997) di Desa Jimbaran, Kuta, Badung, Provinsi Bali dengan judul “Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Sosial dan Ekonomi, mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan petani menjual lahan pertanian mereka. Secara lengkap dijabarkan seperti berikut ini.

a. Pajak

Kemajuan pariwisata telah mengakibatkan perubahan status lahan pertanian. Dahulu lahan di wilayah Desa Jimbaran kurang bernilai, sehingga beban pajak kecil dan sejak pariwisata bertumbuh, harga jual tanah meningkat sehingga membawa implikasi terhadap pajak. Masyarakat yang hanya bekerja sebagai petani dan tidak memiliki penghasilan tetap, beban pajak cukup dirasakan membebani kehidupan mereka. Hal ini akan mendorong petani menjual lahannya karena ia tidak mampu membayar pajak tinggi. Tingginya beban pajak di tingkat petani tidak sebanding dengan nilai produksi yang dihasilkan dari usaha pertanian (tanaman, dan atau ternak) yang dikelolanya.

b. Harga.

Pemilik lahan pertanian terperangah dengan harga tanah yang tiba-tiba melambung tinggi. Bahkan harga tanah mereka di luar prakiraan sehingga tergoda untuk menjual. Apalagi godaan datang silih berganti, tentu petani yang lugu dan polos tersebut memiliki daya tahan yang terbatas untuk menangkis godaan. Akhirnya, tanah mereka dilepas dan pada saat itu pula sebagian dari mereka tidak sebagai petani lagi, tetapi sebagian menjadi orang kaya baru (OKB). Kondisi ini didukung oleh kurang produktifnya tanah-tanah pertanian yang ada sehingga rangsangan harga tanah yang tinggi mendorong mereka untuk menjual lahannya.

c. Hasil Pertanian.

Memang nasib petani itu kadangkala persis seperti pepatah “naik tangga dan jatuh, tertimpa tangga pula”. Hasil pertanian mereka tidak menentu, di samping tidak adanya kepastian harga. Nilai jual pada saat panen sangat murah bahkan tidak ada permintaan. Kondisi ini merupakan salah satu faktor pendorong petani merelakan lahan pertanian mereka untuk dialihfungsikan. Sumber daya air yang terbatas disertai juga dengan frekuensinya penguasaan teknologi budidaya pertanian mengakibatkan produktivitas yang dihasilkan sangat rendah.

d. Perilaku Generasi Muda.

Perkembangan pembangunan pariwisata yang semakin pesat mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat terutama generasi muda terhadap sector pertanian. Diakui atau tidak, generasi muda Bali relatif enggan menjadi petani. Sebagian besar dari mereka lebih suka menanti pekerjaan, dibandingkan dengan menggarap lahan pertanian. Padahal menanti pekerjaan itu penuh dengan ketidakpastian, tapi mau ngomong apa ungkap seorang tetua di desa tersebut. Keadaan tersebut telah menjadi realitas dalam kehidupan generasi muda yang telah menamatkan pendidikan setara SMA atau perguruan tinggi. Mungkin fenomena ini tidak hanya terjadi di Bali, tetapi juga melanda daerah lain di luar

Bali. Jadi, tatkala orang tua sudah tidak mampu bertani, di satu sisi anak mereka tidak suka bertani, ketika tawaran datang dari pemodal, tentu menjual tanah hanya menunggu waktu. Terdapat pemahaman generasi muda bahwa pekerjaan di sector pertanian tidak menjanjikan dan penuh dengan ketidakpastian terutama menyangkut aspek cuaca dan harga. Selain itu, terdapat prestise yang lebih tinggi dirasakan apabila generasi muda memiliki pekerjaan di luar sector pertanian, seperti di perhotelan, restaurant dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

2. Sekilas Wajah Struktur Ekonomi Bali

Globalisasi sebagai anak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan membawa berbagai risiko dan tantangan baru, turut serta memberikan warna bagi kehidupan masyarakat Bali dalam berbagai aspek, termasuk masyarakat Bali di tingkat pedesaan. Gelombang komersialisasi, konsumeristik, materialistik dan pemanfaatan teknologi baru, telah mempengaruhi perilaku sebagian besar masyarakat penghuni Pulau Seribu Pura dan Pulau Sorga ini. Tekanan kekuatan globalisasi dengan menonjolkan dominasi peran uang atau kapital dalam setiap aktivitas masyarakat dalam kehidupan mereka, telah pula menyingkirkan peran pranata-pranata sosial masyarakat berlandaskan kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong yang menjadi salah satu identitas masyarakat agraris.

Dekade sebelum delapan-puluhan masyarakat Bali masih dominan sebagai petani. Semua pranata-pranata sosial masih tumbuh dan berkembang sebagai wadah atau media untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan sektor pertanian dalam arti luas. Namun sejalan dengan kerelaan masyarakat menerima pariwisata sebagai salah satu subsektor pembangunan ekonomi Bali, maka secara perlahan wajah sektor primer Bali mengalami perubahan secara sistematis.

Berdasarkan pada informasi Statistik Provinsi Bali (2016), disebutkan bahwa perekonomian Bali pada semester I-2016

memiliki pertumbuhan sebesar 6,30 persen yang didorong oleh semua lapangan usaha. Menurut beberapa lapangan usaha pada semester I-2016, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan social, yaitu sebesar 9,73 persen. Pertumbuhan jasa pendidikan adalah sebesar 9,65 persen. Sedangkan pertumbuhan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas adalah mencapai 9,27 persen. Beberapa lapangan usaha utama seperti lapangan usaha yang memiliki peranan (*share*) tertinggi dalam pembentukan PDRB Provinsi Bali adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang besarnya adalah 22,99%. Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (14,58%) dan lapangan transportasi dan pergudangan (9,35%) masing-masing tumbuh sebesar 6,93 persen, 0,05 persen dan 6,59 persen.

Apabila dilihat dari sumber pertumbuhannya (*Source of Growth*), sumber pertumbuhan tertinggi dikontribusikan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang besarnya mencapai 1,36 persen. Sumber pertumbuhan dari lapangan usaha konstruksi memberikan sumbangan sebesar 0,80 persen, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 0,70 persen. Lapangan usaha lainnya seperti lapangan usaha informasi dan komunikasi memberikan sumbangan sebesar 0,59 persen. Sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada memberikan kontribusi hanya sebesar 0,01 persen. Sisanya disumbangkan oleh lapangan usaha lainnya sebesar 2,84 persen.

Jika dibandingkan dengan semester yang sama tahun sebelumnya, sumbangan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan dimana pada semester I-2015 sumbangan terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Bali hanya sebesar 1,24 persen. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman pada semester ini yang mencapai 18,59 persen lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisman pada semester yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,84 persen. Namun sumbangan lapangan usaha pertanian justru mengalami penurunan dari

0,63 persen menjadi 0,01 persen. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya produksi kategori tanaman pangan akibat menurunnya luas panen tanaman padi sawah yang mencapai sebesar 7,34 persen jika dibandingkan dengan luas panen semester I-2015. Selain itu penurunan juga disumbang oleh penurunan sub lapangan usaha tanaman horti tahunan akibat penurunan produksi pada beberapa komoditi horti tahunan seperti pisang dan salak yang menurun kurang lebih 29 dan 15 persen.

Berdasarkan pada fakta di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor primer (pertanian) terhadap PDRB Bali memiliki kecenderungan yang terus menurun. Sekadar mengingatkan saja, pada tahun 2002 kontribusi sektor primer sebesar 21,95% terhadap PDRB dan tahun 2003 turun menjadi 21,66%, kemudian tahun 2004 turun menjadi 20,74%, data terakhir tahun 2005 telah mencapai 20,29% dan pada tahun 2016 mencapai 14,58 %. Sementara itu, kontribusi sektor tersier terus meningkat. Tahun 2002 sebesar 62,43%, kemudian bergerak naik di tahun 2003 menjadi 62,97% dan tahun 2004 meningkat menjadi 63,86%, serta tahun 2005 telah mencapai 64,48%.

Penurunan kontribusi sektor primer terhadap PDRB Bali, menjadi indikator bahwa pembangunan ekonomi Bali selama 30 tahun telah mengubah secara bertahap dan signifikan struktur ekonomi. Di bawah delapanpuluh struktur ekonomi Bali dominan bersumber dari kontribusi sektor primer dan sekarang telah didominasi oleh kontribusi sektor tersier. Lompatan perubahan struktur yang dialami Bali tersebut oleh banyak pihak dianggap sebagai suatu fenomena yang tidak lazim. Pada umumnya pergeseran struktur ekonomi pada suatu wilayah terjadi secara gradual, yakni dari dominasi pertanian menuju pada dominasi industri dan dominasi itu bergerak pada bidang perdagangan, keuangan, jasa dan sejenisnya. Satu keunikan lagi telah tertoreh dalam dinamika kehidupan masyarakat Bali.

Dalam pandangan Bagus (1996) dinyatakan bahwa suatu daerah bila dibangun dengan bertumpu pada satu kekuatan atau bertumpu dominan pada satu sektor saja, sangat riskan dan mengandung risiko tinggi. Apabila mengalami krisis, maka

ekonomi daerah tersebut menjadi terpuruk. Pandangan itu dapat menjadi peringatan bagi pembangunan ekonomi Bali yang hanya mengadakan pembangunan industri pariwisata sebagai lokomotif. Perjalanan multikrisis ekonomi bangsa Indonesia pertengahan tahun 1998 merupakan cermin fundamental ekonomi rapuh. Bahkan Anggito Abimanyu (2000) menilai bahwa terjadinya krisis ekonomi nasional, karena mengabaikan bahkan terlepas dari prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, yakni dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Peran dominan pelaku konglomerasi dan mengabaikan peran ekonomi kecil dan menengah telah membuktikan fundamental dan struktur ekonomi hampir ambruk secara total. Patut kita bersyukur dan tertolong oleh pelaku ekonomi kecil dan menengah dengan memiliki sifat lentur, fleksibel dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, Bali perlu merevitalisasi kekuatan ekonomi dengan bertumpu pada kekuatan lokal, sehingga fundamental ekonomi tidak rapuh. Apabila terkena gonjangan atau turbelensi unsur-unsur dalam struktur ekonomi saling melengkapi, bukan saling meniadakan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang kuat, progresif dan dinamis akan terwujud.

3. Harapan dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Bali

Mahbub ul Haq (1983) mengungkapkan terdapat tujuh (7) dosa bagi perencana pembangunan, terutama pada negara-negara sedang berkembang. Salah satu dosa perencana pembangunan adalah memuja angka. Mereka berpandangan bahwa apa yang telah dapat diukur atau dinyatakan dengan angka, bermakna dan apa yang tidak bisa diukur dengan angka, tidak bermakna dan dapat diabaikan. Padahal tidak semua capaian pembangunan dengan angka bermanfaat bagi masyarakat. Seperti capaian angka pertumbuhan ekonomi tinggi dan peningkatan pendapatan per kapita tinggi. Angka tersebut menjadi maya, bila pertumbuhan tinggi dan peningkatan pendapatan, tidak diikuti dengan pemerataan, apalagi di situ peran sentral kapital sangat tinggi. Masyarakat, terutama dipedesaan tidak dapat bagian apa-apa dari peningkatan angka tersebut. Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi

(1987) mengatakan bahwa para pelaku ekonomi kecil, seperti ekonomi petani yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok, cenderung untuk mengalah, jika ekonomi pasar atau sistem kapitalis menembus wilayah ekonomi tradisional dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu telah menjadi realitas dalam kehidupan kekinian, ketika *supermarket* dan *hypermarket* masuk ke kota pinggiran di Indonesia, pasar tradisional perlahan-lahan tergusur secara sistematis.

Ekonomi kuat, seperti sistem kapitalis tidak bisa dibendung dan mereka dapat masuk dalam berbagai pasar. Oleh karena itu, perlu pula diadopsi jalan pikiran Gandhi dalam memajukan ekonomi di tengah-tengah tekanan kapital. Apalagi Bali dengan keterbatasan sumber daya alam. Gandhi mengungkapkan bahwa membangun ekonomi dapat diawali dengan menekankan sikap hidup sederhana, hemat, cermat dan berubah secara berangsur-angsur karena mengejar “kemajuan” dengan cara melakukan perubahan sosial besar-besaran dianggap dapat membinasakan moral rakyat dan membuat mereka itu tak berdaya. Akhirnya mereka akan tergantung pada orang-orang kaya dan ahli yang hanya segelintir jumlahnya. Belum tentu itu adalah jalan atau upaya yang benar untuk menyediakan makanan bagi si lapar (Schumacher, 1981).

Pandangan Gandhi di atas, patut menjadi refleksi dan renungan bagi pengambil kebijakan dalam membangun Bali. Jika alam dieksploitasi dan berubah secara besar-besaran dan tiba-tiba dengan mempertimbangkan pencapaian angka dan kemajuan, maka pembangunan Bali akan kebablasan atau hilang kendali. Perubahan sosial secara besar-besaran tersebut, akan mendorong dan menjadikan masyarakat mengalami *shock culture*. Sebagian masih berpijak kuat pada budaya tradisional dan sebagian lagi baru belajar masuk dalam budaya industri. Pembangunan dengan pola seperti itu, benar-benar mengubah keunikan dan *taksu* Bali dan rupanya tidak pas dengan strategi pembangunan Bali.

Bali dibangun berdasarkan keunikan, sehingga atas dasar itu dikembangkan menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Kekhasan Bali dapat dilihat dari tata cara

kehidupan masyarakat Bali, khususnya pemeluk Agama Hindu (Mantra, 1993). Hampir semua aktivitas kehidupan masyarakat selalu memadukan agama, adat dan budaya. Bahkan bagi orang luar Bali, sangat sulit melihat dan membedakan suatu kegiatan, yang mana kegiatan agama dan yang mana kegiatan adat atau budaya. Tatacara kehidupan masyarakat seperti itu menyebabkan kegiatan agama, adat dan budaya menjadi hidup dan “bertaksu” sepanjang hari. Orang luar, terutama wisatawan asing banyak terkagum-kagum melihat keterpaduan dan keterpautan agama, adat dan budaya. Tidak ada hari tanpa aktivitas agama, adat dan budaya di pulau dengan julukan *last paradise* ini.

Begitu pula kegiatan ekonomi masyarakat Bali. Tidak ada aktivitas ekonomi tanpa disertai dengan ritual. Sejak memulai usaha atau biasa disebut dengan *ngawit lan padewasan* sampai pada tahapan operasional. Bahkan menghentikan suatu usahapun dalam tradisi masyarakat (Hindu) Bali, tidak begitu saja dapat dilakukan, tapi melalui upacara yang disebut dengan *mreline*. Jadi, segala aktivitas disertai dengan ritual. Manusia Bali percaya dengan hukum karma, kita hanya mampu berbuat secara maksimal, namun segala hasil yang lazim disebut *pahala* ditentukan oleh *Sang Hyang Widi*/Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Bali sangat meyakini dan percaya dengan hukum *karmapala*. Berbuat baik, akan menerima hasil baik, sebaliknya berbuat jahat dan buruk akan menerima hasil buruk pula.

Alam pikir masyarakat Bali seperti itu, seakan-akan telah menancapkan suatu harapan bahwa pembangunan ekonomi hendak berorientasi pada harmoni, keseimbangan dan keberlanjutan dengan menempatkan orientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Model berpikir seperti itu dilandasi oleh argumentasi keterbatasan ketersediaan sumber daya alam Bali, sehingga menuntut pengelolaan secara cerdas, cermat, efektif, dan efisien sehingga bisa mewujudkan masyarakat Bali sejahtera lahir batin yang lazim disebut *jagadhita*.

Dalam mewujudkan harapan sebagaimana disajikan tersebut, dibutuhkan suatu model atau strategi pembangunan ekonomi dan dapat mengubah tantangan menjadi peluang.

Tantangan riil dihadapi Bali kekinian adalah masalah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Bali Selatan telah meninggalkan wilayah utara, timur, dan barat di bidang pembangunan infrastruktur sehingga ketimpangan ekonomi secara nyata terlihat antarwilayah tersebut.

Implikasi ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut, menyebabkan arus urbanisasi ke wilayah selatan sangat deras, sehingga pertumbuhan penduduk di wilayah selatan relatif lebih tinggi. Fenomena seperti itu hampir terjadi di seluruh wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Ibarat semutakan selalu mencari gula. Tekanan penduduk pendatang, sebagaimana terjadi di wilayah Bali Selatan tersebut, secara signifikan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan berbagai implikasi kurang menguntungkan terhadap pertumbuhan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penataan administrasi penduduk secara terencana dan sistematis dengan pendekatan teknologi sudah patut dan pantas menjadi bagian terintegrasi dalam pembangunan Bali, bila ingin pembangunan Bali berkelanjutan.

Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2006 penduduk Bali telah mencapai 3.431.585 jiwa. Sementara itu luas Pulau Bali 5.636,66 Km². Itu berarti angka kepadatan penduduk per kilometer tahun 2006 telah mencapai rata-rata 608,79 jiwa atau 609 jiwa. Angka kepadatan penduduk itu terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2005 angka kepadatan penduduk Bali rata-rata sebesar 600,27 jiwa per Km². Sudah tentu sebagaimana diungkapkan di atas bahwa peningkatan penduduk, termasuk peningkatan angka kepadatan penduduk Bali akan mengakibatkan daya dukung (*carrying capacity*) Bali semakin padat dan sesak.

Carrying capacity padat dan sesak itu, berimbas terhadap berbagai masalah sosial dan penyakit sosial dalam masyarakat. Angka kejahatan atau kriminalitas di Bali, dirasakan atau tidak, telah mengalami peningkatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Begitu pula dengan angka kecelakaan di jalan raya dan menyebabkan korban berat hingga ringan, terus meningkat sejalan dengan mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai

aktivitas sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Memang benar, bahwa ketika ruang manusia mulai semakin sesak dan terbatas, kehidupan manusia semakin gundah gulana. Masyarakat dihadapkan pada berbagai bencana, seperti di kala hujan banjir menjadi bagian dari kehidupan dan di musim panas ketersediaan air mulai semakin berkurang dan terbatas. Kondisi itu telah terjadi di sebagian wilayah Bali. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan Bali dapat dilakukan dengan tanpa merusak alam dan lingkungan, jika kearifan lokal sebagai warisan bernilai tinggi diadopsi menjadi dasar pembangunan Bali, termasuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

4. Hakikat Pembangunan Ekonomi Bali Berkelanjutan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju ke arah progresif dengan berasaskan keadilan dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, baik lahir maupun bathin. Begitu pula sasaran pembangunan ekonomi, dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli, mengurangi pengangguran serta mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan adalah sebuah kata yang acapkali menjadi jargon-jargon dalam dunia perpolitikan lokal, nasional bahkan internasional. Banyak penyebab orang menjadi miskin. Salah satu penyebab kemiskinan adalah keterbatasan kepemilikan faktor produksi. Oleh karena itu, luas wilayah Pulau Bali, bila dilihat sebagai bagian dari faktor produksi, telah nyata-nyata terbatas, dibandingkan dengan sebagian pulau di Indonesia. Keterbatasan wilayah yang bermuara pada keterbatasan sumber daya alam patut direnungkan secara mendalam dan menyeluruh oleh seluruh masyarakat Bali, agar jangan dalam jangka waktu tertentu menjadi pemicu tumbuhnya angka kemiskinan, terutama kemiskinan struktural yang disebabkan oleh rendahnya kepemilikan faktor produksi, seperti tanah atau lahan pertanian.

Lahan pertanian dari tahun ke tahun semakin menyempit, akibat alih fungsi untuk berbagai kepentingan. Jika fenomena itu berlajam secara sistematis dan tidak terkendali, maka petani Bali

dari hari ke hari semakin terpinggirkan. Implikasi dari realitas tersebut adalah budaya Bali akan terkikis karena ketidakberdayaan pendukung budaya, baik secara ekonomi maupun sosial.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Bali terus menurun setiap tahun. Tanda-tanda itu telah menjustifikasi bahwa lahan terbatas Bali belum dikelola secara efektif, efisien dan berorientasi pada paham pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sejalan dengan kondisi itu, sebaran angka rumah tangga miskin (GAKIN) terdapat di seluruh kabupaten di Bali dan itu menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan ekonomi belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Data rumah tangga miskin berikut ini merupakan bahan untuk dapat direnungkan secara mendalam, terutama bagi perencana pembangunan. Sebab kesalahan dalam merencanakan pembangunan merupakan dosa besar, sebagaimana diungkapkan oleh Mahbub ul Haq (1983) dalam buku berjudul "Tirai Kemiskinan: Tantangan untuk Dunia Ketiga". Terdapat tujuh dosa bagi perencana pembangunan, diantaranya adalah penanaman modal maya.

Tidak hanya persoalan kemiskinan belum dapat dituntaskan oleh pembangunan selama ini. Akan tetapi sejalan dengan keterbatasan lahan pertanian Bali dan pemanfaatannya belum menyentuh paradigma pembangunan berkelanjutan, telah membawa implikasi negatif terhadap eksistensi salah satu kearifan lokal bernilai adi luhung tinggi, seperti *subak*. Lembaga tradisional ini telah banyak tidak berfungsi sebagaimana kiprah dan titahnya dahulu, tatkala pertanian masih mendominasi struktur ekonomi Bali. Fakta itu mengingatkan kita pada perlu ditumbuhkan sebuah kesadaran baru pada masyarakat dan pemerintah untuk membangun Bali lebih terencana, terarah dan terorganisir demi eksistensi dan keberlanjutan kekayaan Bali yang mengandung nilai filosofis magis-relegius, yakni peradaban, tradisi dan budaya Bali.

Berdasarkan teori pembangunan modern, terdapat tawaran menarik dan sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali dalam pembangunan dengan keterbatasan sumber daya

alam, seperti lahan pertanian di Bali. Sistem intensifikasi dalam pertanian dengan keterbatasan lahan telah dikembangkan oleh negara-negara pemilik keterbatasan faktor produksi, seperti Jepang. Sistem tersebut sejalan dengan konsep kearifan lokal Bali yang disebut dengan *nyeraki* dan *cenik lantang* dengan dasar *puguh*, *pageh lan jengah* serta *tri hita karana*. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa itu belum diimplementasikan secara operasional dan maksimal serta masih berkuat dalam tataran wacana?

Memang membangun dalam keterbatasan dibutuhkan pemimpin dengan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Tidak hanya cukup dengan dukungan mayoritas dalam pemilu, tetapi masih dibutuhkan syarat atau kriteria minimal, yakni 3 K. Seorang pemimpin wajib memiliki minimal kemauan, kemampuan dan keberanian. Kemauan untuk *ngayah* dan *bhakti* terhadap masyarakat Bali. Kemampuan, termasuk memiliki 6 keahlian, yakni *technical skill*, *managerial skill*, *soft skill*, *human skill*, *design skill*, dan *conceptual skill*. Sementara itu, indikator keberanian ditunjukkan dengan keberanian mengambil risiko dan berani bertanggungjawab atas perbuatan sebagai seorang pemimpin.

Hakikat pembangunan ekonomi Bali berkelanjutan, tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, tetapi semua faktor pendorong pembangunan wajib bersinergi. Misalnya faktor kearifan lokal, teori pembangunan modern dan peran strategis pemimpin. Prinsip yang dipegang adalah keterbatasan sumber daya alam, mendorong kita untuk berpikir bahwa jalan terbaik pembangunan berkelanjutan, khususnya ekonomi Bali adalah berorientasi pada paradigma pembangunan yang tidak mengabaikan kekuatan lokal yang terbukti memiliki kekuatan endogen.

5. Kearifan Lokal sebagai Kekuatan Endogen Bali

Membicarakan kearifan lokal di lingkup Bali saja memiliki cakupan yang sangat luas, apalagi di Indonesia. Oleh karena itu, fokus pemaparan kearifan lokal ini hanya yang ada di Bali

dan khusus berkaitan dengan ekonomi. Kearifan lokal sebagai realitas multifungsi telah tumbuh dalam masyarakat, termasuk masyarakat Bali. Fakta menunjukkan bahwa pada kelompok masyarakat tertentu masih belum memanfaatkan secara optimal kearifan lokal sebagai roh pembangunan. Tidak sedikit kearifan lokal pada daerah tertentu, termasuk Bali masih terpendam dan sebatas wacana saja sehingga nilai guna dan spirit yang terkandung di dalamnya masih disfungsi.

Istilah kearifan lokal merupakan interpretasi konsep *local genius* dan telah dikembangkan oleh Quaritch Wales berdasarkan pada gagasan von Heine Geldern, tentang tradisi kebudayaan megalitikum dan berkembang di Asia Tenggara (Semadi Astra, 2004: 112). Di Indonesia istilah *local genius* banyak diperbincangkan dan telah mendapatkan perhatian dari para pakar budaya. Di antaranya, Soebadio (1986) memberikan arti sebagai identitas atau kepribadian budaya bangsa. Sementara itu Mundardjito (1986) memberikan pandangan bahwa kepribadian kebudayaan lokal sebagai pengganti *local genius* dan masih banyak istilah dipadankan dengan *local genius*, namun dalam perkembangan terakhir, orang lebih akrab menggunakan istilah kearifan lokal.

Kearifan lokal sebagai salah satu kekayaan yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti dijelaskan di depan memiliki beragam fungsi. Keberagaman fungsi bukan hanya berkenaan dengan kemampuan kearifan lokal dalam menghadapi masuknya budaya luar, tetapi juga kemampuan dalam menumbuhkan, membina, serta mengarahkan perkembangan budaya itu sendiri. Dalam bahasa lain, kearifan lokal itu tidak saja berfungsi dalam menghadapi kekuatan eksogen, tetapi juga dalam mengokohkan kekuatan endogen budaya bersangkutan sehingga terwujud perkembangan lokal yang kokoh, maju dan mandiri. Dalam arti tidak terikat dengan sifat ketergantungan pada pihak atau budaya luar (Semadi Astra, 2004).

Gambaran di atas, menandakan bahwa kearifan lokal memiliki kemampuan untuk tidak terikat dan tidak tergantung terhadap pihak luar. Menjadi relevan dan pas, jika spirit dan nilai-nilai kearifan lokal Bali dapat diadopsi untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi secara optimal sehingga memiliki nilai guna dan hasil guna. Fakta menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan dalam pembangunan ekonomi adalah ketergantungan dengan kekuatan luar. Ketergantungan ekonomi terhadap kekuatan luar tersebut tidak hanya sebatas pasar, modal dan faktor produksi lain, tetapi termasuk pula dalam menetapkan kebijakan internal seperti penentuan harga dan disain (Faisal Baasir, 2003). Jadi, tidak berlebihan bilamana dalam menghadapi tekanan arus globalisasi dilakukan revitalisasi kekuatan lokal. Apalagi menurut Giddens (2001) globalisasi sebagai anak dari kemajuan ilmu dan teknologi, memunculkan berbagai risiko dan ketidakpastian baru dan melampaui kemampuan antisipasi kita. Perubahan dasyat ini merombak tradisi, bahkan berhubungan dengan agama yang menjadi pijakan banyak orang selama ini.

Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia dan memiliki ciri khas tertentu, sehingga berbeda dengan destinasi lain, sudah sepantasnya mengadopsi dan mengadaftasikan spirit atau *taksu* kearifan lokal dalam menumbuhkembangkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai subsektor pembangunan ekonomi Bali. Kondisi pariwisata sangat rentan dengan isu-isu global dan ketika segala bentuk tekanan eksternal tidak bisa kita bendung, maka hanya ada satu jalan, yakni memperkuat kekuatan internal dan kekuatan internal itu tercermin pada kearifan lokal.

BAB II

SISTEM NYERAKI DALAM OPTIMALISASI PEMBANGUNAN PERTANIAN

Dalam sistem perdagangan tradisional Bali dikenal istilah ceraki. Merupakan suatu model berdagang dengan kelengkapan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan pembeli, sehingga pembeli hanya datang pada satu pedagang saja dan semua kebutuhan barang mereka terpenuhi. Dalam dunia pasar modern, sistem ini disebut dengan one stop shopping dan ada pada pasar swalayan, supermarket, bahkan pada hypermarket. Sementara itu, dalam perspektif produksi sangat sesuai dengan upaya menganekaragamkan budidaya pertanian di Bali melalui pendekatan intensifikasi, diversifikasi, diferensiasi dan integrasi untuk memenuhi pasar lokal, nasional bahkan global.

1. Prolog

Banyak pihak mengungkapkan dalam berbagai pertemuan formal maupun informal bahwa, ketika masyarakat Bali meninggalkan pertanian, akan terjadi pergeseran budaya dalam masyarakat. Perkembangan ataupun pergeseran budaya tersebut bisa saja terjadi pada tataran bentuk, kendatipun dalam tataran fungsi dan makna masih tetap eksis sejalan dengan dinamika peradaban manusia. Akan tetapi bila pembangunan tidak terkendali, bisa bergeser dalam cakupan lebih luas, yakni bentuk dan fungsi bahkan makna, seperti pergeseran beberapa pura subak di tempat tertentu.

Bali telah mengalami pergeseran struktur ekonomi. Pergeseran struktur ekonomi seperti diungkapkan pada bab I, berimbang terhadap pergeseran budaya dan itu tidak dapat dicegah maupun dihindari. Oleh karena budaya Bali yang tumbuh dan muncul dari peradaban masyarakat agraris dan kini masa kejayaan sektor pertanian telah turun, pergeseran budaya telah menjadi realitas. Tatkala masyarakat Bali menerima industri

pariwisata beserta berbagai atribut yang melekat dan menyertai, sadar atau tidak sadar masyarakat Bali telah berani dan siap menghadapi berbagai perubahan, termasuk perkembangan, pergeseran dan persilangan budaya bahkan kehilangan budaya.

Namun demikian, masih tersisa kekuatan internal-lokal, bila masyarakat menghendaki perubahan budaya bertumpu pada agraris dan tidak terjadi secara sporadis-radikal. Pun berubah, diharapkan berlangsung secara evolutif-gradual. Kekuatan itu terletak pada kemauan dan kemampuan masyarakat melakukan penggalan, pelestarian, revitalisasi dan mengimplimentasikan dalam membangun pertanian seperti kearifan lokal. Kendatipun terkendala oleh keterbatasan, seperti keberadaan lahan pertanian, dari hari ke hari semakin menyempit, akibat alih fungsi untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali.

Tawaran buku ini adalah suatu sistem yang disebut dengan *nyeraki*. Implementasi sistem *nyeraki* masih layak, walaupun eksistensi sistem *nyeraki* semakin berkurang pada masyarakat Bali, terutama di pasar tradisional. Buku ini tidak secara absolut mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan tradisional dalam berdagang dengan cara ortodok dan konservatif, tetapi filosofi sistem *nyeraki* itu masih sesuai diterapkan, tatkala dihadapkan pada keterbatasan sumber daya alam seperti lahan pertanian dengan pendekatan pembangunan intensifikasi, diversifikasi, diferensiasi dan integrasi untuk membudidayakan keberagaman komoditi pertanian sehingga sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan pasar lokal. Sistem *nyeraki* ini sejatinya menjadi cikal bakal bertumbuhkembangnya sistem perdagangan berbagai macam produk dalam satu lapak, yang selanjutnya menjadi tmepat yang lebih besar hingga *upper market* (lihat Gambar 2 dan Gambar 3).

Gambar 2
Sistem *nyeraki* di pasar tradisional



Gambar 3
Sistem perdagangan pada mini dan `super market



Sumber foto: Gede Sedana, 2017

Kata *nyeraki* berasal dari *ceraki* atau *ceraken* artinya sebuah sistem berdagang yang dianut oleh masyarakat Bali di pasar tradisional dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi pembeli secara lengkap, sehingga pembeli hanya mendatangi satu penjual saja sudah mendapatkan semua barang yang dibutuhkan. Filosofi dan esensi *ceraki* itu adalah menyediakan berbagai jenis barang dan menempatkan tepat pada tempat, posisi dan tidak bercampur, namun menjadi satu kesatuan sehingga mudah mengambil saat melayani pembeli. Sistem ini mengandung suatu

makna sangat pas dan cocok, diterapkan dalam pembangunan pertanian Bali dengan berbagai keterbatasan dan karakteristik lahan pertanian yang memiliki kekhasan antar wilayah. Dalam usahatani baik di lahan sawah maupun non-sawah, system *nyeraki* ini diberlakukan oleh kelompok petani, subak dan subak-abian termasuk koperasi petani di dalam menyediakan sarana produksi pertanian, seperti benih, pupuk, pestisida, peralatan pertanian dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan sehari-hari para petani dan keluarganya.

Berbagai budidaya pertanian dalam arti luas dapat dikembangkan dengan menganut sistem *nyeraki*. Sistem *nyeraki* ini dapat menjadikan Bali sebagai sebuah pulau seperti pasar swalayan, *supermarket* atau *hypermarket* di bidang pertanian, sehingga kekawatiran akan terjadinya pergeseran budaya secara sporadis-radikal, akibat pergeseran struktur ekonomi Bali dapat diperlambat bahkan ditiadakan dengan bertumpu pada kekuatan lokal. Berbagai komoditi dapat dibudidayakan di Bali melalui keterpaduan pola intensifikasi, diversifikasi, diferensiasi, dan integrasi.

2. Implementasi Pola *Nyeraki* dalam Perkebunan

Bali termasuk salah satu pulau kecil dan memiliki lahan pertanian terbentang dari barat ke timur dan dari selatan ke utara dengan beberapa ragam corak dan topografi. Bali Selatan memiliki ciri lahan pertanian datar, sedangkan bagian barat, utara dan timur relatif dominan memiliki tekstur lahan bergelombang dan pengunungan serta hampir semua wilayah memiliki pantai. Hanya Kabupaten Bangli, satu-satunya tidak memiliki pantai karena berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh 4 (empat) kabupaten, yakni Kabupaten Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng.

Sembilan kabupaten/kota di Bali tersebut dapat dilambangkan atau diidentikkan sebagai sebuah tempat, yakni *ceraki*. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan keunggulan di bidang budidaya perkebunan dengan kekhasan tertentu. Fakta menunjukkan bahwa Kabupaten Karangasem

sangat unggul dan terkenal dengan budidaya perkebunan salak. Budidaya salak telah menjadi *trademark* Karangasem, sehingga setiap pembeli salak di Bali selalu bertanya, apakah ini salak Bali dari Karangasem? Salak Karangasem telah mendunia karena memiliki kekhasan dalam cita rasa tersendiri. Kekhasan cita rasa itu, dapat dibudidayakan di tempat lain. Walaupun kekhasan cita rasa salak sedikit mengalami perubahan, sehingga tidak persis sama dengan salak asli Karangasem, tetapi patut dikembangkan di wilayah lain, agar produksi salak terjamin kontinuitas sehingga selalu tersedia di pasar. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membuat budidaya salak tidak panen raya secara bersamaan, sehingga menghancurkan harga jual. Dibutuhkan teknologi atau paling tidak saat panen raya, dibutuhkan pengolahan hasil panen raya menjadi berbagai jenis komoditi bernilai ekonomi dan tidak cepat rusak.

Kendatipun dapat dikembangkan di wilayah lain, tetapi ikon Kabupaten Karangasem sebagai sentra perkebunan salak bernilai ekonomis tinggi jangan sampai hilang. Kabupaten lain dapat saja membudidayakan perkebunan salak sebagai pendukung, tetapi tetap dikelola dengan berorientasi ekonomi produktif dan kreatif, terutama untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Kesalahan dalam melakukan terobosan di bidang perkebunan, telah cukup banyak merugikan petani. Tatkala petani Bali dianjurkan membudidayakan jahe gajah dan kapulogo dengan iming-iming bahwa permintaan komoditi tersebut sangat tinggi di luar negeri, ternyata setelah berproduksi, tidak ada kejelasan pasar, bahkan tidak ada permintaan sama sekali. Berbagai alasan dikemukakan oleh calon pembeli, seperti kualitas dinilai masih rendah. Petani telah mengalami kerugian cukup besar. Ini akibat dari konsep latah, *milu-milu tuwung lan briuk siu*, yakni melakukan sesuatu tanpa berdasarkan kajian empirik, terutama cocok atau tidak karakteristik tanah dengan tanaman jahe gajah maupun kapulogo tersebut.

Di Kabupaten Karangasem perkebunan salak telah menjadi ikon. Kabupaten Buleleng sesungguhnya telah memiliki ikon di bidang perkebunan lain. Budidaya perkebunan bernilai

ekonomis karena telah terbukti diterima pasar adalah anggur (Buleleng Barat), jeruk, mangga dan rambutan, terutama di wilayah Buleleng Timur. Kendatipun budidaya lain masih bisa dikembangkan di wilayah timur, namun kurang memiliki nilai ekonomis. Komoditas seperti jeruk, mangga dan rambutan telah terbukti unggul di wilayah timur dan dapat saja dibudidayakan di wilayah barat, maupun di kabupaten lain, tetapi kurang memiliki keunggulan kompetitif dan ekonomi sehingga dengan mengadopsi pola atau sistem *nyeraki*, tidak masalah dibudidayakan di tempat lain, asalkan kualitas dan cita rasa dijaga, sehingga tidak merusak kualitas dan cita rasa komoditi yang telah mendapatkan pengakuan pasar dan itu akan mendukung kontinuitas produksi dalam kondisi Bali dengan keterbatasan lahan.

Prinsip utama adalah pembudidayaan komoditi unggulan di daerah tertentu dan telah diterima pasar. Jangan dipaksakan untuk dikembangkan di daerah lain, bila tidak memungkinkan karena akan membawa implikasi kurang menguntungkan, terutama dari aspek pasar. Konsep latah atau dalam tradisi Bali disebut sebagai *milu-milu tuwung lan briuk siu* (berbuat sesuatu tanpa berdasarkan kajian dan pertimbangan) dapat merusak kualitas dan citra komoditi sehingga memperburuk nilai jual di pasar. Tanda-tanda pasar semakin terpuruk adalah persaingan tidak sehat, sehingga harga komoditi tersebut sangat rendah dan di bawah biaya produksi.

Kasus seperti ini, sudah terlalu sering dihadapi oleh petani, seperti pembudidayaan buah naga. Ketika tahun 2003 buah naga baru masuk ke pasar lokal, harganya sangat tinggi dan menjanjikan secara ekonomi. Harga rata-rata waktu itu per kilogram mencapai Rp 60.000 dengan isi per kilogram sebanyak dua (2) buah. Buah naga kala itu memiliki kelas tersendiri dan bahkan dapat dikatakan terhormat karena menjadi konsumsi orang-orang tertentu saja, petanipun merespons budidaya buah naga secara progresif. Implikasinya, dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 2008 produksi buah naga sudah melimpah, sehingga harga per kilogram tidak lebih dari Rp 15.000. Bahkan saat panen raya harganya rata-rata Rp 5.000, per biji serta tidak lagi menjadi

barang berkelas di beberapa pasar swalayan, tetapi sudah dijual di jalan-jalan oleh pedagang kecil, seperti melon, semangka, dan buah-buahan lain.

Kondisi sejenis, pernah terjadi pada budidaya cabai. Ketika cabai di pasar mencapai harga tertinggi, para petani berlomba-lomba menanam cabai dan memberangus budidaya lain. Dalam hitungan bulan panen raya telah tiba, harga cabai sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi dan petani tidak memanen cabai mereka karena takut mengalami kerugian lebih besar sehingga tanaman cabai mati semua. Begitu pula di sebuah desa di kawasan Bali Barat, ketika tahun 70-an harga cengkeh sangat tinggi, petani di desa tersebut secara serentak mengganti budidaya tanaman kopi menjadi cengkeh. Pada saat panen raya cengkeh, justru harga kopi yang melambung tinggi dan petani merasakan kegelisahan. Oleh karena, panen cengkeh tidak setiap tahun, seperti panen kopi. Produksi cengkeh bagus, kalau mendapatkan panas yang cukup dan jika musim hujan relatif panjang, pohon cengkeh menjadi subur dan hanya daun yang lebat sehingga kurang berbunga. Pun kalau petani cengkeh menerima panen raya, belum tentu mendapatkan nilai tinggi, sebab pola pemetikan cengkeh lebih rumit, dibandingkan dengan kopi dan membutuhkan tenaga handal dan cakap dengan ongkos relatif mahal, sehingga kalau harga cengkeh murah, petani membiarkan bunga cengkeh mereka tidak dipetik. Fakta semacam ini, tidak hanya sekali atau dua kali melanda petani, tetapi lebih dari itu. Jadi, bila latah dapat menjadi bumerang bagi petani, seperti petani buah naga, cengkeh dan lain-lain.

Di wilayah Kabupaten Buleleng Bagian Barat dengan dominasi perkebunan, utama di dataran tinggi seperti, kopi, kakao dan cengkeh telah menjadi sumber pendapatan petani. Petani di wilayah ini, harus hati-hati dan cerdas bila ikut membudidayakan perkebunan anggur, buluan, jeruk atau mangga. Dipaksakan mungkin saja bisa tumbuh, tetapi komoditi yang dihasilkan tidak memiliki cita rasa sebagaimana dengan jeruk atau mangga di wilayah timur, sehingga kurang bernilai ekonomi. Di samping tidak memiliki cita rasa khas atau berkarakter tertentu, komoditi

yang dihasilkan petani akan mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan nasib beberapa contoh komoditi seperti telah disebutkan di atas. Harga menjadi sangat murah dan posisi tawar petani lemah karena terjadi kelebihan produksi.

Kondisi itu berlaku juga pada tanaman perkebunan kelapa. Secara faktual perkebunan kelapa sangat cocok dibudidayakan di Bali Bagian Barat atau wilayah pantai, seperti di Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana telah menjadi penghasil kelapa terbesar di Bali. Oleh karena itu, suatu gagasan besar pemerintah sejak tahun 2003 menjadikan Kabupaten Jembrana sebagai pusat penelitian dan pengembangan kelapa di Bali sungguh sangat tepat sebagai perwujudan dari implementasi pola atau sistem *nyeraki* dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Bali. Mengapa? Oleh karena kebutuhan kelapa bagi masyarakat Bali selalu terpenuhi. Bahkan saat ini, kelapa di Kabupaten Jembrana masih mampu memenuhi permintaan kelapa dari luar Bali, khusus Jawa Timur dan sekitarnya.

Begitu pula dengan pembudidayaan tanaman kopi di Kabupaten Bangli atau beberapa daerah pengunungan di Bali. Tentu sangat strategis dan sekaligus memiliki makna ekonomis, bila dikembangkan dengan pola terfokus dan sungguh-sungguh dengan tetap mengedepankan citra dan kualitas. Kabupaten Bangli sebagai daerah dengan karakteristik khas, suhu udara sejuk, pembudidayaan tanaman kopi dapat menjadi skala prioritas dan didesain menjadi produk unggulan. Begitu pula di wilayah lain dengan karakteristik relatif sama, dapat dikembangkan tanaman kopi, seperti di Badung Utara dan daerah pegunungan lain di Bali. Pembudidayaan dengan fokus dan pada lokasi yang tepat akan menjamin kontinuitas produksi, apalagi didiversifikasikan dengan jenis kopi lain, tentu pola itu sejalan dengan sistem *nyeraki*. Namun di wilayah lain yang kurang pas pembudidayaan kopi dapat dikembangkan budidaya lain, sehingga berbagai macam komoditi dapat dihasilkan di Bali dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Sebagaimana pembangunan pariwisata, pola atau sistem *nyeraki* telah nyata terimplementasi di Bali. Wilayah Bali

selatan telah dibangun secara terfokus dan terpusat berbagai infrastruktur pariwisata, sehingga terjadi pergeseran alih fungsi lahan pertanian secara signifikan. Jika pembangunan pariwisata dilakukan dengan cara sama di wilayah lain, akan menerima risiko sangat besar, terutama alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian akan sulit dihindari dan bersamaan dengan itu pula, terganggu secara sistemik kualitas kehidupan masyarakat karena daya dukung (*carrying capacity*) Bali semakin terbatas dan sesak. Bahkan beban paling sulit adalah merubah paradigma berfikir masyarakat Bali dari budaya pertanian menjadi budaya industri dan dalam realitas tidak semudah membalikkan telapak tangan sebagaimana telah dialami oleh masyarakat di bagian selatan Bali.

Pembangunan industri pariwisata boleh saja dikembangkan di wilayah lain, tetapi didasarkan atas analisis kelayakan dan kepatutan. Bila di wilayah lain hanya layak dan patut dikembangkan industri pariwisata sebatas sebagai penunjang, jangan dipaksakan menjadi industri pariwisata unggulan. Apalagi infrastruktur tidak menunjang keberadaan industri tersebut. Kembangkan saja industri lain, seperti industri kerajinan tangan, industri olahan hasil pertanian atau sejenis, sehingga Bali benar-benar menjadi pulau dengan menyediakan berbagai variatif produk, sehingga dapat kita deklarasikan sebagai pulau *one stop shopping* sebagaimana sistem *nyeraki* dalam perdagangan tradisional. Pembangunan di bidang perkebunan mengadopsi spirit *nyeraki*, dapat memberikan manfaat ganda (*multiflier effect*) terhadap Pulau Bali dengan luas kecil dan terbatas. Manfaat ganda tersebut adalah pengembangan dan pengelolaan produk hasil perkebunan menjadi bermacam-macam produk olahan atau komoditi bernilai ekonomis berada dalam satu kawasan. Istilah dalam dunia industri, yakni mendekatkan hulu dengan hilir. Industri pengolahan produk hasil pertanian dapat dikelola secara efektif dan efisien karena berada pada kawasan yang sama dengan bahan baku, sehingga komoditas itu, tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi memiliki keunggulan daya saing karena diproduksi dengan biaya lebih rendah. Begitu

pula dengan kabupaten lain. Mereka dapat membudidayakan komoditi perkebunan sesuai dengan potensi unggulan wilayah, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jangan latah, apalagi memaksa pengembangan komoditas unggulan yang telah menjadi ikon wilayah lain, tanpa mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan, terutama dari aspek ekonomi. Kegagalan secara total dapat sewaktu-waktu mengancam karena produksi berlimpah ruah dan homogen, terutama ketika musim panen. Sebagaimana ekonomi Bali kekinian didominasi sektor tersier dengan motor penggerak industri pariwisata yang sangat rentan. Sekecil apapun isu negatif tentang Bali, ekonomi mengalami tekanan, seperti penyakit kolera, apalagi tragedi bom yang sempat memporak-porandakan ekonomi Bali dalam rentang waktu tertentu.

3. Implementasi Pola *Nyeraki* dalam Tanaman Pangan

Masyarakat Bali patut bersyukur bahwa pulau ini memiliki tingkat kesuburan lahan cukup tinggi. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua jenis tanaman dapat tumbuh di Bali. Namun demikian, masih dibutuhkan pengelolaan, agar dapat memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat Bali secara terus-menerus. Pengelolaan menjadi kata kunci dalam mengoptimalkan sumber daya alam Bali untuk lebih terencana dan terarah pemanfaatannya. Oleh karena itu, implementasi sistem *nyeraki* dalam keterbatasan sumber daya alam, masih relevan di era kesejagatan ini, seperti pada pembangunan subsektor tanaman pangan.

Sekilas telah digambarkan implementasi sistem *nyeraki* dalam perkebunan. Di ranah tanaman pangan konsep tersebut, dapat pula diaktualisasikan dalam kondisi lahan persawahan Bali yang semakin menyempit. Hanya saja persoalan kapasitas sumber air dan ketersediaan air terus berkurang, sehingga tidak semua lahan dapat ditanami padi dan tanaman pangan sejenis secara reguler seperti dahulu, ketika kapasitas air masih tersedia dengan sangat memadai. Di samping persoalan air, hampir semua jenis tanaman pangan yang tumbuh di dataran rendah

atau hilir Pulau Bali, mengalami masalah di bidang ketersediaan air. Telah banyak saluran irigasi tidak fungsional akibat berbagai pembangunan dan memotong saluran irigasi sehingga lahan di hilir tidak mendapatkan air cukup. Implikasi dari keterbatasan air tersebut, banyak lahan tidur alias disfungsi. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat petani di hilir menjual lahan pertanian mereka karena disfungsi. Pemilik lahan tidur merasa terbebani oleh berbagai tekanan. Mereka memiliki kekuatan, tetapi tidak memiliki kemampuan, terutama memenuhi kewajiban dalam membayar peningkatan beban pajak, sejalan dengan perubahan status lahan.

Memperhatikan kondisi objektif tersebut di atas, strategi pembangunan pertanian bidang tanaman pangan di Bali adalah mengidentifikasi dan melakukan kajian terhadap berbagai faktor penghambat dan penyebab dari keberadaan lahan tidur. Kajian dapat dilakukan dengan berbagai cara maupun metode, termasuk mengimplementasikan kearifan lokal agar keterbatasan lahan dan infrastruktur tidak berarti melemahkan semangat untuk membangun di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Peradaban air jangan dibiarkan dirusak oleh peradaban jalan raya. Boleh saja membangun jalan raya sebagai infrastruktur utama untuk mendorong lalu lintas barang dan jasa, termasuk komoditas tanaman pangan, tetapi sistem irigasi air jangan dilenyapkan dan wajib dipelihara sebagai infrastruktur strategis bagi tanaman pangan di hilir.

Melihat potensi dan sumber air sebagai modal dasar dan utama dalam pembudidayaan tanaman pangan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, masih terdapat harapan besar untuk mengimplementasikan sistem *nyeraki*, terutama tanaman padi di Kabupaten Tabanan dan wilayah lain yang memiliki ketersediaan kecukupan air. Sistem *nyeraki* dapat menghidupkan kembali julukan dan *taksu* Kabupaten Tabanan sebagai lumbung beras di Bali. Kendatipun kabupaten lain, masih memungkinkan untuk dikembangkan atau dibudidayakan tanaman pangan, termasuk padi, namun ikon sebagai lumbung beras Bali tetap Kabupaten Tabanan, apalagi saat ini masih didukung sistem

irigasi air yang lebih baik. Kendatipun demikian, mengadopsi sistem *nyeraki*, kabupaten lain masih dapat menjadi penyangga atau pendamping, sehingga kebutuhan pangan di Bali masih dapat dipenuhi dengan kekuatan sendiri, walaupun tatkala orang menyebut tanataman pangan, terutama padi sudah langsung teringat Kabupaten Tabanan.

Masih memungkinkan tanataman pangan lain dibudidayakan di Bali, seperti jagung. Mengapa Gorontalo bisa disebut sebagai provinsi jagung? Inilah perlunya identitas sebagai sebuah pencitraan, termasuk di seluruh kabupaten/kota di Bali. Apabila pembudidayaan tanaman jagung dapat dikembangkan secara tersistem dan terukur di Kabupaten Karangasem dan di kabupaten lain, tentu pada suatu ketika akan tercipta Bali pulau jagung dan tidak hanya sebagai pulau kelapa, padi, salak, mangga, anggur dan lain-lain.

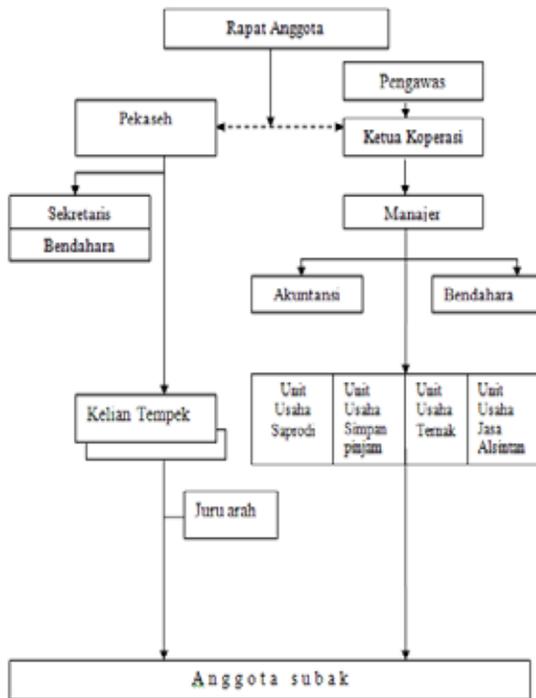
Tidak berhenti disitu saja, apabila diadopsi sistem *nyeraki* dalam upaya pemenuhan permintaan masyarakat Bali terhadap berbagai ragam komoditi pertanian yang cenderung meningkat. Tanaman pangan lain, seperti kacang tanah masih berpeluang menjadi produk unggulan Bali. Di daerah kering, seperti di Bukit Pecatu di Kabupaten Badung dan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung serta di beberapa wilayah dengan struktur tanah sejenis dapat dibudidayakan kacang tanah dengan kualitas dan cita rasa khas. Komoditi kacang tanah dari Bukit Pecatu sangat terkenal karena gurih, manis dan memiliki cita rasa khas. Jadi, itu kita serahkan kepada masyarakat dan pemerintah. Mereka sesungguhnya paling mengetahui dan memahami tentang tanaman apa harus mereka budidayakan untuk mendatangkan hasil dan bernilai ekonomi serta menjadikan Bali berswasembada dalam beragam komoditi unggulan. Petani di Bali yang mengelola lahan sawah merupakan anggota subak ssebagai suatu organisasi tradisional yang telah terbentuk dan bertumbuhkembang hingga saat ini sejak lebih dari 1.000 tahun lalu.

A. Subak

Subak sebagai sistem irigasi tradisional dapat menjadi wahana dalam penerapan sistem *nyeraki*. Para petani yang tergabung dalam subak memiliki modal sosial (*mutual trust*, *social norms*, dan *networking*) yang kuat di dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomisnya (Sedana, *et al.* 2014). Nilai-nilai budaya subak yang berfilosof *Tri Hita Karana* menjadi dasar yang hakiki dalam pelaksanaan kegiatan di bidang irigasi dan pertanian serta upacara keagamaan karena mengandung prinsip harmoni dan berdasarkan pada konsensus atau kesepakatan di antara para petani dan juga pengurus subak (Roth dan Sedana, 2015). Pertanian tanaman pangan yaitu padi dan palawija di Bali sangat tergantung dengan eksistensi subak yang mengatur pengelolaan irigasi di lahan sawah. Sistem *nyeraki* yang berkembang adalah dalam penyediaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh, dan sejenisnya) dan alat serta mesin-mesin pertanian.

Salah bentuk yang telah berjalan dengan sistem *nyeraki* adalah terbentuknya koperasi-koperasi subak di beberapa kabupaten seperti di Tabanan (Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu), di Badung (Koperasi Subak Sengempel). Koperasi yang terbentuk meskipun memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan formal, masih tetap menggunakan awig-awig subak menjadi payung hukumnya, terutama yang menyangkut dengan pengelolaan air (terkait dengan kebutuhan sarana produksi pertanian) dan aturan-aturan lainnya. Pada Subak Guama, kebutuhan berbagai sarana produksi telah tersedia melalui toko kecil yang dikelola oleh koperasi subak. Pengelolaan koperasi subak dilakukan oleh seorang manajer yang dibantu oleh pengurus lainnya termasuk bagian-bagian layanan kredit seperti terlihat pada Gambar 4.

Bagan 01
Struktur organisasi koperasi Subak Guama



Sumber: Sedana, 2013

Sistem *nyeraki* terlihat dari kegiatan layanan usaha Saprodi yang dilakukan oleh koperasi subak. Para petani tidak perlu ke tempat lain untuk membeli kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan pertanian, khususnya tanaman pangan (padi dan palawija). Selain itu, kebutuhan lainnya seperti kredit juga dapat diperoleh oleh para petani di koperasi subak. Oleh karena itu, petani sangat dimudahkan untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan pada satu tempat, yaitu di toko koperasi subak.

Kearifan lokal yang terdapat dalam subak menjadi kekuatan di dalam menjalankan kegiatan ekonomis dengan sistem *nyeraki*. Sedana (2013) menyebutkan bahwa beberapa faktor kekuatan dalam subak adalah sebagai berikut: (i) ikatan antar petani anggota subak; (ii) ikatan antara petani sebagai

anggota subak dengan pengurusnya; (iii) *awig-awig* subak; (iv) nilai religius di subak. Ikatan antarpetani yang kuat di dalam penyelenggaraan aktivitas pertanian, irigasi, ritual, dan juga ekonomis. Ikatan dalam kegiatan pertanian ditunjukkan dengan adanya interaksi di antara para petani yang diawali dari menjelang musim tanam padi sampai dengan panen dan kemudian musim tanam berikutnya, baik padi maupun palawija. Interaksi sosial yang dilakukan mereka adalah berkenaan dengan pemilihan jenis atau varietas tanaman padi yang akan diusahakan; persiapan-persiapan pengolahan lahan dan persemaian, jadwal dan pola tanam dan pengendalian hama dan penyakit. Ikatan antara petani melalui kegiatan interaksi secara formal dilakukan pada *sangkepan* dan *paruman* subak. *Paruman* dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan yang akan dibahas dan bahkan melibatkan pihak luar, seperti dari BPTP dan Dinas Pertanian baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Pada kegiatan pertanian ini, ikatan di antara para petani di kedua subak terjadi dalam suatu bentuk proses berinteraksi yang telah biasa dilakukan sebagai anggota masyarakat baik di *banjar* maupun di desa untuk kegiatan di luar sektor pertanian. Kuatnya ikatan dalam proses interaksi sosial ini merupakan salah satu indikasi bahwa terdapat rasa saling percaya di antara para petani anggota subak. Ini berarti bahwa dengan adanya ikatan antar anggota yang kuat dan didasari oleh saling percaya dapat menumbuhkan kegiatan kolektif yang semakin kuat di dalam subak. Misalnya dalam upaya untuk bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah yang berkenaan dengan akses informasi, kredit termasuk penyediaan sarana produksi pertanian dan lain sebagainya. Temuan ini juga secara kualitatif ditemukan oleh Woolcock dan Narayan (2000) dimana ikatan yang kuat antar anggota dalam suatu kelompok (misalnya subak) membangkitkan adanya kegiatan kolektif sebagai hasil dari dinamisasi sosial kapital di dalam suatu kelompok masyarakat.

Ikatan antar petani dalam aspek irigasi sangat nyata ditunjukkan dengan adanya kegiatan gotong-royong untuk membersihkan saluran irigasi sebelum memulai penanaman

di kedua subak. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama baik di tingkat tempek maupun subak. Bahkan saat diperlukan, para petani harus berkontribusi material atau uang tunai untuk perbaikan-perbaikan saluran dan bangunan irigasi di wilayah subaknya. Pada kegiatan irigasi ini juga dilakukan adanya sistem saling meminjam air terutama pada saat musim kemarau. Pemberian pinjaman air kepada petani yang lain menunjukkan adanya saling ketergantungan di antara mereka dan saling percaya bahwa pada saat tertentu petani peminjam akan memberikan pinjaman airnya juga kepada petani lainnya. Saling meminjam air irigasi ini juga merupakan salah satu bagian dari pegejawantahan konsep *paras paros sarpanaya salunglung sabayantaka*. Pengaturan pengelolaan air (distribusi dan alokasi) juga didasarkan pada kesepakatan antarpetani melalui suatu musyawarah dalam rapat subak. Keteraturan dan harmonisasi pengelolaan air irigasi di Subak Guama turut memberikan dukungan terhadap pengembangan agribisnis padi yang dijalankan melalui KUAT Subak Guama.

Ikatan antarpetani yang menonjol pada Subak Guama adalah saat diselenggarakan kegiatan ritual di tingkat subak. Beberapa upacara keagamaan di tingkat subak adalah *magpag toya* yang diadakan pada setiap bulan Oktober di Pura Ulun Empelan, dan juga di Pura Bedugul. Pada kegiatan ritual ini, ikatan antarpetani juga disertai dengan adanya ikatan antar istri petani yang dimulai dari persiapan-persiapan penyelenggaraan upacara ritual sampai dengan selesainya kegiatan upacara di pura subak.

Ikatan antara petani dengan pengurus subak yang dimaksudkan adalah adanya interaksi sosial antara para petani baik sebagai anggota subak maupun koperasi dengan pengurus subak dan koperasinya juga. Terdapat ikatan yang kuat antara petani dengan pengurus subak dan koperasi yang ditunjukkan oleh adanya kegiatan-kegiatan pertanian, irigasi dan religius serta ekonomis yang dikoordinasikan oleh para pengurus dan dapat dijalankan secara baik. Pada kegiatan pertanian seperti penggunaan varietas padi yang akan diusahakan oleh para petani selalu dipatuhi setelah diputuskan melalui rapat subak

yang dipimpin oleh pengurus subak dan didampingi oleh PPL. Demikian juga halnya pada kegiatan irigasi, koordinasi dilakukan oleh pengurus subak baik di tingkat subak maupun di tingkat tempek. Informasi yang disampaikan oleh pengurus kepada para petani dapat dilakukan secara berjenjang dan secara langsung. Pada tingkat subak, informasi yang berjenjang biasanya dilakukan oleh pengurus di tingkat subak melalui pengurus di tingkat tempek.

Pada kegiatan ritual, terdapat ikatan yang kuat antara petani dengan pengurus seperti halnya ikatan yang terjadi antar petani. Pengurus bersama-sama dengan *pemangku* mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan keagamaan mulai dari persiapan sampai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan ritual di tingkat subak. Ikatan antara petani dengan pengurus subak pada kegiatan ritual ini lebih didasarkan pada nilai-nilai spiritual yang telah melekat sebagai umat yang beragama Hindu. Salah satu indikasi yang terlihat pada Subak Guama adalah para petani sejak awal dilibatkan dalam penentuan anggaran biaya untuk upacara keagamaan, rencana pelaksanaan ritual, dan lain sebagainya. Ikatan antara petani dengan pengurus koperasi juga terlihat kuat terutama dalam penyediaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida) dan ternak dan layanan ekonomis lainnya dari koperasi. Para petani diberikan bimbingan oleh pengurus koperasi dalam pengisian RDKK saat menyusun amprahan kredit usahatani untuk tanaman padinya. Pada kegiatan ini, para petani dan pengurus subak juga didampingi oleh PPL. Hubungan baik antara para petani dengan pengurus koperasi juga terlihat pada saat adanya pembagian sisa hasil usaha koperasi setiap tahun setelah disetujuinya Rapat Anggota Tahunan koperasi. Pengurus koperasi dan pengurus subak hanya menyampaikan laporannya secara periodik kepada seluruh anggotanya dalam setiap sangkepan subak.

Ikatan-ikatan di antara petani dan juga dengan pengurus subak maupun koperasi dilandasi oleh adanya rasa saling percaya (*mutual trust*). *Trust* tersebut dipandang sebagai rasa saling mempercayai antar individu dan juga antarkelompok di dalam

suatu masyarakat seperti subak dan koperasi yang dibangun oleh norma-norma yang terdapat di dalamnya (Woolcock, 1998).

B. *Awig-awig*

Awig-awig merupakan suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali, seperti subak yang dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan yang hidup dalam masyarakatnya dan diberlakukan sebagai pedoman bertingkah laku untuk menciptakan keharmonisan. *Awig-awig* ini sebenarnya merupakan anggaran dasar subak dan sebagai anggaran rumah tangganya adalah berupa *perarem*. Pada kedua subak, *awig-awig*-nya telah dicatatkan pada Kantor Pengadilan Negeri Tabanan sebagai bagian dari pengakuan status badan hukum oleh pemerintah. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 tahun 1992 disebutkan bahwa apabila anggaran dasar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau subak telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri setempat maka P3A tersebut telah memiliki status berbadan hukum.

Adanya *awig-awig* ini yang juga merupakan norma-norma subak menjadi salah satu faktor yang sangat kuat bagi petani termasuk pengurus subak untuk bertingkah laku dalam berinteraksi pada kedua subak karena di dalamnya telah dituangkan juga berbagai sanksi bagi para pelanggarnya. Secara garis besar, *awig-awig* Subak Guama dan Subak Selanbawak memuat beberapa ketentuan di antaranya adalah distribusi dan alokasi air irigasi, pola dan jadwal tanam, hak dan kewajiban anggota dan pengurus, pengelolaan keuangan termasuk usaha-usaha ekonomis, keanggotaan, kepengurusan dan juga sanksi-sanksi.

Ikatan di antara sesama petani dan juga antara petani dengan pengurus subak seperti yang telah disebutkan di atas juga didasarkan pada aturan-aturan yang telah mereka sepakati dan tuangkan di dalam *awig-awig*-nya. Salah satu contohnya adalah pembagian air dan alokasi air irigasi untuk masing-masing tempek dan masing-masing petani sudah diatur sedemikian rupa

dan telah diterima oleh seluruh petani. Ukuran-ukuran yang digunakan untuk alokasi air tidak semata-mata didasarkan pada aspek teknis, tetapi juga aspek sosial yang berkenaan dengan sistem *ayahan*.

Dalam kaitannya dengan alokasi air ini, rasa saling percaya di antara petani sangat terlihat karena ada petani yang memperoleh alokasi air yang lebih besar dibandingkan dengan petani lainnya yang luas lahan sawahnya lebih besar. Hal ini disebabkan karena pembagian airnya tidak sepenuhnya didasarkan pada perhitungan teknis tetapi juga pertimbangan social atau dikenal dengan sistem *ayahan*. Tidak ada rasa iri yang ditunjukkan oleh petani yang memperoleh alokasi air lebih kecil kepada petani lainnya yang memperoleh air lebih besar. Aturan yang ditetapkan pada kedua subak adalah didasarkan pada hak dan kewajiban. Artinya bahwa petani yang memperoleh hak atas air lebih besar maka kewajiban *ayahan*-nya juga lebih besar.

Di Subak Guama misalnya, *awig-awig* Subak Guama telah menjadi pedoman bagi para petani untuk menanam varietas padi, yaitu IR 64 pada penanaman musim hujan 2009 sesuai dengan kesepakatannya. Selain itu, para petani selalu melakukan kewajibannya untuk melunasi kredit atau pinjaman guna menghindari sanksi yang telah ditetapkan di dalam *awig-awig* subak. Sanksi moral pada *awig-awig* Subak Guama juga sangat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan di subak sehingga tetap terjalin pola interaksi antar petani yang harmoni. Kekuatan *awig-awig* di Subak Guama telah mampu menjadi pedoman bagi anggota subak dan pengurusnya di dalam membentuk koperasi untuk menyelenggarakan kegiatan agribisnis. Kuatnya sanksi yang dirasakan menyebabkan tidak pernah ditemukan adanya petani yang melanggarnya.

Adanya norma sosial atau aturan-aturan di dalam kedua subak dan koperasi telah menjadikan pedoman bagi anggotanya untuk menghindari perilaku yang menyimpang dari kebiasaan pola tingkah laku mereka. Norma sosial, yaitu *awig-awig* dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi menjadi salah satu unsur modal sosial yang signifikan dan tetap merangsang

keberlangsungan kohesifitas sosial yang hidup (Supriono, dkk., 2010).

Salah satu ciri yang menonjol pada subak dibandingkan dengan organisasi organisasi pengelola air irigasi di luar Bali adalah adanya nilai-nilai religius Hindu yang tinggi. Nilai religius di Subak Guama ditunjukkan adanya kegiatan ritual pada seluruh rangkaian kegiatan pertanian dan irigasi di tingkat subak. Pada awal musim tanam, misalnya, subak melakukan kegiatan ritual penjemputan air dengan harapan air yang dimanfaatkan untuk usahatani tersedia secara cukup dan memberikan manfaat dalam peningkatan produktivitas lahan dan tanaman. Nilai-nilai religius lainnya yang sering ditunjukkan pada Subak Guama adalah adanya persembahan atau sesajen/*banten* pada saat memulai acara rapat-rapat subak. Sangat banyak ditemukan nilai-nilai religius di tingkat subak, di antaranya adalah menghaturkan sesajen saat persemaian, pengolahan tanah, pananaman, umur padi berumur 42 hari sampai pada panen, seperti telah disebutkan di atas.

Nilai-nilai religius yang ditemukan di subak adalah adanya rasa bersyukur kepada Tuhan yang Mahaesa atas ketersediaan air dan hasil panen yang baik, nilai-nilai *yadnya* di dalam setiap beraktivitas yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan ekonomis. Bagi Subak Guama, nilai religius yang ditunjukkan adalah bagian dari perwujudan filosofi subak yaitu *tri hita karana* untuk menjaga keharmonisan melalui hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama petani dan hubungannya dengan alam. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ritual subak memberikan indikasi bahwa para petani di Subak Guama sangat "berserah" kepada Tuhan yang Mahaesa di dalam pengelolaan usahatannya.

Bahkan dalam penerapan aturan-aturan di persubakan, nilai religius ini juga digunakan sebagai pedoman bagi para petani, seperti melakukan sumpah di Pura Subak. Dengan adanya aturan ini, para petani di Subak Guama sangat menghindari terjadinya pelanggaran yang bermuara ke Pura Subak untuk persumpahan. Ini berarti bahwa nilai religius menjadikan awig-awig subak kekuatan spiritual yang tidak berani untuk dilanggar

oleh setiap petani termasuk pengurus subak.

Nilai lainnya yang sangat menonjol adalah *karmapala*, dimana nilai ini menjadi pegangan yang sangat bagi petani di dalam aktivitas antar petani dan juga dengan pengurus subak maupun koperasi karena merupakan salah satu komponen *Panca Srada*. Adanya nilai karma pala, para petani anggota merasa takut untuk berbuat yang kurang baik terhadap sesamanya, seperti merugikan, membohongi, membahayakan dan hal-hal yang buruk lainnya.

Dalam hubungannya dengan pengembangan agribisnis, nilai religius yang telah ada menjadi suatu kekuatan bagi subak di dalam membentuk koperasinya karena didasarkan pada nilai-nilai yang telah terinternalisasi dan diyakini sangat kuat oleh seluruh anggota dan pengurus subak. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di KUAT Subak Guama juga selalu dilandasi oleh nilai-nilai religius Hindu yang terlihat dari dimasukkannya tri hita karena pada *awig-awig* subaknya.

Ikatan-ikatan yang kuat di antara petani anggota subak, ikatan antara petani anggota dengan pengurus subak, kuatnya *awig-awig* subak serta adanya nilai religius di dalam subak menjadi suatu "lem" yang mengikat para petani untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama guna mencapai tujuan baik secara pribadi maupun bersama-sama melalui lembaga subaknya. Ikatan-ikatan yang ditunjukkan melalui interaksi sosial yang didasarkan pada norma-norma pada *awig-awig* subak serta adanya rasa saling percaya merupakan bagian atau komponen modal sosial yang terdapat di dalam subak. Fukuyama (1995) secara eksplisit menyimpulkan bahwa *trust* mendorong orang-orang dapat bekerjasama secara lebih efektif karena terdapat kesediaan di antara mereka untuk menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu.

4. Implementasi Pola *Nyeraki* dalam Peternakan

Tidak berbeda dengan diuraikan pada implementasi pola atau sistem *nyeraki* dalam perkebunan dan tanaman pangan, dalam pembudidayaan peternakan sistem *nyeraki* dapat

diwujudkannyatakan. Di Bali beberapa ternak bernilai ekonomis dapat berkembang biak dengan baik, seperti kerbau, babi, sapi, kambing dan beberapa kelompok unggas, seperti ayam, angsa, kuwir dan bebek. Pembudidayaan kerbau telah sejalan dengan spirit sistem *nyeraki* yang mengacu pada potensi dan kekuatan lokal. Secara faktual kapan saja masyarakat Bali membutuhkan kerbau telah siap dan Kabupaten Jembrana mampu memenuhi. Artinya, jika kita ingin mendapatkan kerbau di Bali, pikiran tercurah dan tertuju pada Kabupaten Jembrana. Bahkan tidak salah, jika Kabupaten Jembrana disebut sebagai kabupaten kerbau. Oleh karena kerbau di wilayah ini memiliki multifungsi dan tidak hanya sebagai ternak bernilai ekonomi, tetapi telah dimanfaatkan untuk atraksi tradisional, yakni sebuah tradisi yang dikenal dengan sebutan *makepung*.

Masyarakat petani di Kabupaten Jembrana, berpandangan tradisi *makepung* memiliki hakikat tidak semata-mata sebuah perlombaan, perebutan prestise atau gengsi, tetapi sebuah bentuk kegembiraan para petani karena mereka telah selesai dan berhasil dalam bertani. *Makepung* adalah sebuah atraksi budaya yang melombakan sepasang kerbau dalam suatu pacuan dan dibagi dalam dua kelompok atau blok. Kelompok itu, bernama Blok Timur Ijo Gading dan Blok Barat Ijo Gading.

Keberadaan *makepung* ini merupakan sebuah strategi pembangunan pertanian subsektor peternakan yang luar biasa tinggi nilai spiritnya, dilihat dari konsep pembangunan berwawasan pelestarian. Para peternak kerbau di Kabupaten Jembrana merasa terhormat, jika kerbau mereka menjadi pemenang, atau terbaik dalam *makepung* tersebut. Selama atraksi tradisional *makepung* tersebut tetap tumbuh dan bertahan, selama itu pula peternak di Kabupaten Jembrana secara serius meneruskan membudidayakan kerbau sebagai salah satu sumber dan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif serta memiliki nilai prestesius secara sosial. Jadi konsep pembangunan ekonomi Bali berkelanjutan di bidang peternakan sangat pas berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, sebagaimana dengan tradisi *makepung* tersebut.

Ternak kerbau dapat eksis di Kabupaten Jembrana karena disebabkan atau didorong oleh beberapa faktor dan telah mampu memenuhi kebutuhan kerbau, bahkan dikirim ke luar Bali. Di kabupaten lain terdapat pula model yang hampir sama, yakni tradisi *Sapi Grumbungan*. Tradisi ini ada di Kabupaten Buleleng. Kendatipun memiliki tata cara, pola dan warna tidak persis sama dengan tradisi *makepng*, namun semangat yang terkandung dalam tradisi tersebut relatif sama. Tradisi *Sapi Grumbungan* merupakan sebuah perlombaan sapi yang penuh dengan hiasan dan asesoris serta indikator penilaian tidak hanya dilihat dari aspek kemeriahan hiasan maupun estetika, tetapi juga dinilai dari aspek kesehatan sapi, sehingga tradisi ini juga sejalan dengan pembangunan ekonomi Bali berkelanjutan berbasis pelestarian dan budaya Bali.

Kalau demikian realitas tradisi di Bali, patut menjadi pertanyaan adalah mengapa didalam membangun ekonomi Bali belum sepenuh hati mengadopsi spirit kearifan lokal, seperti sistem *nyeraki*, terutama untuk beberapa ternak dan unggas, sehingga saat ini harus mendatangkan dari luar untuk memenuhi kebutuhan Bali? Implementasi sistem *nyeraki* ke dalam pembangunan pertanian Bali akan membantu memenuhi kebutuhan pasar karena komoditi yang dihasilkan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta bervariasi. Kabupaten Buleleng memiliki sebutan di bidang pembangunan peternakan Bali sebagai kabupaten sapi, sebagaimana dengan sebutan kabupaten kerbau untuk Jembrana. Mampukan kabupaten lain dijadikan sebagai kabupaten ayam, kuwir, angsa atau bebek? Terbukti sebagian besar kebutuhan ayam dan bebek masih dipasok dari Jawa.

Masih banyak ternak dan unggas dijadikan sebuah ikon bagi kabupaten lain di Bali. Katakan Kabupaten Tabanan dengan kondisi ketersediaan air yang lebih besar di dibandingkan dengan kabupaten lain. Dapat mengembangkan peternakan bebek sebagai simbol dari kabupaten tersebut. Mengapa? Ketersediaan air dan didukung dengan lahan sawah yang luas menjadi tempat mudah mengembangbiakkan bebek. Bebek dan sejenisnya dapat

tumbuh di air dan itu berarti peternak bebek atau sejenisnya di Kabupaten Tabanan tidak terlalu terbebani dengan biaya pakan unggas dan pembudidayaan unggas ini dapat menjadi tambahan *trademark*. Sehingga Kabupaten Tabanan di samping disebut sebagai lumbung padi dapat pula disebut sebagai lumbung unggas, seperti bebek dan telur bebek di Bali.

Kabupaten Bangli dan Klungkung sangat mungkin dikembangkan menjadi kabupaten penghasil ayam terbesar di Bali. Sebab kondisi geografis mendukung untuk kegiatan ekonomi produktif dan kreatif sejenis itu. Masyarakat didorong untuk menjadi peternak dengan pendekatan pemberdayaan. Masyarakat diberikan fasilitas dan motivasi oleh pemerintah, baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial, sehingga tumbuh kemauan untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif. Pola ini sangat strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan sekaligus membuka kesempatan kerja secara merata, sehingga secara perlahan-lahan masalah sosial semakin menurun dan di satu sisi kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Keunggulan lain atas penerapan sistem *nyeraki* dalam usaha ekonomi produktif dan kreatif bidang peternakan dan perunggasan, begitu pula pada bidang usaha lain adalah terhindar dari *high cost economy*. Oleh karena kegiatan ekonomi berlandaskan pada potensi dan kekuatan lokal cenderung lebih mudah, murah dan lebih produktif. Konsep ini akan menjadikan masing-masing wilayah memiliki produk unggulan dan spesifikasi. Panen raya komoditi sejenis relatif dapat dihindari karena acapkali menjadi kondisi "paradoks" bagi petani. Di satu sisi hasil mereka secara kuantitatif meningkat, namun di lain sisi, harga jual sangat rendah. Bahkan bisa di bawah biaya produksi. Jadi implementasi konsep *nyeraki* dalam pembangunan pertanian dapat menjadi salah satu strategi pengendali kelebihan produksi dan di lain sisi komoditi yang dihasilkan bervariasi karena didukung dengan pola pembangunan diversifikasi dan diferensiasi sehingga harga jual terkontrol karena tidak ada perang harga satu wilayah dengan wilayah lain. Bahkan sangat mungkin sebaliknya yang terjadi, yakni antarwilayah saling mengisi dan menutupi kelemahan

maupun kekurangan. Seperti permintaan kerbau Buleleng dapat dipenuhi oleh Jembrana dan sebaliknya permintaan sapi Jembrana dapat dipenuhi oleh Buleleng dan begitu seterusnya transaksi komoditi lain antar maupun interkabupaten.

5. Implementasi Pola *Nyeraki* dalam Perikanan

Alam telah diciptakan oleh-Nya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hubungan antara manusia dengan alam telah dibangun berdasarkan konsep ketergantungan sepihak. Manusia sangat tergantung dengan alam, sementara alam tidak pernah tergantung pada manusia. Justru dalam realitas kehidupan manusia merusak alam. Kelebihan alam Pulau Bali adalah memiliki wilayah daratan dengan tingkat kesuburan tinggi, sehingga lahan pertanian yang subur itu, menyebabkan manusia bisa hidup dari apa yang dibudidayakan. Di wilayah samudra disediakan lautan beserta isinya dan manusia menjadi dapat hidup dan tergantung dengan lautan.

Sejalan dengan gambaran alam tersebut, dalam pembangunan perikanan sebagai subsektor dari pembangunan pertanian di Bali sangat perlu mempertimbangkan dan mengoptimalkan potensi alam tersebut dengan disertai berbagai pertimbangan strategis. Kendatipun di Bali Selatan sangat cocok untuk dikembangkan budidaya perikanan karena memiliki wilayah laut luas, tetapi karena pilihan telah jatuh pada pengembangan pariwisata, maka dengan mengadopsi sistem *nyeraki* dalam pembangunan berbasis perikanan di Bali selatan, khususnya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar jangan terlalu fokus. Jangan sampai ada pabrik ikan dan pelabuhan ikan besar di Bali Selatan, terutama Badung, Denpasar, dan Gianyar.

Keberadaan pasar dan pelabuhan ikan di wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, sudah patut dan layak dipertimbangkan dari segala aspek. Mungkinkah pasar ikan di Kabupaten Badung digeser ke daerah lain. Begitu pula dengan pelabuhan ikan di Kota Denpasar? Kalau pelabuhan ikan digeser ke kabupaten lain dan di tempat itu dibangun pelabuhan untuk pariwisata, tentu akan dapat menciptakan suatu citra khas dan

spesifik bagi Kota Denpasar, yakni sebagai kota dagang dan pariwisata. Mungkin saja masih tetap eksis berada pelabuhan ikan di Benoa, tetapi aspek kebersihan dan lingkungan harus tetap di jaga, agar tidak merusak ikon Denpasar sebagai kota dagang dan pariwisata.

Begitu pula pasar ikan di Kabupaten Badung. Sebagai sebuah kabupaten yang dominan pendapatan bersumber dari pariwisata adalah sebuah keharusan untuk menyediakan kelengkapan fasilitas dan kenyamanan bagi wisatawan. Keterbatasan *carrying capacity* Kabupaten Badung, memungkinkan dalam jangka waktu tertentu keberadaan pasar ikan dapat menimbulkan berbagai persoalan di masa datang, terutama terhadap pariwisata. Jadi dengan mengadopsi sistem *nyeraki* keberadaan pelabuhan perikanan dan pasar ikan tersebut perlu dicarikan solusi agar pembangunan ekonomi Bali dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dengan tetap menjaga ikon masing-masing wilayah. Apabila keberadaan pasar ikan di Kabupaten Badung merusak lingkungan pariwisata, tentu akan berakibat kurang baik terhadap pembangunan ekonomi produktif dan kreatif di wilayah lain. Diupayakan agar keberadaan satu bidang usaha lain, tidak menodai pengembangan usaha lain, tetapi bersinergi menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi hingga eksistensi pembangunan Bali dapat dipertahankan sepanjang zaman.

6. Implementasi Pola *Nyeraki* dalam Hortikultura

Pembudidayaan hortikultura atau lazim disebut dengan sayur-mayur telah terbukti berkembang dengan baik di wilayah Kabupaten Tabanan. Mungkin kalau diprediksi melampaui 70% kebutuhan sayur-mayur masyarakat Bali, termasuk kebutuhan pariwisata dipenuhi dari Kabupaten Tabanan. Pola semacam ini patut dipertahankan bahkan dibina untuk mendapatkan komoditi pertanian yang lebih berkualitas, sehingga pasar tidak berpaling ke wilayah lain, apalagi sampai ke luar Bali.

Telah banyak komoditi pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali dipasok dari luar Bali. Unggas, telur dan

beberapa komoditas lain secara signifikan dipasok dari luar Bali. Kendatipun data secara pasti tidak disajikan dalam buku ini, namun secara kasat mata beberapa arus komoditi pertanian dari luar, telah masuk di pasar Bali. Oleh karena itu, pantas bersyukur komoditi hortikultura, masih menjadi tuan rumah di pasar lokal Bali. Keberhasilan komoditi hortikultura tersebut, layak dijadikan sebagai soko guru dalam pembudidayaan komoditi pertanian lain. Pulau Bali akan semakin indah, bila dijadikan sebagai pulau produsen untuk masyarakat Bali sendiri dan produsen bagi konsumen di luar Bali. Produktivitas petani Bali sudah dikenal dan menjadi salah satu ikon dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Mengapa tradisi tersebut tidak dipertahankan bahkan ditingkatkan?

Pertanyaan tersebut wajib dijawab dengan mengangkat harkat dan martabat petani. Generasi muda didorong dan difasilitasi oleh pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadi petani yang memiliki kemauan tinggi didasarkan atas spirit lokal, yakni *pageh*, *puguh* dan *jengah*. Itu telah dibuktikan oleh petani Bali dahulu. Mengapa itu tidak dibangun kembali secara bersama-sama.

Komoditi hortikultura telah terbukti menjadi raja di pasar lokal. Mengapa tidak dikembangkan menjadi raja di pasar nasional, seperti dahulu tahun 80-an komoditi jeruk Kabupaten Buleleng pernah menjadi raja di pasar nasional. Begitu pula babi dan sapi sebelum tahun 70-an, telah mendominasi pasar lokal dan nasional, bahkan pasar internasional. Tetapi saat ini telah melakukan impor terhadap daging sapi dengan alasan kualitas daging sapi lokal dibawah daging sapi impor. Benarkah alasan itu ? Kalau benar mengapa tidak ditingkatkan kualitas daging sapi atau daging lainnya. Mungkinkah itu hanya alasan pembenar agar menjadi tergantung kepada kepentingan kapital saja? Jawabnya hanya ada pada masyarakat Bali.

Jika disepakati membangun pertanian Bali dengan mengadopsi sistem *nyeraki*, menjadikan beberapa komoditi yang telah banyak dipasok dari luar Bali, bahkan dari luar negeri dapat diturunkan atau ditiadakan, termasuk buah-

buahan. Pembudidayaan beberapa komoditi pertanian dengan mengadopsi sistem *nyeraki*, tidak hanya semata-mata terpenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek kuantitas saja, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas dan keberagaman. Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk bersikap latah atau ikut-ikutan membudidayakan komoditi pertanian secara membabi-butu. Pembudidayaan dianjurkan memperhatikan aspek potensi dan kekuatan lokal, sehingga komoditi yang dihasilkan memiliki kecukupan di bidang kuantitas, kualitas, variasi dan berkarakter.

7. Epilog

Tanpa kita sadari Bali telah menjadi sebuah pulau mendunia. Bahkan sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia, banyak pihak menceritakan Pulau Bali lebih dikenal, dibandingkan pulau lain di Indonesia karena kekhasannya. Kekhasan ciri itu adalah aktivitas adat dan agama bersinergi, sehingga budaya berlandaskan spirit Agama Hindu terus hidup dan berkembang sejalan dengan keseharian aktivitas masyarakat Bali.

Pandangan sebagian orang bahwa tiada hari tanpa aktivitas budaya pada masyarakat, sehingga menjadikan Bali sebagai salah satu tujuan wisata yang berbeda dengan tujuan wisata lain di Indonesia merupakan suatu realita. Perbedaan dan sekaligus kekhasan tersebut wajib dipelihara, apabila pariwisata ingin terus berkembang dan berkelanjutan sepanjang masa. Pariwisata sebagai subsektor dalam struktur ekonomi Bali, bahkan saat ini telah mendominasi PDRB Bali, akan menjadi berkurang atau ambruk, jika aktivitas budaya masyarakat, termasuk kearifan lokal Bali terganggu dan terpinggirkan eksistensinya. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, melestarikan, merevitalisasi dan mengimplementasikan budaya dan kearifan lokal Bali dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu pilihan strategis, karena ikon Bali sebagai sebuah provinsi dengan mengukung budaya sebagai modal dasar pembangunan telah menjadi kesepakatan dan komitmen masyarakat menuju Bali *jagadhita*.

Dalam realitas hidup masyarakat (Hindu) Bali, budaya

masyarakat lebih dominan berakar dan berangkat dari budaya pertanian atau budaya agraris, bukan budaya industri. Eksistensi pertanian dalam kondisi seperti itu, menjadi memiliki makna mendasar dan esensial dalam melestarikan budaya dan menata kehidupan masyarakat Bali, termasuk keberlanjutan pertanian sebagai salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi Bali berkelanjutan.

Implementasi kearifan lokal, seperti sistem *nyeraki* dalam pembangunan pertanian dapat menjadi pilihan dan senafas dengan Perda No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Ruang Bali. Esensi perda adalah menyuratkan dan menyiratkan bahwa ada ruang atau *zoning* yang boleh dibangun sesuai dengan peruntukannya dan ada ruang atau *zoning* yang tidak boleh dibangun karena tidak sesuai dengan peruntukan atau melanggar perda. Begitu pula esensi sistem *nyeraki*, kembangkan dan budidayakan segala jenis pertanian sesuai dengan potensi dan kekuatan lokal, agar Bali menjadi sebuah pulau penghasil komoditi pertanian yang unggul dan bervariasi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Seperti barang-barang pada toserba, pasar swalayan bahkan *hypermarket*. Prinsipnya, kendatipun membolehkan pembudidayaan apa saja di Bali, tetapi patuhi aturan atau perda. Bali harus ditata dengan sebaik-baiknya dan tidak selalu berorientasi pada ekonomi dengan orientansi laba semata-mata, tetapi aspek kelestarian alam Bali dan keberlanjutan kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih penting daripada kepentingan sesaat dan menyesatkan.

Dari aspek kompetisi dan dinamisasi harga komoditi pertanian, penerapan sistem *nyeraki* dalam membangun pertanian di Bali dapat berlangsung secara wajar dan sehat. Tidak akan timbul persaingan yang saling mematikan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Masing-masing wilayah telah memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif komoditi pertanian. Kondisi persaingan seperti tersebut di atas, akan dapat menjamin stabilitas harga komoditi pertanian, terutama saat panen raya. Selama ini harga sangat sulit dikendalikan oleh produsen, seperti petani. Ketika komoditi salak di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana mengalami panen raya, harga salak anjlok

pada titik nadir. Petani salak mengalami kerugian besar karena ketidakpastian harga. Lantas siapa dapat menolong mereka dalam kondisi seperti itu. Kendatipun semua tahu bahwa paling tidak ada 5 (lima) kelemahan dari komoditi pertanian. *Pertama*, fluktuasi harga tinggi, Pada saat musim panen raya tidak hanya harga komoditi rendah, tetapi fluktuasi harga sangat tinggi. Kondisi seperti ini tidak mampu dikendalikan oleh petani dan memberikan ketidakpastian, sehingga petani dihadapkan kepada risiko yang tidak kecil. *Kedua*, daya tahan komoditi. Umumnya komoditas pertanian cepat rusak bahkan busuk. Pun dapat mereka atasi dengan pemanfaatan teknologi, tetapi menimbulkan beban biaya tambahan.

Ketiga, ongkos produksi tidak pasti. Biaya produksi merupakan ongkos terbesar dalam komoditi pertanian dan ini relatif sulit dikendalikan oleh petani karena di luar kontrol atau ditentukan oleh faktor eksternal. Pada kondisi tertentu biaya produksi dapat lebih tinggi dari harga komoditi. *Keempat*, keterbatasan modal. Modal sebagai salah satu komponen faktor produksi acapkali merupakan penghambat para petani untuk mendapatkan hasil lebih baik. Keterbatasan modal menyebabkan hasil pertanian sering dijual lebih awal kepada tengkulak atau rentenir, sehingga penghasilan yang diterima dari penjualan komoditi tersebut jauh dibawah harga pasar. *Kelima*, kelemahan manajemen. Kelemahan manajemen menyebabkan petani tidak berdaya mengelola sumber daya secara efektif dan efisien serta cenderung konsumtif bukan produktif, terutama pada saat panen raya. Kelima kelemahan itu seolah-olah tidak berujung dan berpangkal bagi para petani dan itu sudah sepantasnya dicarikan solusi, melalui integrasi antara manajemen dan kearifan lokal, seperti masalah modal sesungguhnya dapat diatasi dengan pola *cingkreman* seperti berjalan dalam organisasi tradisional di Bali.

Akhirnya implementasi sistem *nyeraki* dalam pembangunan pertanian Bali adalah suatu kewajiban karena memiliki multiguna dan makna strategis. Dewasa ini Bali telah sangat dan banyak tergantung pada komoditi pertanian dari luar Bali,

seperti pisang, unggas dan beberapa kebutuhan bahan-bahan kelengkapan upacara. Dalam jangka panjang ketergantungan itu tidak strategis karena dapat membawa dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi Bali berkelanjutan. Ancaman utama adalah ekonomi Bali dibangun dengan kekuatan tunggal, yakni industri pariwisata. Hal ini sangat rentan, bilamana industri pariwisata ambruk, walaupun tidak diharapkan. Tatkala ketergantungan terhadap komoditi pertanian dari luar tinggi dan suatu ketika industri pariwisata mengalami gangguan, maka masyarakat akan kehilangan atau mengalami kerugian dua kali lipat, yakni kerugian material dan kehilangan kesempatan.

Masyarakat terlanjur tergantung. Mau belajar dan memulai bertani sudah terlambat. Masyarakat harus disadarkan bahwa pekerjaan tersulit dalam peradaban manusia adalah meninggalkan ketergantungan. Bali telah tergantung dengan beberapa komoditi pertanian dari luar. Ketergantungan tidak hanya mengancam ekonomi, tetapi mengancam pula kesehatan masyarakat. Semakin besar Bali tergantung dengan komoditi pertanian seperti unggas, semakin besar pula peluang Bali terancam dengan berbagai penyakit yang disebarkan oleh komoditi pertanian dari luar, seperti penyakit flu burung dan sebagainya.

Bali sedapat mungkin dijadikan Pulau *Ceraki*. *One stop shopping* untuk komoditi pertanian. Mengapa tidak? Lahan Bali sangat subur, sehingga semua jenis tanaman pertanian dapat tumbuh di Bali. Hanya dibutuhkan *good will* masyarakat dan pemerintah Bali. Masyarakat Bali secara perlahan dan pasti berkewajiban menurunkan tekanan dan ketergantungan komoditi pertanian dari luar karena dalam jangka panjang kondisi seperti itu tidak strategis dan tidak bermakna dalam membangun ekonomi Bali berkelanjutan. Lahan Bali subur, mengapa masyarakat belum makmur, padahal pasar komoditi pertanian sangat potensial sejalan dengan kemajuan industri pariwisata. Butuh kemauan, kemampuan dan keberanian masyarakat Bali untuk bersikap dan memulainya.

BAB III

NGADAS DAN NANDU ATAU NYAKAP SUATU SINERGI PEMODAL DAN PEKERJA

Keterbatasan faktor produksi, seperti modal merupakan salah satu penyebab ketimpangan pembangunan antar-wilayah, antarorganisasi maupun antarindividu dan bermuara pada kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi. Dalam tradisi Bali, sinergi pemodal dan pekerja disebut dengan istilah “ngadas dan nandu atau nyakap”. Sedangkan dalam dunia modern dapat diidentikkan dengan model “profit sharing”.

1. Prolog

Bagi petani Bali implementasi konsep *ngadas* dan *nandu* atau *nyakap* sudah menjadi tradisi turun-tumurun yang sampai saat ini masih eksis di beberapa kabupaten di Bali. Prinsip dasar tradisi *ngadas* adalah semacam kerja sama saling menguntungkan yang dalam bahasa ekonomi disebut sebagai simbiosis mutualistis dalam hal memelihara ternak, antara pemilik ternak dengan orang yang ingin beternak, tetapi tidak memiliki ternak karena keterbatasan modal yang disebut *pengadas*. Kedua belah pihak sepakat membuat sebuah perjanjian yang umumnya tidak tertulis sebagaimana perjanjian di dunia bisnis dan mereka dalam membuat kesepakatan itu lebih berdasarkan kepercayaan atau saling percaya.

Tradisi *ngadas* pada prinsipnya tidak berbeda dengan tradisi *nandu* atau *nyakap*. Dalam tradisi *ngadas* adalah binatang atau ternak sebagai objek bersinergis antara pemilik dengan pekerja disebut *pengadas*, dalam tradisi *nandu* yang menjadi objek adalah lahan pertanian. Tuan tanah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menggarap lahan mereka berdasarkan kesepakatan yang disebut *penandu* atau penggarap. Hasil penggarapan lahan pertanian itu dimanfaatkan bersama antara pemilik dengan penggarap sesuai dengan perjanjian bagi hasil

yang telah mereka sepakati, disebut *piakan*.

Tradisi ini, baik *ngadas* maupun *nandu* merupakan suatu sinergi kekuatan orang-orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi dengan yang memiliki kelebihan faktor produksi. Keterbatasan faktor produksi telah menjadi salah satu penyebab orang tidak punya pekerjaan, sehingga menganggur dan akhirnya menjadi miskin. Oleh karena itu, para leluhur di Bali (mungkin juga ada tradisi sejenis di tempat lain) telah memiliki strategi dalam mempersempit kesenjangan ekonomi atau pendapatan antara orang miskin dengan orang kaya, melalui sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pihak pemilik ternak maupun lahan memperoleh keuntungan ekonomis sebagai akibat dari pemanfaatan faktor produksi secara produktif dan optimal. Di lain pihak para *penandu* dan *penyakap* terbantu mendapatkan bekerja untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif karena ketiadaan faktor produksi telah terpenuhi oleh pemilik modal, berupa lahan atau ternak. Pola dan sistem tradisi ini tidak hanya terjadi dalam satu wilayah desa saja. Bisa melebar sampai ke luar desa, sehingga apa yang disebut dengan model subsidi silang telah pula tumbuh dan berkembang pada masyarakat tradisional Bali tempo dulu hingga kini.

2. *Ngadas dan Nandu Identik Model Profit Sharing*

Bentuk kerja sama saling menguntungkan antara beberapa pihak pada era kekinian di bidang ekonomi (investasi) dikenal dengan *profit sharing*. Para pemilik modal bersepakat untuk membangun sebuah lembaga bisnis secara bersama dengan menggabungkan modal mereka dengan harapan mendapatkan laba atau manfaat lain sejenis. Dalam tingkatan bisnis lebih tinggi sering disebut kepemilikan saham dan semakin besar kepemilikan saham, semakin besar pula otoritas dan *share* laba yang mereka terima dalam kerja sama usaha tersebut.

Tradisi *ngadas* dan *nandu lan nyakap* juga dapat dikatakan sebagai model *profit sharing*. Oleh karena dalam tradisi tersebut terjadi pembagian hasil disebut *mapiakan* dan bagian hasil yang

diterima oleh masing-masing pihak disebut *piakan*. Kendatipun tidak persis sama, tetapi hakikat tradisi *ngadas* dan *nandu* adalah merupakan sinergi kekuatan dan keunggulan masing-masing pihak. Pemilik ternak atau lahan pertanian tidak begitu saja dapat memberikan kepercayaan kepada orang untuk memelihara ternak atau mengolah lahan pertanian mereka. Biasanya pemilik melihat, mempelajari dan mengkaji latar belakang, termasuk kecakapan bahkan talenta dari seseorang yang diajak bekerjasama dalam tradisi ini. Jadi, kekuatan dan keunggulan *pengadas* dan *penandu* terletak pada kepercayaan dan kecakapan atau *skill* yang terbangun dari pengalaman dan talenta. Sementara itu, kekuatan dan keunggulan pemilik terletak pada kepemilikan faktor produksi, terutama ternak dan lahan pertanian yang dalam bisnis modern disebut modal.

Pola *profit sharing* dalam tradisi *ngadas* umum telah berlaku di Bali adalah dengan pendekatan bagi hasil atau *mapiakan*. Dalam tradisi *ngadas* berbentuk pemeliharaan atau penggemukan ternak, umumnya hasil usaha setelah dikurangi modal awal di bagi sama, yakni masing-masing mendapatkan bagian 50% atau di atur dengan komposisi lain berdasarkan kesepakatan. Adapula tradisi *ngadas* berdasarkan hasil dari pembiakan. Setelah berhasil mengembangbiakkan ternak tersebut, hasil berupa anak tersebut di bagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam tradisi *nandu* tidak berbeda dengan tradisi *ngadas*. Apabila lahan pertanian belum berisi tanaman, pemilik lahan wajib menyediakan bibit dan penggarap memelihara sampai tanaman tersebut menghasilkan. Akan tetapi, bilamana lahan pertanian tersebut telah terisi tanaman, apalagi sudah besar atau telah siap berbunga ataupun berbuah, penggarap hanya memelihara saja dan pembagian hasil juga berdasarkan kesepakatan. Hanya saja ada perbedaan perlakuan, apabila lahan pertanian itu masih berupa lahan kosong. Dalam kondisi seperti itu, penggarap dapat menanam tanaman lain, sambil menunggu tanaman pokok besar, asalkan tidak mengganggu pemeliharaan tanaman pokok. Hasil tanaman sela atau sampingan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik penggarap.

Apabila penggarap membutuhkan sarana produksi, seperti pupuk, umumnya menjadi tanggungjawab pemilik lahan pertanian atau bisa ditanggung bersama. Namun dalam kondisi tertentu dapat dibebankan atau ditanggung oleh penggarap, tentu berdasarkan kesepakatan antara mereka. Begitu pula dalam pengembangan atau penggantian jenis tanaman, wajib dilakukan pembicaraan terlebih dahulu. Pemilik maupun penggarap tidak bisa melakukan sendiri-sendiri. Fenomena ini sejalan dengan dunia usaha yang di bangun dengan pola *profit sharing*. Apabila melakukan diversifikasi usaha atau membuat produk baru, tentu harus melalui rapat atau tindakan sejenis untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Dalam tradisi *ngadas* adalah pembangian hasil cenderung sama, namun dalam tradisi *nandu* lebih mengikuti pola 1/3 : 2/3. Sebanyak 2/3 hasil diserahkan kepada pemilik lahan dan 1/3 menjadi bagian penggarap. Bukan hasil bersih yang di bagi, tetapi hasil bruto, sehingga pemilik lahan pertanian hanya berkewajiban menyediakan sarana produksi saja, namun telah dapat menikmati hasil. Begitu pula, penggarap dengan bermodalkan tenaga saja dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Secara sosial keberadaan tradisi *ngadas* dan *nandu* ini dapat memperkecil masalah sosial, penyakit sosial dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial seperti perjudian, mabuk, narkoba dan seks komersial semakin berkurang, bahkan sulit berkembang karena masyarakat sudah disibukkan dengan kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif. Begitu pula penyakit sosial, seperti tindakan kriminalitas semakin berkurang karena ekonomi masyarakat membaik dan tingkat pengangguran rendah di wilayah tersebut. Bahkan kesenjangan sosial akibat disparitas pendapatan kelompok kaya dengan kelompok miskin dapat tereliminasi atau paling tidak semakin menyempit, akibat adanya sinergi pemilik modal dengan pekerja. Oleh karena itu, prinsip tradisi *ngadas* dan *nandu* tidak hanya berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap

pembangunan ekonomi berkelanjutan, tetapi berpengaruh positif juga terhadap berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Bali.

3. Sistem *Ngadas* dalam Tradisi Pemeliharaan Ternak di Bali

Di Bali belum semua jenis ternak disinergikan dengan sistem *ngadas*. Penelitian dilakukan oleh Dasi Astawa (2005) di Kabupaten Jembrana, mengungkapkan bahwa baru beberapa jenis ternak saja bisa mengikuti sistem atau tradisi *ngadas*. Adapun jenis ternak tersebut adalah kerbau, sapi, babi dan kambing. Sementara itu, untuk kelompok unggas belum teridentifikasi, mungkin saja ada, tetapi tidak sepopuler beberapa jenis ternak tersebut di atas.

Kendatipun terbatas pada kelompok ternak besar dan berkaki empat, namun tidak tertutup kemungkinan sistem *ngadas* dikembangkan pada ternak jenis lain, seperti unggas sehingga dapat menjadi kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif masyarakat. Unggas jenis bebek mudah dibudidayakan pada wilayah dengan keberadaan air sepanjang tahun. Dimungkinkan menjadi produk unggulan, apalagi pasokan bebek, termasuk telur relatif banyak datang dari luar Bali, memenuhi permintaan pasar lokal di Bali. Permintaan itu sejalan dengan tumbuh dan berkembang usaha-usaha kuliner, di daerah Badung, Denpasar dan Gianyar menggunakan bahan baku bebek maupun telur bebek.

Usaha kuliner dengan menggunakan bahan baku unggas seperti, betutu bebek di Kecamatan Ubud telah menjadi satu produk unggulan atau ikon bagi Kabupaten Gianyar. Belum lagi bebek goreng, telah menjadi menu unggulan di beberapa restoran di kawasan Denpasar dan Badung. Sementara itu, telur bebek sudah menjadi kebutuhan masyarakat Bali sebagai salah satu kelengkapan sarana upacara dan berlangsung secara terus-menerus sepanjang tahun. Fakta itu mengidentifikasikan bahwa pangsa pasar bebek beserta telur memiliki prospek dan peluang besar di Bali. Apalagi diperhitungkan kebutuhan hotel dan restoran besar terhadap permintaan bebek, sungguh merupakan pasar potensial yang patut dipenuhi oleh peternak lokal Bali.

Pasar merupakan satu indikator utama dalam mendorong pembangunan ekonomi dan dapat menjamin keberlanjutan, termasuk di Bali. Keberadaan pasar potensial, seperti bebek, dapat menjadi alasan kuat untuk memberdayakan para peternak, baik dengan sistem *profit sharing* maupun sistem *ngadas* dalam kerangka membudidayakan bebek sebagai produk unggulan dan bernilai ekonomis di Bali.

Strategi ini, sekaligus menjadi tanda bahwa aktivitas ekonomi produktif dan kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat Bali tidak berkepatut dan terbatas pada produk tertentu saja. Seperti menerapkan tradisi *ngadas* pada kelompok ternak berkaki empat, yakni kerbau, sapi, babi dan kambing. Akan tetapi selalu melakukan diversifikasi produk dengan tidak meninggalkan spirit dan jati diri kelokalan Bali yang telah dipercaya menjadi roh dan *taksu* pembangunan Bali. Mengintegrasikan pola intensifikasi dengan diversifikasi dalam pembangunan di bidang peternakan sangat tepat dikembangkan di Bali. Sistem ini dapat membangun dan memperkuat fundamental ekonomi Bali, sehingga tidak mudah dihempas dan digoyang oleh berbagai tekanan, terutama tekanan yang datang dari eksternal.

Intensifikasi dan diversifikasi adalah satu strategi memacu aktivitas ekonomi produktif dan kreatif masyarakat Bali tumbuh dan berkembang serta mampu menghantarkan masyarakat Bali menjadi wirausaha-wirausaha tangguh, jujur, kreatif, inovatif, berani, bermartabat dan penuh tanggungjawab menjaga keberlanjutan Bali di segala bidang. Fasilitasi, motivasi dan mediasi mereka dari segala bentuk keterbatasan, termasuk manajerial dan modal adalah merupakan tugas pemerintah, sebagai bentuk dan perwujudan relasi kuasa antara warga negara dengan penguasa. Itulah mimpi besar membangun ekonomi Bali berkelanjutan di bidang pertanian, bila ingin mempertahankan Bali tetap eksis dengan keunikan, termasuk menggali, melestarikan dan merevitalisasi kearifan lokal, seperti organisasi tradisional subak sebagian telah mengalami pergeseran dan perubahan kearah degresif.

4. Sistem *Nyakap* dalam Tradisi Penggarapan Lahan Pertanian di Bali

Tradisi sistem *nyakap* pada masyarakat Bali, dilihat dari perspektif makna tidak hanya semata-mata mengandung makna ekonomis dan politik, tetapi juga bermakna sosial, yakni kekerabatan. Dari aspek ekonomi telah terkandung kejelasan makna karena tujuan dari sinergi pemilik lahan dengan penggarap atau *penyakap* adalah berupa pembagian hasil atau *piakan*. Pembagian hasil dalam sistem *nyakap* ini, begitu pula dalam sistem *ngadas* benar-benar dilandasi oleh kejujuran dan moralitas. Bila *penyakap* atau *pengadas* bersikap curang atau tidak jujur, pemilik lahan dan pemilik ternak bisa tidak mendapatkan bagian hasil. Pun mendapatkan bagian hasil, namun tidak sesuai dengan yang diharapkan dan disepakati bersama.

Mengapa kejujuran menjadi kata kunci dalam sistem ini? Oleh karena dalam kesepakatan atau kerjasama ini jarang sekali berdasarkan perjanjian formal, seperti para pihak dewasa ini membuat suatu kesepakatan bersama dalam melakukan usaha maupun hal-hal lain yang diikat secara yuridis-formal. Tradisi dalam sistem *nyakap* maupun *ngadas* lebih mengutamakan kepercayaan dan para pemilik lahan dan ternak sebelum menyerahkan pengelolaan lahan maupun ternak kepada seseorang. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa sistem *nyakap* dapat membangun konstruksi sosial baru berupa kekerabatan baru. Antara tuan tanah dengan penggarap secara perlahan-lahan terbangun suatu keterikan yang didasari atas saling ketergantungan sosial. Bila tuan tanah memiliki suatu hajat dan membutuhkan bantuan tenaga, mereka dibantu oleh para *penyakap* dan dalam kondisi seperti itu *penyakap* tidak menuntut imbalan. Tetapi secara sadar, tuan tanah tidak begitu saja arogan menjadikan budak penggarap tersebut. Mereka umumnya memberikan imbalan, namun lebih dominan dalam bentuk barang bukan uang. Kendatipun demikian, kasus perkasus, ada saja tuan tanah arogan dan penggarap diperlakukan sebagai budak, sehingga tradisi ini tidak bertahan lama.

Peristiwa seperti itu, tidak saja ditemukan dalam sistem *nyakap* maupun *ngadas*, namun dalam dunia usaha modern saja fakta tersebut acap menjadi kasus berkepanjangan, sehingga tidak jarang berakhir di ranah hukum. Perbedaan hanya terletak pada penyelesaian. Pada sistem *nyakap dan ngadas* berakhir pada ranah kekeluargaan, sehingga jarang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, sedangkan dalam persekutuan modern berakhir pada ranah hukum.

Di samping memunculkan kekerabatan antara penggarap dengan tuan tanah, dapat pula terbangun kekerabatan sesama penggarap. Mereka membangun suatu kebersamaan dan saling tolong-menolong, baik itu wujudnya secara bersama-sama mengharap lahan maupun bergotong royong dalam dimensi lain. Tentu kekerabatan ini terbangun berdasarkan kesuka-relaan dan tidak karena paksaan, terutama dari tuan tanah. Namun demikian kekerabatan sejenis ini tidak tergantung pada banyak anggota, sesama dua orang penggarap saja mereka dalam menggarap lahan dapat bekerja sama dalam bentuk gotong royong tanpa pamrih. Bisakah itu disebut kekerabatan? Walaupun dalam skala kecil karena keterbatasan anggota, tetapi esensi dari kekerabatan itu terpenuhi, yakni bekerja sama dan bergotong royong didasari atas keikhlasan tanpa pamrih, juga disebut kekerabatan.

Apabila konsepsi sistem *nyakap* dihubungkan dengan keberlanjutan ekonomi Bali, tentu memiliki kejelasan relevansi. Tradisi dalam sistem *nyakap* sebagaimana tradisi pada sistem *profit sharing* dalam persekutuan modern telah terbukti berjalan dengan baik. *Nyakap* adalah suatu model pemberdayaan masyarakat dengan adanya transformasi modal dari kelompok kaya kepada kelompok masyarakat lemah secara ekonomi. Aliran modal dari kelompok kaya kepada kelompok tidak mampu ini dapat membawa berbagai dampak ikutan (*multiflier effect*) dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan. Ketika terdapat keluarga tidak mempunyai pekerjaan karena ketiadaan faktor produksi dengan sistem *nyakap* ini, mereka menjadi memiliki pekerjaan dan dapat melakukan aktivitas ekonomi produktif dan ekonomi kreatif. Keberadaan

kegiatan ekonomi produktif dan kreatif tersebut secara langsung mendongkrak pendapatan dan daya beli keluarga. Peningkatan pendapatan dan daya beli tersebut berpengaruh nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan anggota keluarga masyarakat bersangkutan.

Di samping derajat kesehatan dan pendidikan mereka meningkat, secara sosial mereka juga memiliki peningkatan status sosial. Orang-orang menganggur, cenderung merasa status sosial mereka rendah. Apalagi sebagai kepala keluarga dan tidak memiliki pekerjaan, tentu sangat merisaukan status sosial tersebut, baik di mata masyarakat maupun di mata keluarga mereka, termasuk pandangan anak-anak mereka sendiri. Jadi tradisi dalam sistem *nyakap* maupun *nandu* telah menjadi bukti nyata dalam kehidupan masyarakat Bali dan mampu menumbuhkan berbagai dampak ikutan berdimensi menguntungkan semua pihak, termasuk pemerintah.

Dari perspektif politik tradisi *nandu dan nyakap* juga dapat di lihat, terutama pada zaman kerajaan. Masyarakat penggarap lahan pertanian milik raja, secara langsung menjadi subordinansi kerajaan. Mereka selalu tunduk dengan perintah raja, dan ini sesungguhnya sah saja terjadi, apalagi pada zaman kerajaan. Di zaman sekarang, pola seperti itu masih sering terjadi. Walaupun dalam model atau pola berbeda. Ketika seorang pengusaha memiliki kepentingan pribadi atau hajatan pribadi, terutama adat maupun agama, tidak sungkan melibatkan pekerja untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Kendatipun wilayah kegiatan telah didukung anggota adat dan keluarga. Akan tetapi sebagai bentuk relasi kuasa, hal itu bukanlah sesuatu ditabukan, apalagi dalam peradaban timur, relatif kesulitan memisahkan hubungan pribadi dengan hubungan formal.

5. Epilog

Tidak sedikit tradisi dalam kehidupan masyarakat lokal dapat dijadikan sebagai pedoman bahkan model dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Kendatipun demikian, tidak sedikit pula tradisi dalam realitas kehidupan

masyarakat hilang bersamaan dengan perkembangan dan dinamika zaman. Tradisi seperti itu, sudah dianggap tidak sejalan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pola berpikir masyarakat selalu berkembang mengikuti alur perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi telah menjadi pegangan dalam mendelitasi tradisi-tradisi yang dianggap usang dan disfungsi dalam peradaban masyarakat.

Peradaban sebagai kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa dan sistem kenegaraan dan sistem masyarakat yang maju dan kompleks, ataupun peradaban dipakai untuk menyebut bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus, maju dan indah tidak dapat terlepas dari pengaruh perubahan. Begitu pula dengan tradisi sebagian subsistem dari unsur-unsur peradaban, tidak luput dari perubahan dan perkembangan, terutama dilihat dari aspek bentuk dan fungsi

Seperti tradisi dalam sistem *nyakap* dan *ngadas*, tidak hanya statis, tetapi dinamis sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Hasil penelitian Dasi Astawa telah menemukan pola pemberdayaan terhadap ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jembrana dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengadopsi spirit tradisi dalam sistem *nandu* dan *ngadas*. Pola pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang tergabung dalam UKM, koperasi dan pokmas diberikan motivasi, baik dalam bentuk finansial-modal maupun motivasi nonfinansial, seperti peralatan pertanian dengan sistem bagi hasil.

Bentuk spirit yang diadopsi tradisi dalam sistem *nyakap* dan *ngadas* adalah tidak sebatas bagi hasil saja, tetapi Pemerintah Kabupaten Jembrana membebaskan UKM, koperasi dan pokmas dari segala kewajiban, bilamana mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kekuatan luar atau tidak disengaja. Misalkan kegagalan karena faktor alam dan di luar kendali manusia, seperti ternak maupun tanaman gagal panen karena terkena wabah penyakit. Dalam tradisi sistem *nyakap* dan *ngadas* telah berlaku prinsip yang sama. Kegagalan karena wabah penyakit atau faktor alam lainnya, pemilik lahan maupun ternak tidak

membebani *penyakap* maupun *pengadas* sebagai ganti rugi. Kegagalan itu ditanggung secara bersama-sama. *Penyakap* atau *pengadas* mengalami kerugian waktu dan tenaga, sedangkan pemilik lahan atau ternak menderita kerugian berupa finansial. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi produktif dan begitu pula sistem ekonomi dalam tradisi Agama Islam pada Bank Syariah, yang mana tidak mengenakan kewajiban bunga, tetapi lebih mengutamakan sistem bagi hasil adalah suatu pertanda bahwa tradisi dalam sistem *nyakap* dan *ngadas* di Bali telah sejalan, sesuai dan dapat dimanfaatkan sebagai model dalam membangun ekonomi berkelanjutan di era globalisasi ini. Pulau Bali kecil dan mungil ini bisa dikembangkan menjadi sebuah pulau seperti tertuang dalam pemikiran Schumacher (1981) tentang pemanfaatan modal yang disediakan alam, sesungguhnya jauh lebih besar dari modal yang selama ini membantu kita dalam memproduksi, bila kita dapat memanfaatkan dan mengelola dengan baik, benar dan betul, maka jadilah apa yang disebut dengan kecil itu indah, *small is beautiful* dan itu tidak sulit diwujudkan dalam pembangunan ekonomi Bali berkelanjutan.

BAB IV IMPLEMENTASI TRI HITA KARANA DALAM INDUSTRI

Harmoni adalah sebuah kata universal yang mencerminkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dan berujung pada kedamaian. Salah satu kearifan lokal masyarakat (Hindu) di Bali memiliki hakikat atau esensi sama dengan harmoni adalah "tri hita karana". Suatu konsep hubungan keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungan dan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta/Tuhan Yang Maha Esa. Jadi spirit "tri hita karana" sejalan dengan konsep pembangunan modern, yakni "integrated, harmony and equilibrium" seperti SGDs.

1. Prolog

Pembangunan industri, termasuk industri pariwisata di Bali merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan sektor industri pariwisata telah menjadi salah satu indikasi keberhasilan dalam membangun ekonomi Bali. Secara umum pertumbuhan industri pariwisata memiliki kekhasan dan menjadi pembeda dengan pertumbuhan industri pariwisata di provinsi lain di Indonesia.

Kendatipun perkembangan industri berskala besar dan rakus lahan di Bali lamban, tetapi dalam kurun waktu tiga dasa warsa terakhir kondisi fisik dan nonfisik Bali secara umum mengalami perubahan signifikan. Perubahan di beberapa kawasan sangat jelas terlihat, terutama di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pembangunan industri kepariwisataan. Secara fisik dapat diduga bahwa lahan pertanian tidak kurang dari 1.000 ha per tahun mengalami alih fungsi dan di sisi lain, akibat alih fungsi lahan tersebut, masyarakat dan kebudayaan Bali tidak bisa menghindar dari perubahan.

Secara faktual, perubahan masyarakat dan lingkungan Bali, tidak dapat kita pungkiri. Pada tahap awal pergeseran sektor tradisional agraris menuju sektor modern tidak begitu besar pengaruh negatif dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Bali. Namun, memasuki abad melinium ini banyak pihak merasa terpinggirkan karena tidak mampu ambil peran dalam perubahan itu dan berkompetisi dengan kompetitor dari luar Bali.

Ketidakmampuan ambil peran masyarakat Bali dalam memanfaatkan perubahan, terutama peluang pada kemajuan industri pariwisata dalam jangka waktu tertentu akan dapat membawa implikasi sosial buruk. Disharmoni kehidupan semakin terasa dan pada akhirnya, dapat diduga konflik menjadi konsumsi sehari-hari dalam masyarakat. Seakan-akan suasana hormoni menjadi “barang” langka karena tekanan sosial dan himpitan ekonomi yang bermuara pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Realitas sosial dan ekonomi tidak terbantahkan bahwa kemajuan industri pariwisata, tidak secara penuh dapat diakselerasi oleh masyarakat Bali. Bahkan pernah sebuah media lokal dan begitu pula dalam berbagai dialog terbatas acapkali terungkap bahwa investasi di sektor industri pariwisata tidak kurang dari 75% dimiliki oleh orang luar. Kendatipun secara nyata tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran industri pariwisata selama ini, telah mampu memberikan dan meningkatkan kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat Bali. Picard (1996) mengungkapkan kemajuan industri pariwisata telah memunculkan kesadaran baru dari kebudayaan Bali, yakni suatu “pencerahan budaya”, dimana hasil dari pariwisata sebagian ditanamkan untuk memperkuat kebudayaan.

Bahkan Wall (1995) secara lugas mengatakan bahwa kemajuan industri pariwisata, tidak hanya semata-mata meningkatkan ekonomi Bali, tetapi telah pula mendorong berkembang sektor-sektor lain sehingga dalam kurun waktu 25 tahun industri pariwisata telah memberikan kontribusi sebesar 40% terhadap PDRB Bali. Walaupun dampak positif itu dirasakan, tetapi di lain pihak kemajuan industri pariwisata telah pula membawa dampak negatif. Secara positif masyarakat Bali

memperoleh manfaat ekonomis serta kebudayaan Bali dirangsang secara progresif sehingga berkembang revitalisasi kebudayaan, akan tetapi bersamaan dengan itu unsur-unsur kebudayaan tertentu untuk konsumsi wisatawan terlihat diproduksi secara massal, komersialisasi dan orientasi materialisme sehingga bergerak ke gejala distorsi (Geriya, 1996).

Pola dasar pembangunan Bali telah meletakkan Agama Hindu dan kebudayaan Bali sebagai pedoman dan kerangka dasar dalam setiap pembangunan, termasuk pembangunan di sektor industri. Begitu pula dengan pengembangan industri pariwisata. Ajaran *tri hita karana* menjadi pedoman hakiki dengan meletakkan konsep harmoni sebagai roh atau "*taksu*". Namun dalam kenyataan telah banyak pembangunan di Bali mengabaikan, bahkan mengingkari pola dasar pembangunan tersebut. Lihat saja perkembangan pembangunan pusat-pusat perdagangan dan pembangunan ruko di pusat-pusat strategis dan sangat progresif. Secara fisik telah merubah wajah Bali, sehingga ungkapan "*seribu pura*" sering diplesetkan menjadi "*seribu ruko*".

Secara fisik lingkungan Bali telah terdegradasi. Luas hutan semakin berkurang, alih fungsi lahan cukup signifikan setiap tahun dan pencemaran lingkungan, baik berbentuk limbah padat maupun limbah cair, terutama yang dilakukan oleh industri semakin sulit dikendalikan. Pertanyaan adalah masihkan konsep harmoni yang identik dengan sikap hidup dan kehidupan manusia seimbang dan konsisten itu menjadi pegangan dalam pembangunan termasuk pembangunan sektor industri di Bali bila dilihat dari perspektif *tri hita karana*? Ini pertanyaan patut dijawab secara bersama oleh seluruh komponen masyarakat Bali.

2. Hakikat *Tri Hita Karana*

Agama Hindu dan budaya Bali sangat kaya dengan kearifan lokal, seperti ungkapan atau disebut *sesonggan* dan simbol-simbol dengan penampilan indah, menarik dan penuh dengan makna serta mengandung nilai spiritualitas. Berbagai

simbol suci tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* umat Hindu terhadap Tuhan (Titib, 2003). Di samping kaya dengan simbol, Hindu juga memiliki banyak ajaran-ajaran yang bersifat universal. Diantara ajaran tersebut adalah *tri hita karana*. Menurut Wiana (2004) istilah *tri hita karana* mulai diperkenalkan secara umum sejak tahun 1966 oleh I Wayan Mertha Suteja dalam rangka kegiatan Badan Perjuangan Umat Hindu Bali. Namun demikian, konsep dasar *tri hita karana* telah tercantum dalam *Bhagawadgita* III.10 disebutkan bahwa *yadnya*-lah yang menjadi dasar hubungan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dan alam.

Dalam perkembangan berikutnya, *tri hita karana* semakin banyak dibicarakan dalam berbagai seminar dan diskusi terbatas. Pada tahun 1969 dalam sebuah seminar tentang desa adat, I Gusti Ketut Kaler mengimplementasikan *tri hita karana* dalam wujud tata ruang dan tata aktivitas pada desa adat dengan membagi tiga unsur dalam satu kesatuan, yakni *Parahyangan* (Tuhan), *Pawongan* (manusia), dan *Palemahan* (alam). Ketiga istilah tersebut sampai kini menjadi bagian tidak pernah terlupakan dan tertinggalkan dalam pembangunan di Bali.

Masyarakat Bali (Hindu) berkeyakinan bahwa tiga unsur tersebut memiliki makna sangat mendasar, mendalam dan universal. Tidak ada satu komunitas di dunia ini mendapatkan kebahagiaan hidup, jika mereka mengabaikan tiga unsur dalam *tri hita karana* tersebut. Berbagai konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia terjadi karena mereka telah melakukan pengingkaran terhadap tiga unsur tersebut. Jangankan mengingkari tiga unsur, satu unsur saja tidak dapat terlaksana secara harmonis, akan terjadi disharmoni. Seperti konflik karena pembangunan berbagai proyek di Indonesia. Disebabkan oleh kealpaan dalam mengaktualisasikan unsur-unsur *tri hita karana*. Masyarakat menjadi curiga dengan pembangunan proyek tersebut karena mereka tidak dilibatkan. Mereka berpandangan bahwa eksploitasi alam atas lingkungan akan terjadi dan jika dibiarkan tanpa “perlawanan” dapat merugikan masyarakat dalam segala aspek, tidak saja ekonomi, tetapi juga sosial. Apalagi

secara realitas telah banyak terungkap di publik bahwa sekali di eksploitasi alam ini tidak akan pernah berhenti sebelum benar-benar habis.

Manusia, termasuk juga pelaku pembangunan seringkali beranggapan bahwa mereka bisa mengambil apa saja yang ada di dunia ini. Dengan penguasaan ilmu dan teknologi, manusia merasa mampu untuk menciptakan kemakmuran dengan mengeksploitasi sumber daya bumi. Mereka lupa bahwa mengeksploitasi sumber daya bumi berlebih-lebihan dengan mengabaikan aspek keseimbangan dapat menghilangkan habitat kehidupan lain, seperti binatang dan tidak tertutup kemungkinan bersamaan hilangnya habitat tertentu, menyebabkan hilang atau punah pula kehidupan pada habitat tersebut.

Tanpa kita sadari, di banyak negara telah dengan baik dan sungguh-sungguh melaksanakan esensi ajaran *tri hita karana* dalam rangka untuk melakukan penyelamatan alam beserta isinya. Mereka meyakini bahwa sumber daya alam terbatas adanya. Menyadari keterbatasan tersebut, maka sumber alam wajib dikelola dan diselamatkan agar tidak habis dan punah, apalagi alam beserta isinya bukan semata-mata milik manusia saja. Dalam *Isa Upanishad* bahwa bumi beserta isinya bukanlah sepenuhnya milik umat manusia, melebihi pemilikan makhluk lain yang hidup di atasnya. Segala sesuatu dalam jagat raya ini adalah milik Tuhan. Oleh karenanya kamu seharusnya mengambil sesuatu yang betul-betul kamu butuhkan dan sudah disisihkan untukmu. Engkau hendaknya tidak mengambil yang lain, sebab engkau tahu siapa pemiliknya (Rachore Prime, 2006).

Hakikat dari ungkapan di atas adalah sepanjang manusia memanfaatkan kekayaan alam dengan mengacu pada ajaran agama sesuai yang diamanatkan dalam konsep *tri hita karana* dalam agama Hindu, dipastikan kekayaan alam tidak akan pernah habis dan berakhir. Sebagai contoh, pemanfaatan hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam pembangunan rumah dan lain-lainnya. Hutan tidak akan pernah habis sepanjang untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti itu, apalagi diikuti dengan penanaman kembali atas penebangan hutan di tempat tersebut.

Pola seperti itu, telah mengimplementasikan unsur *palemahan* dalam *tri hita karana*. Dalam unsur *palemahan* terkandung pula makna simbiois mutualistis antara manusia dengan lingkungan atau alam, termasuk dengan binatang. Manusia dapat bertahan hidup karena alam telah menyediakan kebutuhan manusia dan alam membutuhkan manusia untuk menjaga agar jangan sampai dirusak oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek dengan mengutamakan tujuan sesaat dan sesat.

Esensi ajaran *tri hita karana* dengan menekankan pada tiga pola hubungan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam tidak hanya kita temukan dalam Agama Hindu saja. Semua agama pasti memiliki ajaran seperti itu karena ajaran tersebut terfokus pada manusia sebagai pelaku. Hanya saja penyebutan berbeda-beda, seperti ajaran cinta kasih dalam kristiani. Bahkan dalam filosofi pembangunan di negara-negara maju telah menetapkan konsep keseimbangan dan konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* dan secara implisit konsep pembangunan tersebut sejalan dengan esensi atau hakikat dari ajaran *tri hita karana*.

Pada era global ini, masalah lingkungan menjadi isu sangat hangat dan sentral sehingga dibicarakan dalam berbagai pertemuan, baik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Produk-produk hasil olahan industri dari suatu negara bila dikategorikan merusak lingkungan, tidak dapat masuk dalam pasar global. Produk seperti itu, tidak akan direspons oleh pasar sehingga tersisih dalam perdagangan internasional. Bahkan beberapa negara telah mensyaratkan setiap produk masuk ke negara tertentu wajib mencantumkan *ecolabeling*. Artinya suatu produk tertentu mutlak menunjukkan secara deskriptif dan didukung dengan legalitas bahwa komponen produk tersebut tidak dari hasil eksploitasi dan merusak alam atau menimbulkan limbah akibat kegiatan proses produksi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu sungguh berat syarat-syarat masuk dalam perdagangan internasional kini, apalagi di masa yang akan datang.

3. Implementasi *Tri Hita Karana* dalam Industri

Mempertimbangkan keterbatasan luas wilayah dan dihubungkan dengan akselerasi pertumbuhan industri rakus lahan, maka salah satu tantangan terbesar Bali ke depan adalah melakukan revitalisasi terhadap unsur-unsur *tri hita karana*, terutama unsur *pawongan* dan *palemahan*. Barangkali unsur pertama, yakni *pahrayangan* masih dapat berjalan secara wajar dan relatif sulit untuk di ukur tingkat kualitas, karena bersentuhan dengan hati nurani dan kadang kala bersifat pribadi. Berbeda dengan unsur *pawongan*, lebih mudah diukur tingkat implementasi dan kualitas, karena berkenaan dengan hubungan antara sesama manusia, baik konteks sosial dan ekonomi, termasuk dalam perspektif industri. Begitu pula dengan unsur *palemahan*, lebih gamblang dilihat implementasinya dalam kehidupan manusia, termasuk aktualisasi dalam lingkup industri.

Para ahli sosiologi berpendapat bahwa terkikis atau bahkan memudar suatu kebudayaan komunitas tertentu pada wilayah tertentu, tidak hanya semata-mata disebabkan oleh tekanan dari luar. Tetapi karena resistensi komunitas bersangkutan lemah, bahkan cenderung komunitas itu sendiri yang tanpa sadar ikut mempercepat proses memudarkan kebudayaan mereka. Bagaimana dengan Bali? Mungkinkah itu telah terjadi? Kendatipun kebudayaan Bali masih tetap eksis, mungkin aspek lain mengalami kemerosotan, bila dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas.

Menjawab pertanyaan tersebut sungguh mudah saja. Terutama berkaitan dengan kondisi objektif lingkungan alam Bali. Alam Bali secara nyata telah berubah. Sebelum tahun 80-an hasil pertanian mendominasi struktur ekonomi Bali. Tetapi dewasa ini secara kuantitas luas lahan pertanian terus menurun dan kualitas juga mengalami penurunan akibat keterbatasan sumber-sumber pendukung. Lahan sawah semakin banyak tidur karena keterbatasan air maupun sarana produksi lain.

Ekonomi Bali telah mengalami lompatan dari sektor primer menuju sektor sekunder, yakni industri jasa, perdagangan dan industri pariwisata. Bersamaan dengan itu secara perlahan

manusia Bali mulai menurunkan perhatian terhadap pertanian. Lebih cenderung bergabung bersama industri jasa dan industri pariwisata. Ketika ekonomi Bali masih dominan bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas, implementasi unsur-unsur *trihita karana* secara langsung telah menyatu dengan kondisi objektif kala itu. Sekarang bagaimana implementasi tersebut dalam dominasi industri jasa dan pariwisata?

3.1. Parahyangan

Perkembangan dan kemajuan industri pariwisata dan industri lain, secara nyata (kuantitatif) telah mendorong peningkatan hubungan masyarakat Bali (Hindu) dengan *Ida Sang Hyang Widi Wasa*. Paling tidak tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan sembahyang (*tirta yatra*) ke pura-pura tersebar di Bali, bahkan diluar Bali secara statistik cenderung meningkat. Peningkatan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, peningkatan pendapatan masyarakat Bali. Kemajuan industri jasa dan industri pariwisata secara eksplisit telah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagai implikasi dari peningkatan pendapatan tersebut, kebutuhan dasar dan kebutuhan spiritual masyarakat menjadi terpenuhi. Dan wujud dari kebutuhan spiritual itu direalisasikan dalam bentuk meningkatkan intensitas pemujaan *Ida Sang Hyang Widi Wasa* dan berbakti kepada leluhur melalui persembahyangan di berbagai pura dan upacara-upacara lain sebagai wujud *sradda* dan *bhakti*.

Kendatipun demikian, bila dilihat dari aspek kualitas, sulit mengukur termasuk membandingkan adanya peningkatan kualitas hubungan antara manusia (masyarakat Bali) dengan *Ida Sang Hyang Widi Wasa*, pada masa dominasi pertanian dengan saat ini didominasi oleh sektor industri jasa dan pariwisata. Karena kualitas hubungan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widi Wasa*, bersifat pribadi dan hanya dalam hati nurani sehingga tidak bisa diukur dengan pendekatan angka atau matematis maupun statistik.

Kedua, peningkatan prasarana dan sarana publik. Peningkatan itu secara langsung mempengaruhi secara signifikan umat Hindu di Bali melakukan aktivitas keagamaan karena adanya kemudahan. Peningkatan prasarana dan sarana publik tersebut sebagian besar karena keinginan pemerintah bersama masyarakat Bali untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kegiatan lain, termasuk dalam rangka mendukung pertumbuhan industri jasa dan pariwisata. Kemudahan umat Hindu mengakses tempat-tempat suci karena tersedia sarana jalan dan akomodasi lain, telah terbukti ikut serta mendorong kesemarakan atau kegairahan umat Hindu melakukan aktivitas keagamaan, termasuk melakukan persembahyangan. Jadi pertumbuhan industri, terutama pariwisata, diakui atau tidak telah menggugah umat Hindu untuk mengimplementasikan unsur *parahyangan* secara lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks universal kualitas pendidikan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pendidikan masyarakat yang rendah berkorelasi positif dengan daya beli masyarakat. Begitu pula sebaliknya, daya beli masyarakat rendah, cenderung mengabaikan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, kehadiran industri jasa dan industri pariwisata, tanpa disadari telah pula mendorong peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM), terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah di Bali. Bahkan jumlah buta huruf terus turun, sejalan dengan peningkatan komposisi guru dengan siswa dan komposisi antara siswa dengan infrastruktur lain (Lihat Data Bali Membangun, 2006).

Peningkatan kualitas pendidikan secara langsung telah meningkatkan tumbuh kesadaran masyarakat Bali dalam berbagai bidang, termasuk kesadaran dalam menjalankan perintah-perintah agama. Kendatipun pada tataran kasus-perkasus masih ditemukan perbuatan dan tindakan masyarakat Bali (Hindu) kurang mencerminkan rasa keberagamaan. Akan tetapi secara umum dapat dinyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan bersamaan dengan itu, adanya perbaikan terhadap struktur

pendapatan masyarakat akibat ganda dari pertumbuhan industri pada berbagai bidang, telah berpengaruh terhadap meningkatkan aktivitas keberagamaan di Bali, baik dalam bentuk fisik seperti pembangunan tempat suci maupun dalam bentuk nonfisik.

3.2. Pawongan

Disektor industri, khusus pada industri jasa dan pariwisata di Bali unsur *pawongan*, tentu belum penuh terimplementasi sebagaimana diharapkan. Masih banyak menyisakan masalah dan ketegangan, seperti gaji yang diterima buruh belum sepenuhnya sesuai dengan UMR dan UMP serta masalah PHK yang kadang-kadang tidak tertuntaskan sebagaimana diharapkan antara pekerja dengan pihak manajemen. Contoh adalah kasus pada industri jasa perbankan di Bali. Cukup lama berlarut-larut. Hak-hak karyawan yang menjadi kewajiban manajemen setelah melakukan PHK kurang tertuntaskan dan lama menjadi masalah, sehingga lama menjadi konsumsi publik. Hal ini terjadi sebagai akibat dari belum adanya kesepahaman antara karyawan dengan pihak manajemen.

Dalam perspektif hubungan antara manajemen dengan karyawan pada berbagai industri di Bali, masih ada saja pola hubungan kurang harmonis. Disharmoni antara kedua pihak, disebabkan oleh persepsi dan perbedaan pemaknaan atas beberapa faktor. Di antara faktor-faktor tersebut adalah seperti berikut ini.

a. Karyawan belum dianggap sebagai aset perusahaan

Karyawan merupakan salah satu komponen faktor produksi dan memiliki posisi serta peran paling strategis dalam perusahaan. Faktor lain, seperti bahan baku, modal dan mesin masih sangat mudah dikendalikan, karena semua itu adalah himpunan benda-benda mati. Berbeda dengan karyawan adalah manusia yang sekaligus sebagai pengelola dan mengendalikan faktor produksi lain, untuk menjadi lebih bernilai guna dan bermanfaat.

Maju ataupun mundur, berkembang atau tidak suatu perusahaan, apalagi yang bergerak di sektor industri sangat ditentukan oleh kemampuan karyawan mengelola sumber daya atau faktor produksi. Kemampuan mengelola itulah patut dihargakan dan tidak hanya dalam bentuk pemberian gaji semata-mata kepada karyawan. Atas upaya yang telah dilakukan oleh karyawan, tidak cukup diberikan imbalan dalam bentuk finansial, tetapi lebih penting dari itu adalah adanya pengakuan manajemen bahwa karyawan sebagai aset perusahaan.

Pengakuan karyawan sebagai aset perusahaan mengandung makna memanusiaikan manusia. Jika itu dilakukan, maka rasa tanggungjawab dan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan semakin hari semakin tumbuh dan menebal. Vibrasi harmoni akan menyebar dalam perusahaan dan suasana kerja menjadi kondusif dan penuh dengan kekeluargaan di atas asas profesionalisme.

Di manapun manusia berada, pasti membutuhkan pengakuan. Esensi hidup bagi manusia adalah keseimbangan. Keseimbangan antara lahir dan bathin. Memperoleh gaji bagi karyawan sebagai imbalan karena telah melakukan kewajiban adalah suatu bersifat lahiriah dan suatu bentuk penghargaan atau pengakuan dari pihak manajemen atas eksistensi karyawan. Bagi karyawan pencapaian prestasi dengan turut ambil bagian dalam membesarkan perusahaan, bukan semata-mata untuk mengejar uang, tetapi merupakan kebutuhan bathin. Jadi, jika itu dilakukan oleh industri, niscaya hubungan harmonis antara karyawan dengan manajemen akan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan industri tersebut. Namun dalam tatanan realitas kondisi seperti itu, sebagai bentuk implementasi dari nilai *pawongan* dalam industri relatif sangat jarang terlaksana.

b. Karyawan sebagai alat produksi

Dalam dunia industri dengan mendewakan kapital, karyawan acapkali dianggap sama dengan robot. Diperlakukan tidak berbeda dengan mesin-mesin dan dibentuk untuk bisa menerima dan menjalankan perintah, tanpa bisa berbuat apa-

apa. Di Bali tekanan seperti itu terhadap pekerja secara eksplisit barangkali sulit ditemukan, bahkan hampir tidak pernah terjadi. Akan tetapi secara psikologis kondisi itu, tentu ada. Contoh bagaimana karyawan bekerja pada sebuah industri pariwisata sangat sulit untuk mendapatkan ijin pada hari tertentu karena suatu kegiatan adat datang secara tiba-tiba. Padahal kegiatan adat tersebut sangat penting dan jika tidak ikut sangat besar risiko wajib ditanggung karyawan sebagai anggota adat.

Barangkali kegiatan sosial, agama atau adat yang telah terjadual dengan pasti, tentu tidak menjadi masalah. Oleh karena bisa disikapi dan disiasati dengan banyak cara. Seperti menukar hari kerja dengan teman lain dengan bidang keahlian sama, tetapi jika kegiatan berlangsung tanpa terduga, seringkali menjadi masalah bagi karyawan, terutama bekerja di sektor industri seperti pariwisata dan sejenisnya.

Bagi karyawan (Hindu) bekerja di sektor industri seperti itu, dihadapkan pada pilihan relatif sulit. Wajib dipahami hubungan antara manusia dengan manusia sebagaimana diamanatkan dalam unsur *pawongan* dalam *tri hita karana*, tidak hanya berlaku dalam lingkungan kerja saja. Pola hubungan antar manusia sangat ketat terjadi di lingkup sosial, adat dan agama. Oleh karena itu, fleksibilitas dan *win-win solution* dalam menyelesaikan kasus antara karyawan dan pihak manajemen merupakan metoda yang patut diutamakan bagi pelaku industri khusus untuk Bali.

Jangan diartikan bahwa karyawan (Hindu) menuntut sesuatu kekhususan dan jangan pula atas dasar fenomena seperti itu, menjastifikasi bahwa orang Bali itu identik dengan “banyak libur” sehingga lebih baik mencari karyawan dari luar Bali. Bilamana jargon seperti itu dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan, tentu akan merugikan semua pihak, termasuk industri itu sendiri. Banyak pihak, termasuk wisatawan domestik dan manca negara mengatakan bahwa daya tarik Bali terletak pada budaya karena selalu hidup sejalan dengan aktivitas sosial, adat dan agama. Jika manusia Bali terkekang dalam melaksanakan aktivitas sosial, adat dan agama, maka eksistensi budaya Bali akan

berkurang dan itu berarti Bali tidak lagi menjadi tujuan wisata dunia dengan ciri khas, karena tidak ada perbedaan spesifik dibandingkan dengan daerah lain.

c. Kesehatan dan keselamatan karyawan

Dalam badan sehat terdapat jiwa sehat. Ungkapan tersebut menandakan bahwa hanya pada karyawan sehat mampu bekerja dengan produktif dan kreatif, karena memiliki jiwa dan rohani sehat. Kendatipun pada industri skala besar dan menengah telah banyak memperhatikan kesehatan dan pendidikan bagi karyawan, namun pada industri kecil masalah keselamatan dan keamanan kerja karyawan sangat mengawatirkan. Hal itu lebih banyak disebabkan oleh masih banyak kelemahan-kelemahan dalam industri atau usaha-usaha kecil, baik dilihat dari aspek legal maupun aspek administrasi. Pada sebagian besar industri kecil, termasuk usaha kecil dan industri rumah tangga masih banyak tidak memiliki izin usaha dan begitu pula administrasi pembukuan masih sangat terbatas bahkan tidak memiliki pola administrasi pembukuan. Kelemahan ini membawa imbas terhadap kelemahan lain seperti kurang memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.

Para pelaku industri kecil, termasuk dalam katagori industri rumah tangga, hampir tidak ada memperhatikan keselamatan dan keamanan kerja karyawan atau buruh. Alat pengaman kerja yang dapat menunjang keselamatan kerja karyawan tidak tersedia dengan cukup. Pun kalau tersedia, itu hanya sebatas pengamanan minimum dan masih sangat rentan dengan bahaya. Seperti pada industri kerajinan rumah tangga dengan bidang usaha pencelupan. Masih banyak karyawan dalam melakukan kegiatan pencelupan, hanya menggunakan sarung tangan dan tidak standar serta masker seadanya saja. Padahal unsur kimia dalam proses produksi pencelupan itu mengandung risiko cukup besar, terutama dampak terhadap kulit dan hirup langsung kandungan kimia dalam proses pencelupan tersebut.

Seperti industri dengan bidang usaha permebelan. Perlindungan terhadap karyawan sangat terbatas dan ini

menunjukkan bahwa kepedulian pihak industri terhadap nyawa manusia sangat rendah. Seolah-olah setelah mereka memberikan upah sesuai dengan kesepakatan awal, dianggap segala persoalan telah selesai. Jika kondisi seperti itu kita cermati dari implementasi *tri hita karana*, tentu sangat jauh dari apa yang dimaksudkan dengan penghormatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam berbisnis.

Kadangkala dalam industri dengan pengelolaan bersifat keluarga, jam kerja karyawan tidak diperhitungkan secara profesional. Umumnya karyawan bekerja di sektor ini dengan tingkat pendidikan relatif rendah, sehingga diperlakukan seperti apa saja mereka menerima. Istilah jam lembur tidak pernah diwacanakan secara terbuka dan wajib diperhitungkan sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan. Selama karyawan tidak melakukan protes, maka selama itu pula perusahaan tidak melakukan kewajiban dan bila melakukan protes risiko bagi karyawan sudah menghadang, yakni mundur, berhenti atau dipecat.

Kendatipun tidak tersedia data seberapa banyak industri memperlakukan karyawan secara patut dan layak serta seberapa lagi tidak memperlakukan karyawan dengan melanggar asas kepatutan dan kelayakan, tetapi dapat diduga bahwa masih ada industri memperlakukan karyawan tidak sesuai dengan unsur *paawongan* sebagai spirit dalam *tri hita karana*. Kendatipun ada sebagian memperlakukan karyawan dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, tetapi keberadaan industri seperti itu tidak dalam jumlah banyak. Media lokal pernah mewartakan bahwa terindikasi banyak industri rumah tangga masih illegal dalam menjalankan usaha dan mereka itu dengan enak membuang limbah ke sembarang tempat, seperti sungai dan tanpa merasa bersalah. Hal itu membuktikan kepedulian terhadap lingkungan sangat rendah. Bahkan lebih tragis demi “uang” keselamatan mereka sendiri diabaikan, apalagi keselamatan pekerja atau karyawan maupun lingkungan.

d. Kesejahteraan karyawan sebagai kewajiban

Pada industri dengan meletakkan manusia sebagai faktor produksi paling bermartabat, maka masalah kesejahteraan karyawan layak dijadikan tujuan kedua jangka pendek setelah laba. Mereka sangat menyadari bahwa target laba tidak akan dapat dicapai tanpa dukungan penuh dari karyawan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manajemen untuk membagi sebagian laba untuk kesejahteraan karyawan.

Pertanyaan sekarang adalah apakah industri, terutama industri besar dan mapan di Bali sudah melakukan seperti itu? Pada industri pariwisata seperti hotel berbintang, telah melakukan pola pembagian uang servis dan uang tersebut bukan milik perusahaan, tetapi hak mutlak karyawan. Besar maupun kecil servis tersebut sangat tergantung pada hasil penjualan.

Di beberapa industri besar seperti hotel berbintang, barangkali sudah memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam berbagai bentuk seperti insentif, pelayanan kesehatan, rekreasi dan bentuk-bentuk lain. Tetapi di sisi lain, masih ada industri, baik yang bergerak di sektor pariwisata maupun lain belum memberikan kesejahteraan bagi karyawan. Terhadap industri seperti ini, sudah tentu belum secara penuh menjalankan kewajiban dan cenderung nuansa disharmoni lebih semerbak dan semarak, bila dibandingkan dengan kondisi industri lain yang mana telah melaksanakan kewajiban kepada karyawan sebagaimana layaknya.

Bila industri mengalami penurunan aktivitas sehingga berpengaruh terhadap pendapatan adalah wajar, belum memperhatikan tingkat kesejahteraan karyawan. Akan tetapi jika industri secara nyata telah memperoleh peningkatan pendapatan, apalagi telah melampaui target sebagaimana ditetapkan manajemen, sangat di sayangkan jika tidak melakukan perbaikan nasib karyawan. Industri seperti itu dapat dikatakan melakukan pengingkaran terselubung. Karyawan hanya dipandang sebagai objek penderita. Padahal manajemen tanpa dukungan karyawan sama dengan senjata tanpa amunisi. Secanggih apapun senjata itu, tanpa didukung dengan amunisi, tidak akan bermanfaat

dan fungsional. Begitu pula dengan *owner* tidak akan dapat memajukan industri, walaupun didukung oleh manajemen tangguh dan profesional, jika tidak mendapatkan dukungan karyawan. Jadi senjata itu sia-sia.

e. Pendidikan karyawan sebagai investasi

Industri besar dan maju akan merasa rugi besar, jika ditinggal oleh seorang karyawan. Oleh karena mendidik karyawan itu identik dengan investasi atau *human investment*. Memberikan kesempatan pendidikan kepada karyawan, baik dalam bentuk formal maupun informal adalah salah satu bentuk pengamalan dan aktualisasi nilai dan spirit *pawongan* dalam *tri hita karana*. Dan patut disadari bahwa tingkat pendidikan karyawan berpengaruh terhadap profesionalisme, produktivitas dan penciptaan kondisi harmonis dan disharmonis dalam industri tersebut. Semakin tinggi pendidikan karyawan, cenderung berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan kinerja perusahaan, semakin rendah tingkat pendidikan karyawan, mudah menimbulkan konflik dan dapat memicu disharmoni.

Di Bali, masalah pendidikan terhadap karyawan pada dunia industri, masih berada pada dua posisi. Sebagian pelaku industri memandang pendidikan karyawan sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mendukung kemajuan industri. Pihak ini merasa tidak ada kerugian mendidik karyawan, sebab semakin cerdas karyawan akan menimbulkan efek positif terhadap karyawan lain dan pada akhirnya akan berimbas secara nyata terhadap kemajuan industri atau perusahaan. Dan mereka berkeyakinan bahwa karyawan dengan pendidikan tinggi, lebih mudah dikelola dan dikendalikan serta memperkecil salah-komunikasi serta salah-pengertian di antara karyawan. Logikanya, harmonisasi lebih mudah diciptakan dalam lingkungan kerja dengan kondisi sumber daya manusia berkualitas.

Di pihak lain, masih ada juga industri kurang memperhatikan aspek kualitas karyawan. Fakta ini lebih dominan terjadi pada industri dengan skala industri menengah dan kecil. Bahkan pada industri kecil jarang sekali ada upaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena para pengelola industri kecil tersebut umumnya memiliki tingkat pendidikan relatif rendah, sehingga lebih cenderung konservatif dan tradisional dalam pengelolaan usaha mereka.

Faktor pendidikan memiliki korelasi positif dengan pencitraan dan penciptaan kondisi harmonis dalam suatu organisasi termasuk dalam industri. Pendidikan rendah lebih cenderung tidak bisa menerima argumentasi-argumentasi logis dan mereka lebih memilih dan memutuskan sesuatu berdasarkan pengalaman sehingga antisipasinya relatif lebih lamban dan selalu merujuk fakta-fakta lalu sebagai pembenar, padahal lingkungan telah berubah dan mengabaikan prediksi yang akan terjadi di masa depan.

Jadi, memberikan kesempatan dan peluang kepada karyawan, apalagi kepada masyarakat di sekitarnya, yakni dengan memberikan bea-siswa untuk meningkatkan kualitas melalui proses pendidikan adalah merupakan implementasi *yadnya* dalam industri. Belum begitu banyak terdengar bahwa industri di Bali ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan. Keterlibatan industri masih sangat terbatas. Dominan industri peduli terhadap pendidikan adalah masih industri-industri milik pemerintah. Seperti bea-siswa yang diberikan oleh beberapa BUMN kepada anak-anak sekolah di Bali. Jadi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi industri adalah kewajiban dasar dan berhubungan dengan upaya memanusiakan manusia serta sekaligus refleksi dari kepedulian dan kepekaan industri terhadap lingkungan atau disebut *corporate social responsibility*.

3.3. Palemahan

Setelah memaparkan unsur *parahyangan* dan *pawongan* dalam sektor industri, maka pada tahap berikut, dilanjutkan dengan memaparkan implikasi unsur *palemahan* dalam perkembangan industri di Bali. Dalam konteks ini hampir sebagian besar masyarakat Bali belum merasakan adanya kesadaran para pelaku industri terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tindakan memabat hutan dikenal dengan sebutan *illegal logging*

sudah tidak asing bagi masyarakat Bali. Hutan di Bali semakin hari semakin menyusut. Lahan kritis di dalam kawasan hutan telah mencapai 54.025 Ha dan lahan kritis di luar kawasan hutan telah mencapai 84.885 Ha (Data Bali Membangun, 2005). Di samping itu alih fungsi lahan produktif tidak dapat dihindari sepanjang tahun akibat kebutuhan industri dan kebutuhan prasarana dan sarana publik. Tidak kurang dari 1000. Ha lahan di Bali beralih fungsi sehingga berpengaruh terhadap kelestarian alam Bali.

Pranata-pranata sosial tradisional, juga mengalami degradasi dalam bentuk, fungsi dan makna. Lihat saja organisasi tradisional *subak*, telah banyak mengalami perubahan dan kepunahan. *Sekaa-sekaa* tradisional lain telah pula mengalami metamorfose, akibat dari lompatan struktur ekonomi Bali dari sektor primer menuju sektor tersier. Debit air terus mengalami penurunan kuantitas dan kualitas. Secara kualitas telah banyak sungai yang hanya dialiri air ketika musim hujan dan bila musin kemarau, sebagian besar sungai di Bali dibanjiri dengan limbah padat berupa sampah. Pun kalau masih ada sungai dengan air mengalir, tetapi kualitas air sungai tersebut telah tercemar dengan limbah cair dan diduga berasal dari limbah industri maupun rumah tangga.

Pertumbuhan industri, tidak dapat dipungkiri telah pula secara nyata ikut berperan dalam menurunkan kualitas lingkungan di Bali. Kasus pengurangan Loloan yang pernah terjadi di wilayah Kuta Utara dan polemik atas rencana pemanfaatan danau oleh investor, pembangunan villa telah melanggar *bisama* PHDI dan sepadan pantai merupakan satu bukti dari sekian banyak bukti dan fakta bahwa pelaku industri, baik bergerak di sektor jasa, pariwisata maupun industri rumah tangga belum sadar dan peduli terhadap lingkungan Bali.

Pencemaran sungai dan laut dilakukan oleh industri kecil dan rumah tangga, begitu juga pariwisata telah merubah wajah Bali. Tidak banyak lagi orang berani mandi di sungai, seperti dulu. Warna air sungai sepanjang tahun keruh, berwarna dan menebarkan bau kurang sedap, terutama sungai-sungai di wilayah perkotaan. Pelaku industri kecil, terutama tumbuh secara

illegal dan dalam jumlah relatif sangat banyak sulit dikontrol. Mereka dengan leluasa melakukan tindakan melanggar hukum, yakni membuang limbah secara sembarangan dan itu dilakukan seolah-olah tanpa ada perasaan salah, apalagi berdosa terhadap generasi mendatang. Mereka lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek dan sesaat serta paling tragis terjadi pada industri rumah tangga yang mengolah makanan atau bahan makanan. Jangankan peduli dengan lingkungan alam, nyawa manusia saja diabaikan. Mencampur makanan atau bahan makanan dengan unsur kimia membahayakan seperti pengawet dilakukan begitu saja. Terpenting produk yang dihasilkan dapat bertahan lama dan itu berarti kerugian dapat dihindari.

Lingkungan fisik Bali telah berubah dan itu adalah suatu realita. Bagaimana dengan lingkungan non fisik? Apakah berubah? Secara faktual hubungan antara lingkungan fisik dan nonfisik adalah suatu bentuk sinergis. Jika lingkungan fisik berubah, cenderung lingkungan non fisik juga mengalami pergeseran. Sebagai contoh lahan pertanian berubah, maka kebudayaan Bali juga mengalami pergeseran. Tatkala manusia Bali masih banyak bekerja di sektor pertanian, maka kehidupan mereka lebih dominan dicerminkan dalam bentuk aktivitas budaya berciri agraris. Akan tetapi begitu manusia Bali tidak lagi bekerja di sektor primer dan telah masuk pada sektor tersier dengan penekanan unsur modernitas, maka aktivitas budaya Bali mengalami pergeseran atau transformasi. Fakta sosial menunjukkan bahwa dewasa ini peran uang sangat mendominasi sebagian besar masyarakat Bali.

Ketika kultur berbasis pertanian, manusia Bali lebih mengutamakan peran dan partisipasi nonmaterial dalam melakukan interaksi sosial untuk memperkokoh kekerabatan. Namun ketika terjadi perubahan seperti saat ini, unsur material seolah-olah menjadi dominan dalam interaksi sosial, terutama di lingkup perkotaan dan sudah pula masuk pada beberapa desa. Lihat saja pada fenomena perkawinan, sistem dan prosedur perkawinan telah mengimplementasikan pola-pola modern, orientasi efektif dan efisien dengan peran uang sangat dominan.

Jadi, implementasi *palemahan* dalam kaitan dengan perkembangan dan keberadaan industri di Bali belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Kalau mau jujur, perhatian industri terhadap lingkungan masih lebih banyak pada tataran ungkapan atau jargon-jargon saja. Hal itu terbukti berbagai kerusakan lingkungan tetap saja terjadi di Pulau Dewata ini. Pencemaran darat, laut dan udara seakan-akan sudah menjadi sebuah fenomena biasa dalam kehidupan masyarakat. Banyak diskusi, kebijakan dan aturan-aturan hukum dibuat oleh pemerintah pusat maupun di daerah, tetapi kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan di Bali, baik dalam bentuk limbah padat maupun cair tetap saja berlangsung tanpa kendali. Itu adalah realitas kehidupan kita.

4. Epilog

Bila Bali dinobatkan menjadi *Bali is Bali Forever* dalam perspektif dinamis masih belum terlambat. Sumber daya alam sebagian telah tereksploitasi dan begitu pula kerusakan lingkungan alam belum terlanjur rusak secara total, masih bisa dibenahi, jika ada kemauan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan secara bersama-sama. Rehabilitasi terhadap lingkungan Bali membutuhkan kearifan dan keiklasan semua elemen masyarakat. Oleh karena gerakan rehabilitasi dan perbaikan terhadap lingkungan akan menunda bahkan meniadakan pertumbuhan pembangunan di sektor tertentu.

Sudah pasti pembangunan fasilitas industri pariwisata dan industri lain yang rakus lahan dihentikan atau paling tidak direposisi. Begitu pula pergerakan industri kecil dan rumah tangga yang *illegal* dan berpotensi mencemari lingkungan harus semakin dipersempit dan dibatasi ruang gerak mereka. Dan gerakan seperti itu, wajib dipersiapkan solusi dan disertai dengan edukasi agar tidak menimbulkan masalah sosial dan masalah lain, termasuk konflik antara pengambil kebijakan dengan masyarakat.

Titik pusat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan Bali, terletak pada lemahnya penegakan hukum dan belum

tersedia instrumen hukum yang mampu “menangkap” dan menangkal semua tindakan illegal pelaku industri “nakal”. Produk hukum seperti RUTR dan RDTR acapkali dikalahkan dengan kekuatan modal dan kepentingan politik dengan mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat. Apalagi di era otonomi daerah, peningkatan PAD seolah-olah menjadi sebuah alasan pembenar untuk melemahkan pelaksanaan dan penegakan supremasi hukum.

Bali sangat kaya dengan nilai-nilai tradisional spiritual (kearifan lokal) dan bersentuhan dengan upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan. Sebut saja cara orang Bali menyelamatkan sumber-sumber air. Hampir setiap sumber mata air di Bali dibuatkan pura oleh leluhur kita dahulu dan disebut dengan pelinggih. Orang tidak berani melakukan pencemaran karena dianggap suci. Begitu pula terhadap pelestarian hutan. Dahulu di beberapa desa terdapat aturan yang mana tidak dibenarkan menebang kayu secara sembarangan dan penebangan kayu dilakukan pada hari-hari tertentu saja atau hari baik disebut dengan *padewasan* dan itu berarti berlaku tindakan selektifitas. Di samping itu, tersirat pula kewajiban setiap menebang pohon untuk melakukan penanaman kembali pada lokasi dimana pohon itu di tebang, sehingga hutan tetap lestari.

Persoalan dewasa ini adalah sejauh mana masyarakat Bali dan pemerintah mampu melanjutkan implementasi kearifan lokal seperti ajaran *tri hita karana* untuk menjaga keselamatan alam Bali dalam situasi kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan beragam. Kearifan lokal berkaitan dengan penyelamatan lingkungan tidak cukup hanya dijadikan rangkaian kata-kata tidak bermakna dan tanpa diimplementasikan secara nyata. Sudah saatnya seluruh *stakeholder* Bali melakukan introspeksi diri, atas apa telah dibuat pada masa lalu, saat ini dan apa patut dan pantas diperbuat untuk masa datang. Hanya perputaran waktu dapat menjawab semua itu dan mari kita berbuat sekecil apapun demi keberlanjutan Bali sebagai pulau dengan berbagai julukan seperti kecil, indah dan relegius.

BAB V

CENIK LANTANG SEBAGAI DASAR PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM INDUSTRI PARIWISATA

Alam dan segala isinya merupakan harta titipan dari Maha Pencipta untuk diwariskan kepada anak-cucu. Ungkapan tersebut menandakan bahwa alam wajib dikelola dengan sebaik-baiknya dan tidak dirusak. Mengelola alam dengan pendekatan manajerial berbasis keberlanjutan atau sustainable development, sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk jangka waktu tak terbatas sejalan dengan suatu orientasi pola hidup dalam tradisi Bali disebut “cenik lantang”.

1. Prolog

Ensi konsep *cenik lantang* adalah mengandung sebuah makna bahwa manusia diharapkan berfikir untuk kepentingan jangka panjang, bukan sesaat. Konsep berfikir seperti itu, sejalan dengan apa yang dimaksud dalam manajemen modern, yakni suatu pengelolaan secara efektif dan efisien faktor produksi serta dalam teori pembangunan modern dikenal dengan istilah *sustainable development*. Teori tersebut berangkat dari keterbatasan sumber daya alam, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas.

Dalam realitas kehidupan manusia, bahwa bila tidak didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori Malthus dan David Ricardo menjadi benar. Pertumbuhan manusia seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan makanan seperti deret hitung. Sumber daya alam terbatas itu, bila tidak dikelola dengan baik, manusia pada suatu saat akan kekurangan bahan makanan. Bersyukur dengan kemajuan iptek telah terbukti mampu membatasi dan menurunkan angka kelahiran manusia. Di lain pihak dengan kemajuan iptek, manusia mampu pula meningkatkan, mendiversifikasikan dan mendiferensiasi

sumber daya alam dibutuhkan manusia dalam berbagai bentuk dan bervariasi secara berhasil guna dan tepat guna untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cenderung beragam dan tak terbatas.

Pulau Bali dengan keterbatasan luas dan sumber daya alam, implementasi konsep *cenik lantang* dalam berbagai bidang pembangunan adalah sangat sesuai dan tepat. Termasuk pembangunan ekonomi dengan motor penggerak utama industri pariwisata. Keterbatasan ruang atau daya dukung Bali, dapat menimbulkan berbagai petaka, bila tidak dikelola dengan baik, benar dan betul. Kemajuan industri pariwisata telah terbukti mengundang urbanisasi dari luar dan pedesaan ke pusat-pusat pengembangan pariwisata. Bila kekuatan industri pariwisata tersebut, tidak didistribusikan untuk membantu kekuatan ekonomi lain, seperti ekonomi umat, terutama di wilayah luar kawasan pariwisata dan pedesaan, maka lambat atau cepat kawasan pusat-pusat industri pariwisata akan dijejali dengan berbagai masalah sosial, tekanan sosial dan penurunan kualitas lingkungan sehingga dalam kurun waktu tertentu dapat mendegradasi kenyamanan dan keamanan wisatawan berkunjung ke Bali dan akhir dari semua itu industri pariwisata menjadi terancam.

Disepakati bahwa pembangunan ekonomi Bali adalah berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku industri pariwisata sebagai motor ekonomi Bali dengan kelompok pelaku ekonomi umat, merupakan suatu realitas untuk ditindaklanjuti. Sinergi ini dapat membangun pemerataan ekonomi, sehingga antara satu kekuatan ekonomi dengan kekuatan ekonomi lain, tidak saling mengganggu, apalagi meniadakan. Dalam tataran operasional memang tidak mudah dilakukan, namun bila kita sebagai *stakeholder* Bali berkomitmen mengantarkan pulau ini untuk dapat diwariskan kepada penerus kita, tentu kewajiban semua pihak, termasuk pemodal bersama-sama memberdayakan ekonomi umat dengan berlandaskan spirit *cenik lantang* tersebut.

Secara makro terdapat berbagai persoalan mengganjal bahkan menghadang dalam pemberdayaan ekonomi seperti

kelompok usaha kecil dan menengah, koperasi dan pokmas di Bali. *Pertama*, masih adanya monopoli dalam sistem perekonomian. *Kedua*, lemahnya akses bagi usaha kecil dan menengah dalam memperoleh modal dan selama ini konsentrasi modal hanya pada kelompok usaha besar. *Ketiga*, fundamental struktur ekonomi masih sangat lemah, karena lambat pergerakan usaha kecil dan menengah. *Keempat*, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi melalui BUMN masih sangat besar sehingga perhatian terhadap UKM hanya sering dijadikan komoditi politik belaka. *Kelima*, umumnya orientasi pasar usaha besar masih dominan pasar domestik sehingga "memangsa" pasar UKM, koperasi dan pokmas. Faktor-faktor semacam itu sampai saat ini masih menghambat laju pertumbuhan usaha, khususnya pelaku ekonomi umat, sehingga pemberdayaan yang "diproklamasikan" selama ini terhadap kelompok usaha ini belum memiliki pola dan format secara jelas, seakan-akan masih terkesan hanya sebagai jargon-jargon saja.

Esensi pemberdayaan ekonomi umat, tidak hanya memberi bantuan modal melalui berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti kebijakan kredit mikro, kontribusi 1-5% dari keuntungan BUMN dan sebagainya, akan tetapi pemberdayaan itu hendaknya sebuah upaya untuk mendayakan agar kelompok usaha ini dapat tumbuh dan berkembang, sehingga pada akhirnya mampu memperbaiki taraf ekonomi masyarakat lemah. Pemberdayaan terhadap ekonomi umat ditengah-tengah perkembangan industri pariwisata tidak sederhana. Tidak cukup dengan pemodal dan pemerintah membantu modal sejumlah tertentu kepada kelompok pelaku ekonomi umat, terutama pada usaha kecil dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif. Seperti terungkap dalam Mubyarto (2000), bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam bahasa lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat secara integrasi, terutama antara kelemahan di satu

sisi dengan kekuatan di lain sisi (lihat pula Himawan dkk ,2003 dan Baasir, 2003).

Apa menjadi titik lemah kebutuhan masyarakat, harus diintegrasikan dengan kekuatan pemodal dan pemerintah. Pada sebagian pelaku ekonomi umat, mungkin saja menjadi titik lemah mereka bukan modal, tetapi pasar. Sebagian lagi, bukan pasar dan bukan modal, tetapi manajemen. Jadi, integrasi kekuatan untuk menekan kelemahan dengan landasan orientasi jauh ke depan adalah konsepsi dasar membangun ekonomi berkelanjutan di Bali. Bisa saja orientasi pembangunan ekonomi Bali dengan pendekatan eksploitatif, tetapi keterbatasan sumber daya alam menjadi kendala dan pendekatan ini kurang sejalan dengan konsep *cenik lantang* dalam tradisi masyarakat Bali. Jadi, pembangunan apapun ditumbuhkembangkan di Bali, termasuk industri pariwisata persoalan sinergi atau integrasi dapat menjadi pilihan strategi bagi pengambil kebijakan dan itu salah satu titik sentral tantangan dulu, kini dan mungkin ke depan bagi pemimpin dan pemerintah Bali.

2. *Cenik Lantang* dan Pembangunan Industri Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dawam Raharjo (1999) dalam bukunya "Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi" mengungkapkan bahwa ekonomi umat adalah suatu aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuk yang digerakkan oleh rakyat atau umat. Bahkan lebih lanjut ditegaskan dalam buku tersebut adalah begitu penting sebuah negara berpihak kepada rakyat, yakni dengan membangun sebuah demokrasi ekonomi dan secara konseptual telah ada sejak bangsa ini merdeka. Esensi dari gagasan tersebut adalah keberpihakan negara terhadap ekonomi umat. Beberapa ekonom lain, seperti Mubyarto (1999), Zarkasih Nur (2000), Ma"rie Muhammad (2000), Sri Edi Swasono (2002) dan lain, lebih populer menyebut sebagai keberpihakan negara terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pemberdayaan atau keberpihakan terhadap ekonomi umat dapat dilakukan, baik terhadap individu maupun kelompok

usaha. Prinsip utama dalam pemberdayaan itu mengandung dua aspek pokok, yakni pemberdayaan adalah suatu proses pengalihkan atau memberikan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Di lain pihak, pemberdayaan merupakan proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu memiliki kemampuan, semangat, tekad dan kemauan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup mereka melalui proses dialog.

Begitu pula upaya menjadikan pengembangan industri pariwisata di Bali berbasis pemberdayaan ekonomi umat. Tidak terlalu sulit, jika masing-masing pihak, terutama pemerintah daerah dan pelaku pariwisata, seperti pemilik hotel dan restoran, biro perjalanan dan usaha besar lain ada komitmen dan itekad baik mendukung kemajuan kelompok usaha ekonomi umat seperti tergabung dalam UKM, koperasi dan pokmas. Pola kemitraan atau bapak angkat dan cara sejenis masih sangat memungkinkan untuk dilakukan di Bali. Pola kemitraan antara pelaku pariwisata dengan ekonomi umat dapat dilakukan dengan dua model atau cara yakni, langsung dan tidak langsung. Pola keterkaitan langsung adalah adanya hubungan antara bapak angkat dengan para pelaku ekonomi umat, dimana bapak angkat sebagai inti, sedangkan kelompok usaha ekonomi umat sebagai plasma.

Di samping itu, pola langsung ini juga bisa dilakukan dengan pendekatan dagang. Bapak angkat sebagai pemasar produksi dari kelompok usaha ekonomi umat sebagai mitra kerja. Ada juga disebut dengan pola *vendor*, yakni suatu pola dimana produk yang dihasilkan oleh usaha ekonomi umat sebagai anak angkat yang tidak memiliki hubungan dan kaitan ke depan maupun ke belakang dengan produk yang dihasilkan oleh bapak angkat. Pada kondisi ini, bapak angkat dapat menjadi konsumen dari anak angkat. Pola lain adalah pola subkontrak, dimana produk dari anak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha bapak angkat. Sementara itu, pola keterkaitan tidak langsung antara pelaku pariwisata dengan kelompok ekonomi umat dapat berupa pembinaan. Bisa saja dalam hubungan ini tidak ada kaitan bisnis langsung antara pembina

dengan yang dibina. Model pembinaan terhadap ekonomi umat seperti ini dapat berupa pelatihan manajemen, bimbingan usaha, konsultasi usaha-bisnis, monitoring usaha, dan jenis atau bidang lain.

Secara konkret, banyak strategi, model, pendekatan dan langkah-langkah dapat diterapkan dalam pemberdayaan, jika ada kemauan pemerintah dan kelompok pemodal kuat pada industri pariwisata untuk memberdayakan kelompok ekonomi lemah, seperti ekonomi umat. Bila dalam pengembangan industri pariwisata Bali, terus dilakukan berbagai upaya mendorong bertumbuh dan berkembang partisipasi masyarakat, terutama masyarakat-kelompok ekonomi umat, niscaya pariwisata dapat tumbuh secara subur dan berkelanjutan. Apalagi tidak meniadakan usaha dengan kekuatan faktor produksi terbatas, tentu keberadaan dan kehadiran industri pariwisata memiliki ikon tersendiri di mata masyarakat Bali.

Membicarakan ekonomi umat sering kali menimbulkan perdebatan dan mungkin tidak berujung pangkal karena masing-masing pihak memiliki argumentasi berbeda tentang ukuran dari industri. Jangankan orang per orang, lembaga formal pun di negeri ini memiliki kriteria berbeda dalam mendefinisikan skala industri. Adanya ketidaksamaan persepsi tentang siapa dimaksud dengan pengusaha kecil atau usaha kecil itu, mungkin menjadi salah satu "biang kerok" yang menyulitkan industri ini tumbuh dan berkembang seperti kita diharapkan bersama.

Eksistensi usaha-usaha digerakkan oleh kelompok ekonomi umat, memang relatif fluktuatif. Ada tumbuh dan ada pula bangkrut karena berbagai faktor penyebab. Hasil studi telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Universitas Udayana (2003) menunjukkan bahwa usaha kecil yang bergerak dalam pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, angkutan dan komunikasi, lembaga keuangan dan jasa-jasa lainnya untuk periode 1993–2001 ada yang mengalami peningkatan dan ada pula mengalami penurunan. Sementara itu, usaha kecil bergerak pada sektor peternakan cenderung mengalami peningkatan. Fenomena ini terjadi

dimungkinkan karena pola pemeliharaan ternak di Bali tidak lagi seperti dulu, yang mana lebih banyak di lepas, sedangkan saat ini menggunakan pola kandang. Para peternak sudah mulai menggunakan pendekatan lebih maju dan meninggalkan pemeliharaan ternak dengan cara-cara tradisional.

Di samping itu, dengan kemajuan teknologi kesehatan dan keselamatan ternak lebih terkendali atau dapat terhindari dari serangan wabah penyakit. Tidak sedikit peternak tradisional dahulu, belum mengenal bagaimana cara beternak dengan benar (pendekatan teknologi). Banyak sekali mengalami kerugian karena ternak mereka tidak dapat ditolong dari wabah penyakit mematikan dan datang secara serempak yang sering disebut dengan istilah penyakit mewabah atau *grubug*. Namun sekarang dengan kemajuan ilmu dan teknologi, sudah tentu hal itu dapat diminimumkan sehingga produksi ternak semakin membaik dan usaha bergerak di bidang itupun turut berkembang dengan baik pula.

Sebatas sebagai pembanding bahwa hasil penelitian Dasi Astawa (2002) menunjukkan pada periode 1993-2001 pertumbuhan usaha kecil di Bali sebagai bagian dari ekonomi umat, belum mencapai angka pertumbuhan sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha kecil sangat lambat padahal perkembangan pariwisata di Bali sangat pesat. Pertumbuhan usaha kecil, seperti bergerak di bidang industri pengolahan hanya meningkat sebesar 1,035% per tahun. Sementara itu, untuk usaha kecil bergerak di bidang listrik, gas dan air bersih justru mengalami penurunan sebesar 0,122%. Begitu pula usaha kecil di bidang konstruksi, hanya mampu naik sebesar 1,006% per tahun, bahkan di bidang perdagangan lebih rendah, yakni naik sebesar 0,802% per tahun.

Melihat kondisi objektif itu, perlu dicermati faktor-faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan usaha itu, di tengah-tengah gemerlap perkembangan industri pariwisata di Bali. Bila meminjam pendapat Mudrajad Kuntoro (1999) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan usaha kecil seolah-olah seperti jalan di tempat. *Pertama*, tidak adanya pembagian tugas yang jelas

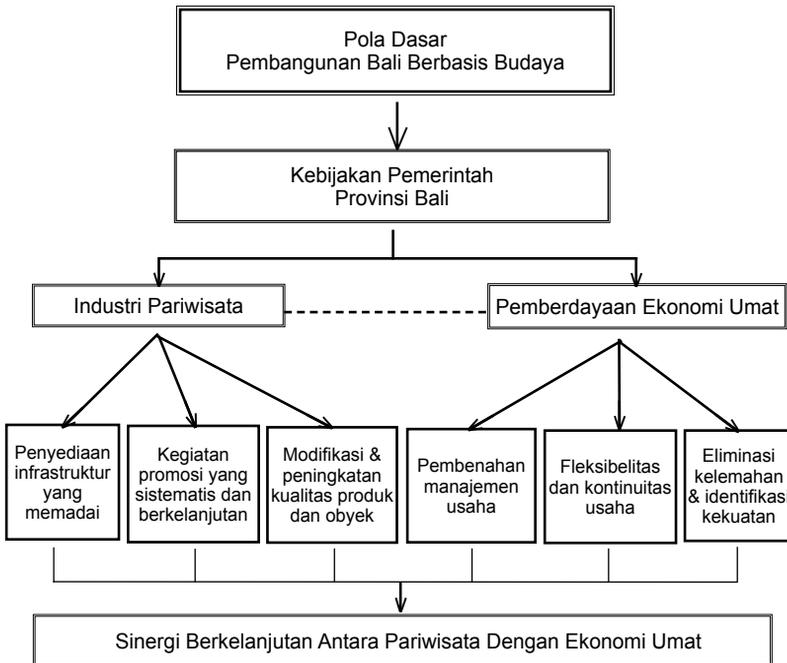
antara bidang administrasi dan operasi. *Kedua*, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri, atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan rentenir. *Ketiga*, sebagian kecil usaha kecil ditandai dengan belum memiliki badan hukum. *Keempat*, dilihat menurut golongan industri nampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh usaha kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman, tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya.

Pertumbuhan usaha kecil dengan rata-rata di bawah 5% itu, dihubungkan dengan kondisi Bali dengan perkembangan industri pariwisata luar biasa dan begitu pesat, tentu menjadi pertanyaan besar mengapa sampai itu terjadi? Benarkah karena empat kelemahan tersebut, sehingga menyebabkan usaha kecil tidak mampu memanfaatkan peluang? Mungkinkah karena lemah atau tidak adanya strategi yang mampu dibangun pemerintah bersama masyarakat Bali dalam membangun usaha kecil sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi umat?

Keberadaan pariwisata wajib disinergikan dengan berbagai usaha yang berkembang di Bali, termasuk dengan ekonomi umat. Tujuan itu dimaksudkan agar masyarakat Bali tidak semakin ditinggalkan oleh kemajuan industri pariwisata dan pada akhirnya hanya menjadi objek dari pembangunan dan tidak pernah menjadi subjek. Padahal modal sosial diinvestasikan oleh masyarakat Bali dalam memajukan kepariwisataan tak terhitung nilai, bila dikalkulasi secara ekonomi. Prinsip, bila para pemegang kebijakan ingin berbuat untuk masyarakat Bali, maka banyak cara dan strategi dapat dilakukan dalam mensinergikan industri pariwisata dengan kelompok ekonomi umat. Alternatif strategi pengembangan pariwisata berbasis usaha tergabung dalam ekonomi umat di Bali dapat dikembangkan seperti bagian berikut ini.

Bagan 02

Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat



3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis *Cenik Lantang*

Berangkat dari tragedi krisis multidimensi dan berlangsung dalam kurun waktu relatif panjang telah dirasakan oleh sebagian besar Bangsa Indonesia. Tidak cukup hanya diingat dan diceritakan atau kita abadikan sebagai sebuah torehan sejarah dalam perjalanan menuju kehidupan masyarakat lebih baik, sejahtera dan mandiri. Tetapi ada sebuah fakta sosial dalam multi krisis itu dan beberapa pakar ekonomi menceritakan sebagai “dewa” penyelamat ekonomi Indonesia dari sebuah kebangkrutan secara total. Fakta sosial itu adalah eksistensi dari sekelompok pelaku ekonomi lemah, kecil, terbatas dan hampir terpinggirkan di tengah-tengah ekonomi konglomerasi yang saat itu menjadi ikon dari kemajuan ekonomi bangsa kita. Berbagai kemudahan dan fasilitas diberikan oleh negara kepada pelaku ekonomi konglomerasi tersebut. Sungguh mencengangkan,

ternyata kelompok konglomerasi itu rapuh dan tak berdaya menghadapi tekanan krisis multidimensi yang berawal dari krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Konglomerasi benar-benar “babak-belur” dan ekonomi nasional berada pada titik nadir.

Sungguh kita patut berbangga masih ada “dewa” penyelamat dan keberadaan mereka menyebar, seperti pada pasar-pasar tradisional dan lorong-lorong gang kecil nan sempit dan di emper-emper pertokoan. Mereka adalah kelompok usaha kecil dan menengah yang oleh sebagian pakar ekonomi disebut ekonomi kerakyatan serta ada pula menyebut ekonomi umat. Sebutan itu dilandasi oleh keterlibatan rakyat atau umat dalam kegiatan ekonomi produktif dan kreatif tersebut sangat banyak dan mereka tidak cenggeng, tahan uji, lentur, fleksibel dan selalu menjadi target penggusuran di saat penertiban oleh aparat penguasa. Karena pelaku usaha ini dilakukan oleh rakyat dalam cakupan sangat banyak jumlah dan ragam usaha, maka disebut dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi rakyat dan terakhir ekonomi umat.

Apapun sebutan mereka, bagi pelaku usaha ini tidak peduli. Mereka tidak butuh sanjungan, fasilitas berlebihan dan penghargaan lain, tapi hanya butuh kenyamanan dan keamanan berusaha. Mereka jangan dijadikan semata-mata “kambing hitam” dan mengganggu ketertiban umum. Mereka diperas, bak sapi perahan, tetapi siapa menyelamatkan dan beranggujawab bila terjadi penggusuran atau penertiban? Tempat usaha bagi mereka adalah strategi dan simbol dari keberhasilan dalam menjalankan usaha, sehingga tatkala digusur atau tergusur kematian usaha sudah tidak dapat dihindari. Modal langsung habis, peluang usaha hilang dan mereka dihadapkan pada persoalan baru dan tantangan baru yang sulit dikendalikan oleh mereka. Oleh karena itu, agar mereka tidak selalu menjadi “kambing hitam” dan “sapi perahan”, maka solusi terbaik adalah memberdayakan melalui sinergi, baik dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga keuangan dan pemodal, sehingga mereka memiliki kenyamanan dan ketenangan berusaha serta tidak melanggar hukum dan

aturan-aturan lain di negeri ini. Dalam buku ini dipaparkan enam langkah yang diformulasikan untuk membangun kekuatan baru dalam ekonomi Indonesia, termasuk di Bali.

Untuk Bali, pemberdayaan ekonomi umat sangat penting dengan landasan berfikir *cenik lantang*. Sebagaimana telah diuraikan, keterbatasan luas, sumber daya dan lain-lain, mengharuskan arah dan landasan berfikir pembangunan ekonomi Bali berdasarkan konsep *cenik lantang* dan sangat relevan sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat. Enam langkah atau strategi dalam pemberdayaan ekonomi umat tersebut dijabarkan seperti berikut ini.

Tabel 01
Matrik Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat

No	Strategi	Wujud Kegiatan	Instansi	Sasaran Akhir
1	Pemantapan dan Optimalisasi Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi antarinstansi. • Formulasikan tugas, wewenang dan tanggungjawab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disprindagkop • Dinas Pertanian • Dinas Perkebunan • Lembaga non-struktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi miskomunikasi • Tidak tumpang tindih • Semua pihak berfungsi optimum
2	Pemantapan dan Optimalisasi Peningkatan Kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan satgas pemberdayaan • Berikan pendidikan dan pelatihan satgas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusdiklat • Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan berfungsi penuh • Profesional • Manajemen dan administrasi tertata
3.	Pemantapan dan Optimalisasi Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan • Penegakan aturan • Menghapus hambatan non-teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan Aparat penegak Hukum • Bawasda • Tim Monitoring • LPD dan KUD • Perangkat Desa/ Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimisasi penyimpangan bantuan • Pemahaman hukum mantap • Kasus-kasus minimum
4.	Pemantapan dan Optimalisasi Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas produksi • Melakukan diversifikasi produk • Identifikasi produk unggulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas sektoral • PHRI • HIPMI • Kadin • Lembaga profesional lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi produk • Berdaya saing • Kepastian harga • Kemitraan • Bapak angkat

5	Pemantapan dan Optimalisasi Pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan usaha • Menciptakan sistem bapak angkat • Melakukan Promosi • Pengembangan Pasar baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Kadin Daerah dan Pusat. • PHRI Daerah dan Pusat • HIPMI Daerah dan Pusat • Lembaga profesional lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan pasar. • Sinergi dalam promosi • Terlindung dari persaingan tidak sehat • Terhindar dari permaian Tengkulak dan sejenisnya
6.	Pemantapan dan Optimalisasi Sumber Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka akses modal • Membentuk tim memfasilitasi pencarian sumber dana murah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Terkait • Lembaga Keuangan non bank • Perbankan • BUMN, BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbebas dari sistem ijon • Kepastian modal • Beban bunga relatif ringan • Kenyamanan modal

Koordinasi menjadi salah satu kegiatan strategis dalam melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi umat di Bali. Memang kelihatan mudah dilakukan, tetapi banyak hambatan ditemukan dalam melakukan koordinasi. Ego masing-masing pihak menjadi persoalan dalam melakukan dan menerapkan salah satu fungsi manajemen ini. Dibutuhkan kesetiaan dan kerelapasaan agar suatu tindakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Acapkali miskomunikasi berangkat dari keterlambatan melakukan koordinasi, padahal perencanaan sudah disusun secara matang dan tersistem. Orang atau siapa saja bisa tersinggung dan merasa terlampui kewenangan, tanggungjawab dan tugas karena merasa tidak diajak berbicara sesuai dengan kesepakatan. Jadi, inti dari pemantapan dan optimalisasi kelembagaan adalah terletak pada koordinasi. Melalui koordinasi seberat apapun tanggung jawab, tugas dan beban dapat diselesaikan karena dibantu oleh berbagai ide dalam korodinasi itu. Fakta menunjukkan bahwa semakin banyak orang diajak berfikir untuk menyelesaikan suatu masalah, semakin cepat ditemukan solusi terbaik dari masalah itu, termasuk masalah, kelemahan dan hambatan dalam melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi.

Dalam pemberdayaan, posisi sumber daya manusia merupakan menempati posisi sentral dan menjadi bagian

tidak terpisahkan dengan keberhasilan. Oleh karena itu, dalam strategi pemantapan dan optimalisasi sumber daya manusia harus didahului dengan membenahi kualitas dan pembenahan kualitas sumber daya manusia itu dapat dilakukan melalui jalur formal maupun nonformal. Jalur formal dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi atau sekolah-sekolah seperti SMK, agar kualitas dapat meningkat, baik pada aspek manajerial maupun aspek teknis. Begitu pula dengan lembaga atau pendidikan nonformal. Lembaga semacam ini dapat dimanfaatkan, terutama untuk meningkatkan pengetahuan teknis, seperti lembaga pendidikan bahasa, salon, bengkel dan sejenisnya.

Tidak kalah penting dalam pemberdayaan, dilakukan pula suatu kegiatan dengan memberikan pemantapan di bidang organisasi dan hukum. Pemahaman organisasi akan berimplikasi positif terhadap peningkatan kemampuan dalam membangun jaringan usaha. Melalui organisasi orang akan tahu bagaimana cara-cara bergaul dan melakukan interaksi sosial. Sebab semakin tinggi interaksi sosial seseorang, apalagi pengusaha akan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, termasuk frustasi dalam menghadapi beberapa tantangan, hambatan dan risiko dalam berusaha. Begitu pula dengan strategis, penting dan perlu peningkatan pemahaman hukum. Orang paham hukum, cenderung menghindari dari suatu perbuatan melanggar hukum. Walaupun kasus perkasus pelanggaran terhadap hukum dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa mengenal apakah seseorang itu paham atau buta hukum. Tetapi bagi pelaku ekonomi umat, pemahaman ini menyebabkan mereka berhitung sekian kali untuk melanggar hukum.

Pelanggaran hukum dapat menjadi biang kerok dari penyebab kegagalan dalam pemberdayaan dan menumbuhkembangkan ekonomi umat. Kalau sudah moral bobrok, maka apapun diberikan, baik berupa motivasi finansial maupun nonfinansial akan sia-sia. Bahkan bantuan modal yang mesti dan wajib dikembalikan, dianggap sebagai bantuan cuma-cuma. Oleh karena itu, dalam pemantapan dan optimalisasi organisasi dan

hukum ini peran aparat penegak hukum sangat besar dan harus berani bertindak tegas sesuai dengan koridor hukum.

Dari aspek internal, kelemahan mendasar bagi usaha kecil dan menengah seperti pada pelaku ekonomi umat adalah masalah kualitas produksi. Produk hasil dari usaha ekonomi umat, sering tidak memiliki standarisasi kualitas, sehingga acap kalah dalam persaingan. Belum lagi masalah internal lain, yakni diversifikasi produk. Persoalan internal ini muncul bermuara pada kelemahan sumber daya manusia dan keterbatasan faktor produksi. Masalah seperti itu dapat diselesaikan dengan kemitraan dan keberadaan bapak angkat, sehingga membantu keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi umat ini dimanapun, termasuk di Bali. Sehubungan dengan itu, memberikan pendidikan dan pelatihan tentang tata cara membuat produk berkualitas dan bagaimana melakukan pengembangan produk adalah bagian integral dan tidak terpisahkan dengan agenda-agenda lain dalam pemberdayaan. Bentuknya adalah pemerintah atau badan swasta lain, dapat mengajak mereka bersama-sama untuk melihat beberapa unit usaha yang telah maju dan berhasil dalam membangun kualitas, semacam studi banding.

Lain lagi dengan masalah yang satu ini. Pasar merupakan titik lemah dan sulit dikendalikan oleh mereka. Pemasaran menjadi masalah klasik bagi pelaku ekonomi lemah. Dalam kondisi ini pemerintah dapat menolong mereka melalui pemberian fasilitas, terutama berhubungan dengan promosi. Usaha-usaha seperti ini tidak memiliki modal cukup untuk melakukan promosi dan mereka tidak memiliki pengetahuan cukup tentang tata cara berpromosi, sehingga uluran tangan dari pemerintah dan pengusaha besar, termasuk organisasi bisnis profesional sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha seperti ini.

Pasar merupakan satu persoalan yang relatif sulit dikendalikan dan bila dapat diatasi, maka masalah lain patut dipehitungkan dalam pemberdayaan, yakni permodalan. Modal bagi pelaku ekonomi umat, relatif sama sulitnya dengan pasar. Seorang pedagang sate, berjualan di pinggir jalan, hanya mampu berjualan sampai jam 13.00 siang. Ketika ditanya mengapa tidak

berjualan sampai sore dan berjualan di gubuk seperti ini? Jawaban karena keterbatasan modal. Begitu pula seorang penjual nasi dipinggir jalan di kawasan Denpasar Selatan ditanya mengapa berjualan sampai jam 12.00 saja? Jawabnya keterbatasan modal dan mengapa tidak pinjam saja? Jawabannya adalah tidak berani menanggung risiko. Tentu itu adalah satu alasan, mungkin masih ada alasan lain, seperti keterbatasan tenaga kerja atau tenaga kerja yang terkuras karena terfokus pada satu orang saja. Mereka lemah dalam pendelegasian tugas dan tanggungjawab. Apalagi dagang makanan seperti warung nasi, acapkali terkendala karena masalah *rasa* sehingga menyebabkan orang atau pemilik warung makan tidak berani memberikan kepada orang lain, termasuk anak. Mereka takut kehilangan pelanggan, kalau diserahkan kepada orang lain, dapat merubah *rasa* atau *taksu* dan bagi sebagian masyarakat (Hindu) masih percaya dengan *rasa* sebagaimana dengan adonan *lawar* tidak semua orang bisa mengerjakan.

Prinsip dasar memberdayakan ekonomi umat di Bali adalah suatu strategi pembangunan ekonomi berorientasi pada nilai filosofis cenik lantang. Kesadaran ini bertumpu pada keterbatasan Pulau Bali yang belum memungkinkan membangun industri besar, apalagi rakus lahan. Kelestarian alam menentukan kesinambungan dan kualitas kehidupan masyarakat Bali. Bali memerlukan pembangunan ekonomi, tapi pembangunan yang sesuai dengan kondisi objektif dan itu harus menjadi pertimbangan pemerintah, sehingga peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, memang di bangun dengan pendekatan berbeda dan berciri khas, dibandingkan dengan daerah lain. Itulah Baliku.

4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Setelah dipaparkan strategi pemberdayaan, tahap lanjutan disajikan tentang indikator keberhasilan pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi umat seperti pada UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat, baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh organisasi nonpemerintah dapat diukur dari 4 (empat) indikator. Keempat indikator tersebut meliputi; (a)

kemampuan mengembalikan kewajiban (b) keberlanjutan usaha (c) peningkatan nilai usaha dan (d) dampak ganda.

a. Kemampuan Mengembalikan Kewajiban

Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya cukup dengan memberikan bantuan modal, alat produksi dan pendampingan teknis semata kepada pelaku ekonomi umat, seperti UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat. Akan tetapi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pinjaman modal bergulir, harus terus mengalir dari satu UKM ke UKM yang lain. Dari koperasi ke koperasi yang lain dan dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Bila pinjaman modal bergulir tersebut tidak dapat dikembalikan atau digulirkan sebagaimana mestinya, pemberdayaan tidak dapat berkesinambungan dan hal itu berarti pengguliran pinjaman modal kepada para pihak yang belum pernah mendapatkan bantuan akan mengalami hambatan.

Memperhatikan sasaran modal bergulir dalam pemberdayaan ekonomi umat ini mengalir dari satu UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat secara berlanjutan, berhasil atau tidak berhasil pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan para pelaku ekonomi umat mengembalikan atau menggulirkan pinjaman modal yang telah diterima. Manakala pengembalian tidak berjalan lancar dan tunggakan semakin besar, kemampuan pemerintah maupun organisasi lain menyalurkan bantuan berupa pinjaman modal semakin hari, semakin berkurang dan itu berarti dapat mengganggu program pemberdayaan pemerintah maupun organisasi lain.

b. Kontinuitas Usaha

Efektivitas pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan pemerintah melalui pengembangan UKM, koperasi dan kelompok masyarakat tidak hanya semata-mata telah cukup dipandang dari aspek kemampuan kelompok ekonomi umat ini menggulirkan atau mengembalikan pinjaman modal yang telah diterima beserta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang

telah disepakati bersama. Kemampuan memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan tepat waktu bukan satu-satunya ukuran bahwa pemberdayaan tersebut telah berhasil. Akan tetapi masih perlu diperhatikan faktor lain seperti kesinambungan atau keberlanjutan usaha yang dibiayai dari pinjaman modal bergulir dan bantuan alat produksi serta bantuan lain.

Jika ukurannya hanya pada kemampuan mengembalikan angsuran beserta kewajiban lain saja, bisa saja usaha ekonomi umat seperti dilakukan oleh UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat berhenti bersamaan dengan berakhirnya masa pengembalian seluruh kewajiban yang telah mereka terima. Sebagai sebuah pemberdayaan tidak seperti itu diharapkan oleh pemerintah atau lembaga lain, tetapi setelah berakhir tenggang waktu pengembalian seluruh kewajiban, usaha ekonomi umat, masih tetap berjalan dan berkembang. Sebagai contoh, pelaku ekonomi umat yang telah berusaha di bidang peternakan, tidak hanya berhenti memelihara ternak karena bantuan yang telah mereka terima telah lunas. Tetapi masih wajib terus memelihara ternak, bahkan tidak tertutup kemungkinan jumlah ternak yang dipelihara bertambah.

Secara umum, berakhirnya pelaku ekonomi umat dalam berusaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, bahwa dengan berakhirnya kewajiban dianggap berakhir pula tanggungjawab dalam berusaha. *Kedua*, pelunasan kewajiban dianggap ikatan ketergantungan dan keterkaitan dengan pemberi bantuan berupa pinjaman modal sudah berakhir. *Ketiga*, kurang pemahaman tentang hakikat pemberdayaan karena diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti kelemahan atau kekurangan pembinaan dari pemerintah atau lembaga lain.

c. Peningkatan Nilai Usaha

Secara umum, salah satu tujuan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat adalah meningkatkan penghasilan atau laba. Sebab laba merupakan sumber pembiayaan berasal dari internal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai usaha. Sementara

itu salah satu ciri lain dari peningkatan usaha adalah ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas usaha. Bila pada tahap awal usaha hanya menghasilkan satu jenis produk dan kemudian berkembang, sehingga mampu menghasilkan lebih dari satu jenis produk, tentu usaha tersebut telah dapat dikatakan mengalami peningkatan nilai usaha. Begitu pula dari peningkatan hasil penjualan. Penjualan yang terus meningkat dapat pula menjadi indikator peningkatan nilai usaha. Peningkatan nilai usaha atau kekayaan dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lain memiliki prinsip yang sama, yakni terwujud suatu pertumbuhan usaha.

Jadi, sangat pantas dalam pemberdayaan dilihat pula aspek peningkatan nilai usaha. Suatu kegiatan organisasi bisnis apapun bentuknya, bila nilai dari kegiatan usaha mereka tidak meningkat, cenderung menurunkan motivasi dan semangat berusaha. Umumnya, dalam tradisi bisnis bahwa orientansi keberhasilan bukan terletak pada seberapa memperoleh laba saja, tetapi sejauh mana laba yang diperoleh itu mampu diinvestasikan kembali untuk meningkatkan nilai usaha. Sebab ukuran keberhasilan bisnis dalam jangka panjang terletak pada peningkatan nilai usaha. Buat apa mereka mendapatkan laba besar, namun tidak mampu mengoptimalkan pemanfaatan dari laba besar tersebut. Oleh karena itu, peningkatan nilai usaha merupakan tujuan dari pemberdayaan terhadap ekonomi umat dalam persepektif jauh ke depan dan berkelanjutan.

d. Dampak Ganda Pemberdayaan (*Multifier Effect*)

Dampak ganda (*multifier effect*) juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam pemberdayaan terhadap ekonomi umat. Dampak ganda yang timbul dari pemberdayaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap upaya di dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bila usaha para pelaku ekonomi umat dapat berkembang dengan baik, dampak ganda yang langsung dapat dirasakan adalah penyerapan tenaga kerja. Minimal dapat menyerap tenaga kerja di lingkungan mereka sendiri atau keluarga. Hal itu berarti secara nyata

dapat mengurangi angka pengangguran. Penurunan angka pengangguran memiliki arti yang sangat luas. Di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan di lain sisi dapat menekan masalah-masalah sosial dan penyakit sosial dalam masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi lain terhadap ekonomi umat, ternyata masih mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala itu adalah kurang keterpaduan antara keinginan pemerintah dengan keinginan pelaku ekonomi umat. Seperti belum maksimum peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga beberapa fasilitas yang telah dibangun pemerintah dalam rangka menunjang keberhasilan pemberdayaan belum dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Kendala lain adalah belum maksimum peran pemerintah dalam pengawasan terhadap berbagai bentuk motivasi atau bantuan kepada pelaku ekonomi umat, sehingga dapat menimbulkan penyimpangan. Bila faktor penghambat tidak diselesaikan dengan segera, pemberdayaan tidak dapat diharapkan terlalu banyak, apalagi mengharapkan dampak ganda bagi masyarakat luas.

Inti dari pemberdayaan, bukan hanya memberi bantuan atau modal dengan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi umat, tetapi jauh lebih strategis adalah melakukan pengawasan dan pembinaan. Sebab akan menjadi sia-sia bila pemberdayaan tidak mencapai tujuan sebagaimana diharapkan dan itu berarti sasaran jangka panjang pemberdayaan, yakni menurunkan pengangguran dan penyakit sosial lain dalam masyarakat tidak akan pernah terwujud, walaupun program pemberdayaan terus berjalan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai bentuk kebijakan dan program, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM mandiri.

5. Makna Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan memiliki multi makna. Salah satu makna tersebut adalah ekonomi. Secara ekonomi pemberdayaan memiliki makna, bila mampu meningkatkan taraf hidup

dan kesejahteraan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Sarbini Sumawinata (2004) mengatakan bahwa esensi pemberdayaan ekonomi bukan semata-mata meratakan hasil pembangunan, tetapi pemerataan kesempatan dan kemampuan untuk berproduksi.

Pandangan tersebut dapat pula diartikan bahwa jauh lebih strategis pemerataan alat-alat produksi dan segala sesuatu yang dapat memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan produksi, dibandingkan dengan hanya pemerataan pendapatan. Dalam konsep ekonomi yang menekankan pada produktivitas, efektivitas, dan kontinuitas, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan produksi adalah suatu upaya untuk mengarahkan rakyat menjadi lebih produktif. Tentu produktivitas masyarakat juga dicirikan oleh adanya kegiatan produksi yang terus-menerus dan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan keberlanjutan produksi Schumacher (1981) mengatakan bahwa kegiatan produksi itu terus berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, pemberian teknologi di bidang produksi kepada masyarakat yang tergolong miskin selayaknya diperkenalkan teknologi madya dan pengalihan teknologi (*transfer technology*) madya atau disebut juga teknologi manusiawi pada masyarakat miskin jauh lebih fungsional, bermafaat dan bermartabat.

Pemberdayaan terhadap ekonomi umat berlandaskan pada pemikiran tersebut di atas sangat sesuai, terutama bagi mereka berada di pedesaan. Pemerintah melalui peminjaman modal dan alat-alat produksi kepada pelaku ekonomi umat, seperti UKM, koperasi dan kelompok masyarakat untuk menggerakkan ekonomi produktif disesuaikan dengan kondisi desa, seperti teknologi madya. Termasuk arah pinjaman modal bergulir diupayakan agar pemanfaatan kepada bidang usaha produktif dan sesuai dengan kondisi lokal, sehingga secara ekonomis dapat tumbuh dan berkembang serta bermanfaat. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif ekonomi pemberdayaan terhadap ekonomi umat mengandung tiga makna yakni; (1)

optimalisasi sumber daya lokal, (2) mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan (3) pemerataan faktor produksi.

a. Optimalisasi Sumber Daya Lokal

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberdayaan terhadap ekonomi umat. Pemberdayaan diarahkan untuk memanfaatkan potensi lokal. Seperti pemberdayaan bagi peternak difokuskan pada ternak bernilai ekonomi dan di sekitar mereka tersedia cukup banyak bahan baku alam dan dengan mudah dapat dijadikan pakan ternak. Pemberdayaan peternak bebek tidak begitu saja dapat dilakukan di berbagai tempat. Dibutuhkan pertimbangan lokasi dengan kecukupan air, terutama lahan sawah. Bila model itu dilakukan, tentu dapat memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Sebab sisa-sisa panen padi, tatkala musim hujan dapat menjadi sumber makanan dalam pembudidayaan unggas jenis bebek.

Pemberdayaan terhadap ternak lain, seperti kerbau dan sapi. Pembudidayaan kerbau di Kabupaten Jembrana, tentu sangat sejalan dengan kekuatan potensi lokal. Di wilayah tersebut sudah berkembang kerbau dengan berbagai jenis dan dimanfaatkan untuk suatu kegiatan tradisional seperti *makepung*. Pola pemberdayaan semacam ini sangat sinergis dengan potensi dan kekuatan lokal. Begitu juga pembudidayaan sapi di Kabupaten Buleleng, tentu sejalan dengan tradisi di wilayah tersebut, yakni sapi *grumbungan*, sehingga pola seperti itu menjadi sangat pas dan sejalan dengan keinginan masyarakat sebagai petani.

Di bidang pemberdayaan lain, juga dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang hampir sama. Pemberdayaan dititik beratkan pada pemanfaatan potensi lokal secara maksimal. Implikasi positif dari pemanfaatan potensi lokal dalam pemberdayaan adalah dapat menghemat biaya dan lebih sesuai dengan tradisi lokal atau kebiasaan masyarakat. Kadangkala dalam pemanfaatan potensi lokal dapat menimbulkan dampak menguntungkan secara berangkai. Seperti pemberdayaan terhadap peternak dengan memanfaatkan potensi lokal, ternyata

di satu pihak dapat berimbang positif terhadap pemberdayaan perikanan dan pemberdayaan di bidang perkebunan. Kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan dan pupuk tanaman. Jadi pemberdayaan sesungguhnya dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal secara sinergis.

Optimalisasi sumber daya lokal dapat pula membuka peluang kerja. Seperti di Kabupaten Jembrana, pembangunan pabrik minyak kelapa akan dapat membuka peluang kerja, dibandingkan dengan menjual kepala butiran atau kelapa muda. Pengolahan kelapa butiran menjadi kopra dan dilanjutkan dengan mengolah kopra menjadi minyak kelapa merupakan suatu peluang kerja yang terbangun dari optimalisasi sumber daya lokal. Begitu pula di wilayah penghasil buah-buahan. Masuknya teknologi pengolahan buah-buahan menjadi beragam komoditi, tentu di samping menciptakan nilai ekonomi tambahan, dapat pula membuka peluang kerja di tingkat lokal.

b. Mendorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan tidak hanya menyangkut pada banyaknya bantuan yang dapat disalurkan. Namun, apakah bantuan yang telah disalurkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Adanya peningkatan aktivitas ekonomi umat seperti usaha UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat untuk kegiatan ekonomi produktif mempunyai pengaruh positif terhadap terbukanya kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan angka pengangguran. Keberhasilan pemberdayaan terhadap ekonomi umat tidak hanya membawa dampak ikutan (*multiflear effect*). Banyak mata rantai bisnis yang dapat berkembang dari keberhasilan program pemberdayaan ini. Bantuan terhadap kelompok masyarakat ekonomi produktif di pedesaan secara langsung dapat meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan. Penyebaran usaha-usaha kecil di tingkat pedesaan menjadikan aktivitas masyarakat di pedesaan lebih hidup dan meningkat sehingga desa terkesan lebih dinamis.

Bagi masyarakat, pemberdayaan oleh pemerintah, sudah tentu menambah aktivitas ekonomi produktif rakyat. Sebagai

anggota masyarakat yang telah mendapatkan bantuan, baik berupa pinjaman modal bergulir maupun alat produksi, tentu menambah aktivitas mereka. Sebagai contoh, bantuan dana yang telah diterima oleh masyarakat dipergunakan untuk membeli ternak, secara langsung aktivitas mereka bertambah, yakni memelihara ternak. Begitu pula, bila dipergunakan sebagai modal usaha, seperti membuka warung makan, dan bengkel. Sehingga aktivitas anggota masyarakat bersangkutan meningkatkan.

c. Pemerataan Faktor Produksi

Pemberdayaan juga mengandung makna pemerataan faktor produksi. Secara teoritis terdapat lima komponen faktor produksi, yakni modal, mesin, bahan baku, manusia, dan metode. Bercermin dari faktor produksi tersebut di atas, maka pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap ekonomi umat seperti UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan finansial dan nonfinansial jelas-jelas memiliki sasaran pemerataan faktor produksi.

Bantuan berupa pinjaman modal bergulir dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha atau modal kerja. Pemanfaatan modal dalam bidang usaha produktif, cenderung mereka mampu mengembalikan sesuai dengan jangka waktu. Kelancaran dalam pengembalian bantuan tersebut dapat memberikan implikasi positif terhadap pemberdayaan. *Pertama*, pemerataan kesempatan bagi pihak yang belum mendapatkan bantuan. *Kedua*, keberhasilan mengembalikan kewajiban sesuai dengan waktu dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah tidak mengeluarkan energi lebih untuk mengurus masalah tunggakan dan penerima bantuan tidak menanggung beban, baik berupa sanksi material maupun moral.

6. *Cenik Lantang vs Tukad Bangka*

Dalam era tanpa batas ini, tidak sedikit orang hidup menjadi “menderita” karena merubah gaya hidup. Konsumtif adalah suatu gaya hidup berlebih-lebihan di luar batas kemampuan secara finansial. Gaya hidup seperti itu dalam tradisi

Bali dikenal dengan ungkapan *tukad bangka*. Suatu keadaan, tatkala memiliki banyak uang dipergunakan secara irrasional dan ketika tidak memiliki uang, hidup mereka penuh dengan kegelisahan dan kegalauan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka itu hidup dengan melakukan cara-cara yang kurang terpuji. Istilah *tukad bangka* tersebut sesuai dengan istilah dalam ekonomi modern adalah konsumtif atau *demonstration effect*.

Dari aspek ekonomi, konsep dan makna yang terkandung pada *cenik lantang* berlawanan dengan konsep berfikir seperti pada *tukad bangka*. Hakikat *cenik lantang* identik dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, berfikir jangka panjang, efektif dan efisien. Bukan berarti takut menanggung risiko, apalagi tidak berani melakukan investasi atau pengembangan usaha. Investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Tidak hanya semata-mata berorientasi pada pencapaian hasil atau laba besar, namun lebih mempertimbangkan aspek kontinuitas usaha dalam jangka waktu panjang.

Berbeda dengan prinsip-prinsip terkandung dalam *tukad bangka*. Apa yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek kesinambungan atau keberlanjutan dan selalu berorientasi pada kebutuhan jangka pendek atau sesaat. Dalam konteks ekonomi, pola ini mengesampingkan prinsip efektif dan efisien dan prinsip-prinsip ekonomi secara umum. Prinsip kehati-hatian dengan berdasarkan pada kajian sistemik diabaikan sehingga pola seperti ini mudah jatuh bahkan bangkrut. Selalu gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi, hakikat *tukad bangka* kurang sesuai dipergunakan untuk menumbuhkembangkan ekonomi umat berkelanjutan di Bali dan menjadi antitesa dari nilai-nilai terkandung dalam *cenik lantang* yang selalu mengutamakan aspek rasionalitas, realitas, keberlanjutan, etika, moral, dan logika.

7. Epilog

Pengembangan pariwisata di Bali sudah selayaknya berdampak ganda terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Bali secara umum. Ekonomi masyarakat Bali harus terbangun melalui pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Bahkan pengembangan pariwisata Bali dengan identitas jelas, yakni "pariwisata budaya" hendak dilanjutkan dengan ciri lebih khusus dan operasional, yakni "pariwisata budaya berbasis pemberdayaan ekonomi umat".

Disamping itu, industri pariwisata yang sudah sangat dirasakan pengaruh dan mafaat dalam menggerakkan ekonomi Bali, harus tetap dijaga dan dikembangkan dengan tanpa berseberangan dengan pengembangan pembangunan di bidang lain, seperti sektor pertanian. Diupayakan secara sungguh-sungguh dengan pola simbiosis-mutualistik antara pembangunan sektor pertanian dengan pengembangan pariwisata. Sangat disadari kehadiran industri pariwisata di Bali bahwa, di samping membawa dampak positif juga membawa dampak yang negatif. Oleh karena itu, segala bentuk dampak negatif itu, wajib untuk dieliminasi, terutama berkaitan dengan persoalan alih fungsi lahan pertanian dan semakin meningkat jumlah penduduk datang dari luar daerah. Sebab, kepadatan penduduk Bali terlalu tinggi dapat membawa implikasi terhadap tumbuh subur penyakit sosial dan masalah sosial di Bali.

Berbagai kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan harus dengan terukur ditangani, sebab isu pencemaran terhadap lingkungan bisa menjadi penghalang utama di masa datang dalam pengembangan industri kepariwisataan. Para wisatawan akan enggan datang pada suatu daerah tujuan wisata, jika kondisi dan kualitas lingkungan rusak, akibat berbagai bentuk pencemaran. Sebetulnya jika Bali menempatkan pengembangan pariwisata budaya secara sungguh-sungguh dan konsekuen mesti tidak ada persoalan dengan lingkungan, karena para leluhur kita dan budaya Bali terkenal ramah dengan lingkungan. Apalagi ditopang dengan peningkatan kesejahteraan, tentu masyarakat Bali sebagai pendukung budaya selalu memelihara, mengembangkan dan menjaga budaya Bali, termasuk kearifan lokal yang telah menjadi roh dan dapat diimplementasikan dalam membangun ekonomi berkelanjutan Bali.

BAB VI

CINGKREMAN SEBUAH MODEL PEMUPUKAN MODAL

Sebagaimana filosofi lidi, bahwa bila digabung dalam satu kesatuan, maka menjadi sapu kuat dan lebih fungsional. Dalam tradisi Bali, dipercaya bahwa membangun apa saja, termasuk organisasi tradisional harus berdasarkan DOA, yakni dana, orang dan alat. Tradisi memperkuat dana dalam organisasi tradisional di Bali disebut dengan "cingkreman". Hakiket "cingkreman" identik dengan pemupukan modal dalam organisasi bisnis modern, seperti pada koperasi, yakni simpanan wajib dan simpanan sukarela. Dalam korporat disebut dengan istilah konsorsium atau sebutan lain sejenis.

1. Prolog

Cingkreman secara harfiah dapat diartikan sebagai pemupukan modal bersama berdasarkan sukarela. Dalam kamus bahasa Bali, *cingkreman* merupakan uang pangkal dikenakan kepada anggota *sekaa* atau perusahaan dalam desa (Kersten, 1984). Dalam konteks bisnis modern, makna terkandung dalam *cingkreman* sejalan dengan modal saham dalam perusahaan, seperti badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT), simpanan pokok dan simpanan wajib dalam koperasi. Semangat dan tujuan terkandung dalam sistem *cingkreman* ini memiliki kesamaan dengan tujuan sebagaimana terkandung dalam usaha-usaha bersifat modern, seperti koperasi, yakni suatu semangat gotongroyong bertujuan untuk mensejahterakan anggota.

Bidang usaha dilakukan oleh organisasi tradisional disebut dengan *sekaa* melalui menghimpun dana dengan pola *cingkreman* sama dengan usaha-usaha sektor formal dan informal, terutama bergerak di bidang simpan pinjam, baik dilakukan oleh koperasi, perbankan, LPD dan lain-lain. Suatu

usaha dengan memberikan pinjaman sejumlah tertentu kepada anggota dan atau masyarakat dengan sistem pengembalian pinjaman didasarkan atas keputusan bersama. Pada usaha-usaha modern, pengembalian pinjaman dilakukan setiap bulan dan pengenaan atas bunga pinjaman dibebankan setiap bulan kepada pihak peminjam, disebut dengan debitur. Prosedur pinjaman pada usaha modern lebih mengutamakan syarat-syarat tertentu, termasuk ada atau tidak jaminan. Pun, kalau peminjam tidak diwajibkan menyertakan jaminan secara fisik atau berupa barang, paling tidak jaminan berupa garansi personal merupakan satu kesatuan dan sudah tidak terpisahkan dalam menyalurkan kredit dalam sistem modern.

Berbeda dengan pola simpan pinjam dibentuk berdasarkan *cingkrem*. Tidak dikenal jaminan dan syarat-syarat tertentu, sebagaimana simpan pinjam berlatar belakang usaha modern. Pengembalian pokok atas pinjaman oleh anggota kelompok *sekaa*, tidak bersifat reguler, seperti pengembalian per bulan. Dipergunakan pola periode atau musim. Peminjam atau disebut dengan *mutranin* akan mengembalikan uang atau modal pinjaman setelah musim panen mereka tiba dan beban bunga dikembalikan sekaligus bersamaan dengan pengembalian angsuran pokok. Tidak ada beban bunga ditanggung setiap bulan dan beban bunga tersebut telah diperhitungkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perkiraan musim panen.

Fenomena menarik dalam sistem *cingkrem* adalah adanya rasa saling percaya sesama anggota kelompok atau *sekaa*. Anggota sangat taat dan mereka tidak berani melalaikan kewajiban, apalagi sampai tidak mengembalikan pinjaman. Ada stigma negatif bagi anggota *sekaa*, bila tidak memenuhi kewajiban disebut dengan *memirat*. Walaupun tidak ada sanksi hukum dan hanya sanksi moral. Sanksi moral bagi masyarakat tradisional, dinilai jauh lebih berat dibandingkan dengan sanksi hukum. Oleh karena sanksi seperti ini, tidak hanya menurunkan dan meruntuhkan kepercayaan serta kewibawaan orang perorang atau peminjam saja, akan tetapi dapat berimplikasi kurang baik terhadap keluarga di dalam masyarakat.

Kepercayaan anggota merupakan kata kunci dalam sistem *cingkreman*. Begitu pula dengan dunia usaha modern lain, seperti perbankan. Lembaga perbankan sebagai usaha dengan fungsi sebagai memediasi lalu lintas dana dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan unsur kepercayaan. Jika tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka tentu usaha perbankan bangkrut dan tidak sedikit kasus perbankan mengalami kegagalan usaha karena keberadaan lembaga tersebut, kurang dipercaya oleh masyarakat. Begitu pula dengan koperasi. Telah banyak kasus terjadi pada koperasi dan telah berkembang dengan baik, tiba-tiba dalam kurun waktu tertentu pertumbuhan dan perkembangan koperasi semakin hari semakin mengecil, bahkan bangkrut. Kondisi seperti itu, dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satu faktor paling penting dan strategis mempengaruhi adalah penurunan kepercayaan dari anggota.

Jadi dengan demikian, cukup signifikan bagi umat Hindu dalam menjalankan usaha apapun bentuk dan ruang lingkup usaha, berkewajiban tidak mengabaikan nilai-nilai lokal yang telah ada dan hidup dalam masyarakat. Hakikat tersirat dan tersurat di dalam kearifan lokal tersebut adalah spirit religius sebagai dasar untuk melakukan usaha-usaha berdasarkan pada aspek kejujuran dan kebenaran serta menjauhkan diri dari perbuatan menghalalkan segala cara, seperti menipu, curang, ingkar janji dan *memirat*.

2. *Cingkreman* Modal Pembangunan Ekonomi Produktif dan Kreatif Masyarakat Bali

Dalam masyarakat tradisional modal merupakan salah satu faktor produksi dengan peran strategis, dibandingkan dengan faktor produksi lain seperti bahan baku, tenaga kerja, alat produksi dan teknis-metode. Bagi masyarakat tradisional modal dalam arti uang, memang acap menjadi kendala dan sulit mereka atasi. Oleh karena itu, keberadaan sistem *cingkreman* dalam masyarakat tradisional-pedesaan sangat membantu dan telah menjadi strategi adalan dalam mendapatkan modal untuk menggerakkan ekonomi produktif masyarakat, khusus di di

pedesaan Bali.

Pemupukan modal melalui sistem *cingkremen* ini, hanya terdapat pada kelompok-kelompok masyarakat tradisional, disebut dengan *sekaa*. Kondisi tersebut menyebabkan ruang lingkup peredaran uang masih seputaran anggota *sekaa* dan relatif tidak berkembang sebagaimana dengan pemupukan modal pada organisasi bisnis modern. Kendatipun demikian warisan leluhur ini, telah terbukti ampuh dan sukses menggerakkan ekonomi produktif dan kreatif dalam lingkup tradisi. Sistem ini tidak ketinggalan di tengah-tengah modernitas dan bertumbuh lembaga-lembaga keuangan modern, system ini masih eksis di beberapa desa di Bali.

Tradisi seperti sistem *cingkremen* ini, menganut suatu prosedur dengan tingkat fleksibilitas tinggi. Pemungutan uang atau disebut *urunan* dilakukan pada rapat rutin sebagaimana telah mereka sepakati bersama sesama anggota *sekaa*. Rapat rutin dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali menurut bulan tradisi masyarakat Bali, yakni setiap 35 hari. Setiap rapat, di samping membahas masalah program kerja *sekaa*, disertai pula dengan pemungutan iuran atau *urunan* dan besar *urunan* sama untuk semua anggota. Jarang sekali ada anggota tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. Mereka, para anggota dengan segala upaya untuk menunaikan kewajiban pada saat rapat, karena tidak mau terkoyak harga diri mereka, akibat tidak memenuhi *urunan*.

Upaya dan usaha untuk menegakkan kesepakatan berdasarkan kejujuran dan *satya wacana* menjadi modal dasar, agar eksistensi dari organisasi tradisional disebut dengan *sekaa* dapat menjalankan sebagaimana diharapkan bersama. Mereka sadar betul bahwa uang adalah menjadi salah satu penyebab organisasi bubar atau tetap eksis sepanjang masa. Oleh karena itu, masalah pertanggungjawaban keuangan dalam organisasi ini, dilakukan secara transparan, walaupun dahulu bentuk laporan adalah dominan lisan karena pengurus tidak bisa menulis.

Walaupun begitu, tetap saja ada organisasi tradisional ini mengalami kebangkrutan atau bubar karena berbagai

faktor, seperti tekanan eksternal dan masalah ketidakjelasan pertanggungjawaban pengurus terhadap keuangan. Dewasa ini faktor tekanan eksternal jauh lebih besar sebagai penyebab bubar organisasi tradisional di Bali. Katakanlah organisasi tradisional sangat terkenal, seperti *subak*. Kebangkrutan *subak* di Bali, lebih banyak disebabkan oleh tekanan eksternal, akibat lahan pertanian semakin berkurang bahkan habis. Sejalan dengan alih fungsi lahan pertanian, maka secara perlahan-lahan eksistensi dan kiprah *subak* semakin hari, semakin berkurang dan akhirnya tak fungsional, sehingga bubar atau beralih fungsi mengikuti alih fungsi lahan.

Begitu pula dengan eksistensi *sekaa-sekaa* tradisional lain. Organisasi tradisional itu, hilang karena tidak dibutuhkan lagi karena tidak memiliki program kerja. Seperti *sekaa manyi*, yakni suatu organisasi dengan program atau kegiatan utama memotong padi, bubar dan menghilang akibat sistem panen atau potong padi telah berubah. Begitu pula dengan keberadaan beberapa organisasi tradisional lain, bubar dan menghilang karena sudah tidak dibutuhkan lagi untuk tujuan sosial dan ekonomi.

Kendatipun secara wadah, beberapa organisasi tradisional telah hilang, namun semangat dan esensi terkandung dalam organisasi tersebut dalam memajukan kegiatan sosial dan ekonomi, masih sangat layak pantas dilanjutkan. Semangat *cingkremen* dengan beberapa aturan melekat pada organisasi tersebut, masih dapat dimanfaatkan mendorong pemupukan modal untuk membangkitkan ekonomi produksi usaha kecil, terutama di tingkat pedesaan.

Modal yang telah terkumpul dengan sistem *cingkremen* sangat cocok ditumbuhkembangkan pada masyarakat dengan dominan bermata pencaharian sebagai petani. Penghasilan diterima sebagai petani tidak regular setiap hari, atau minggu bahkan bulanan. Petani dalam memperoleh pendapatan penuh dengan unsur ketidakpastian, sehingga mendapatkan bantuan modal sebagaimana pada tradisi *cingkremen* sangat cocok dan pas. Para petani dapat meminjam modal pada organisasi ini dan disebut *mutranin* tidak dibebani kewajiban membayar

bunga setiap bulan, sebagaimana dengan lembaga keuangan modern. Mereka diwajibkan membayar atau mengembalikan pinjaman modal setelah musim panen. Sistem ini betul-betul tidak memberatkan petani anggota *sekaa*, bahkan mereka dapat terhindar dari *cingkrem* tengkulak yang menyengsarakan petani atau pelaku ekonomi di tingkat pedesaan secara total.

Jadi sangat riil, peran dari sistem *cingkrem* sebagai salah satu sumber modal dalam menggerakkan ekonomi produktif masyarakat di tingkat pedesaan yang mana secara geografis berada jauh dari pusat-pusat lembaga keuangan modern. Pun mereka berada dekat dengan pusat-pusat lembaga keuangan, namun karena akses mereka sangat lemah, akibat dari berbagai keterbatasan dan kelemahan, seperti administrasi dan legalitas, maka mereka tetap tidak mudah mendapatkan bantuan modal.

Kelemahan seperti tersebut di atas, ditunjang lagi dengan kelemahan dalam membangun jaringan kerja sebagaimana dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi umat, yakni UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat (pokmas) adalah terletak pada kelemahan finansial atau modal. Kelemahan permodalan ini jelas-jelas disebabkan oleh lemah dalam mengakses sumber-sumber modal. Mencari sumber-sumber modal sangat sulit dirasakan oleh pengelola UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat. Pertanyaan adalah mengapa mereka lemah dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan untuk mendapatkan modal? Jawabannya adalah karena mereka memiliki beberapa kelemahan seperti berikut ini.

- a. Administrasi pada banyak UKM, koperasi, khususnya non-KUD dan kelompok masyarakat masih tertutup, tidak rapi, dan banyak kekurangan. Belum tersusun secara sistematis dan belum mengikuti kaidah-kaidah pembukuan yang disyaratkan oleh sumber modal sehingga dalam kondisi seperti itu sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Di samping administrasi lemah, mereka dipandang oleh sumber modal masih lemah dalam menyusun rencana usaha yang akan mereka kerjakan.

- c. Seperti telah diungkapkan bahwa jaminan yang dimiliki tidak ada. Kalaupun tersedia, nilai jaminan tidak sepadan dengan modal yang dibutuhkan, di samping ada pula bermasalah.
- d. Banyak UKM, tidak jelas badan hukum atas usaha yang mereka laksanakan. Hal ini juga mempersulit dalam mengakses modal.

3. Hambatan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Kreatif di Bali

Berbagai hambatan dihadapi dalam membangun kegiatan ekonomi produktif dan kreatif dalam masyarakat Bali, seperti pengembangan UKM, koperasi dan pokmas, ternyata tidak hanya persoalan modal saja. Mohamad Ikhsan (2004) memandang bahwa paling tidak ada enam hambatan, yakni sifat usaha *transitory* dan rumah tangga, produktivitas rendah, akses informasi rendah, sulit memperoleh input, gagal mengadopsi teknologi, dan faktor kelembagaan yang lemah. Kelemahan faktor kelembagaan ini menyebabkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat tergabung dalam UKM, koperasi dan pokmas sulit mengantisipasi ketidakpastian kebijakan, baik berkaitan dengan peningkatan biaya maupun sumber-sumber pembiayaan.

Di samping kendala internal seperti itu, faktor eksternal, yakni terkait dengan kepercayaan pemilik modal untuk menyalurkan modal kepada mereka. Kalau pun kelengkapan seperti tersebut di atas sudah dipenuhi, tetapi kepercayaan dari pihak pemodal tidak ada, maka relatif sulit mencari modal. Padahal kepercayaan adalah suatu variabel sangat abstrak dan sulit mengukur, namun demikian pemodal terkait dengan kepercayaan ini lebih memperhatikan keberadaan spirit kewirausahaan seseorang. Menurut Buchari Alma (2004) bahwa seorang wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Hal ini, tampaknya tidak disebutkan besar kecilnya suatu organisasi yang dibentuk, tetapi lebih ditekankan pada keberanian memulai suatu bisnis baru. Selanjutnya, menurut Griffin dan Ebert (1996) bahwa konsep kewirausahaan dan bisnis kecil sangat berhubungan erat dan banyak orang

yang terjun dalam bisnis kecil dan beranggapan bahwa mereka termasuk wirausahawan. Banyak faktor yang mendorong seseorang menjadi wirausaha, di antaranya pergaulan, dorongan keluarga dan sahabat. Kendatipun semua pihak menyadari dalam membangun usaha tidak selalu dapat berkembang sebagaimana diharapkan.

Keberlanjutan suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik, banyak faktor dapat menghambat. Faktor penghambat tersebut dapat berwujud dan tidak berwujud. Penghambat berwujud dapat dilihat karena memiliki bentuk, sedangkan tidak berwujud sulit dilihat, seperti jiwa wirausaha. Kendatipun jiwa wirausaha ini tidak berbentuk dan sulit dilihat, tetapi dapat diciptakan melalui proses pendidikan, baik formal maupun informal. Keberadaan jiwa kewirausahaan pada seseorang merupakan satu jalan mempermudah menggapai kesuksesan. Dalam pandangan Susilo Priyono dan Soerata (2005) bahwa ada beberapa faktor perlu diperhatikan dalam mencapai kesuksesan, seperti belajar dari orang sukses, jangan menunda pekerjaan, tingkatkan waktu kerja, kejelasan program kerja, optimistis, motivasi, ulet, dan disiplin. Faktor-faktor tersebut sangat relevan diperhatikan bila seseorang ingin mencapai keberhasilan dalam berusaha dan jika tidak memiliki kemauan dan kemampuan mengaplikasikan faktor-faktor tersebut di atas, kegagalan atau ketidaksuksesan sudah tidak dapat dihindarkan.

Begitu juga halnya dengan persoalan yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi produktif dan kreatif. Bilamana mereka tidak memiliki kemauan, kemampuan, dan keberanian untuk mengoperasionalkan faktor-faktor tersebut, sulit memberdayakan mereka. Pada kelompok masyarakat tertentu semangat kewirausahaan dan faktor-faktor pendorong keberhasilan tersebut di atas, tampak belum dapat dinyatakan telah tumbuh atau terbangun. Berbeda dengan UKM dan koperasi, keadaan seperti itu sudah terlihat dan mulai terbangun kendatipun masih perlu ditingkatkan dan diperlukan upaya untuk mendorong agar menjadi lebih bertumbuh. Dalam pemberdayaan, peningkatan semangat kewirausahaan patut

dibentuk terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan dana bergulir sebagai modal dan bantuan lain.

Semangat kewirausahaan dapat mendorong sikap optimis, inovatif, kreatif, positif, dan berani menanggung risiko. Kondisi tersebut belum ditemukan pada sebagian kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi, terutama di tingkat pedesaan sehingga pemberdayaan belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Hambatan lain dalam pemberdayaan ini adalah belum tertanam dan terintegrasi antara tradisi lokal dengan budaya industri dengan menempatkan waktu dan produktivitas sebagai bagian tidak terpisahkan dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi produktif.

4. Epilog

Ganjar Kurnia (1999) mengungkapkan masalah permodalan bagi usaha kecil, termasuk salah satu masalah penting dan perlu mendapatkan perhatian. Bahkan ketimpangan pembangunan ekonomi antarsektor selama ini disebabkan oleh ketimpangan alokasi kredit. Mungkin jadi, ketimpangan pembangunan ekonomi antarkota dengan desa, seperti di Bali ini, bisa saja disebabkan oleh ketimpangan aliran modal kepedesaan. Oleh karena itu, keberadaan sistem *cingkreman* sebagai salah satu wahana pemupukan modal pantas dan patut mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah.

Perhatian dan pembinaan pemerintah dalam hal ini, bukan berarti melanggengkan intervensi pemerintah terhadap aktivitas organisasi tradisional, tetapi lebih mengarah pada posisi sebagai motivator, fasilitator dan mediator. Boleh benar, spirit dari *cingkreman* ini dapat memperkuat kelembagaan keuangan tingkat lokal, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), koperasi dan lembaga lain yang memiliki fungsi sejenis.

Dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan Bali, sistem *cingkreman* telah diterapkan sejak lama oleh organisasi tradisional, jangan sampai terdelitasi oleh sistem baru. Bila memungkinkan dilakukan integrasi antara kaedah-kaedah

dalam sistem *cingkreman* ini dengan sistem baru yang telah banyak diadopsi dan diterapkan oleh organisasi modern kala ini. Satu hal mendasar dalam sistem *cingkreman* adalah loyalitas dan militansi anggota sangat tinggi. Di samping itu sesama anggota menunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan sehingga keterbatasan kondisi objektif Bali, baik dilihat dari aspek permodalan dan lain-lain tidak perlu menimbulkan kecemasan berlebihan, bilamana pembangunan kita, terutama pembangunan ekonomi mengadopsi dan mengadaptasikan kearifan lokal sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan, sebagaimana dengan mengambil makna *cingkreman* dalam memperkuat struktur permodalan Bali tempo dulu untuk diimplementasikan pada saat ini maupun nanti.

BAB VII

PAGEH, PUGUH LAN JENGAH

SUATU KONSEP MEMBANGUN

SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS

Rajin pangkal pandai dan hemat pangkal kaya. Semua orang hampir mengetahui makna pepatah tersebut. Begitu pula dalam tradisi masyarakat Bali. Barang siapa "pageh, puguh lan jengah" dalam hidup, cenderung berhasil. McClelland dalam "need for achievement theory" mengungkapkan bahwa siapa saja memiliki keinginan berprestasi, cenderung mencapai prestasi dan berhasil serta sukses dalam pelaksanaan.

1. Prolog

Dalam kamus bahasa Bali, *pageh* berarti tetap hati atau tetap setia (Kersten, 1984). Sementara itu, *puguh* berarti serius dan konsentrasi pada pekerjaan, tugas dan tanggungjawab, sedangkan *jengah* diartikan sebagai suatu kondisi mendorong orang untuk menimbulkan rasa malu, bila tidak berbuat sesuatu terhadap diri sendiri maupun orang lain atau masyarakat. Bila diselaraskan dengan pandangan masyarakat modern, maka istilah *pageh* berarti mencintai pekerjaan, tugas dan tanggungjawab dan *puguh* memiliki sepadan dengan etos kerja yang tinggi serta *jengah* itu bermakna sebagai tumbuh dan berkembang motivasi dalam diri seseorang untuk berfikir, berkata dan berbuat baik, sesuai dengan konsep *tri kaya parisudha*.

Dalam pandangan masyarakat tradisional Bali, apa yang disebut etos kerja tersebut telah tertanam sejak lama, disebut dengan *puguh*. Kata *puguh* bisa diartikan sebagai perilaku tidak pernah kenal menyerah dalam melakukan sesuatu bersifat, mengarah positif dan produktif. Dalam teori modern, etos kerja tinggi telah diyakini memiliki kecenderungan untuk berhasil dan mencapai prestasi. Dalam tradisi Bali hal itu telah berkembang

sejak lama. Bahwa petani sukses dan terbukti berhasil adalah bagi mereka yang bekerja dengan tekun atau *puguh* dan mencintai pekerjaan dengan serius disebut dengan *pageh*, apalagi didukung motivasi besar atau *jengah*.

Tumbuh rasa *jengah* dalam masyarakat Bali lebih diaktualisasikan dalam bentuk harga diri, seperti adanya rasa malu bila menganggur. Apalagi di sekitar mereka semua orang bekerja dan tidak membedakan jenis pekerjaan. Elitisme priyayi, yakni ditandai dengan memilih-milih pekerjaan telah di buang jauh-jauh oleh leluhur kita dan masyarakat petani tempo dulu. Mereka selalu fokus bekerja dengan dasar ketekunan, kemampuan dan keahlian masing-masing. Sebagai petani, mereka setia dan mencintai, bahkan bangga sebagai petani. Bersamaan dengan itu, pula mereka menekuni pekerjaan sebagai petani dengan spirit dan etos kerja tinggi. Petani tidak mengenal lelah, bila dihadapkan pada tantangan pekerjaan. Motivasi mereka sangat besar dan terbukti dimana saja para petani Bali bertransmigrasi selalu menjadi teladan dan contoh bagi penduduk setempat. Tidak jarang petani Bali di daerah transmigrasi sukses menghantarkan putra-putri untuk menempuh jenjang pendidikan yang mana sebelumnya tidak dibayangkan oleh mereka.

Bekerja bagi masyarakat Bali, khususnya Hindu adalah *yadnya, bhakti lan ngayah*. Bekerja berdasarkan *yadnya, bhakti lan ngayah* tidak selalu memperhitungkan aspek untung dan rugi. Oleh karena dalam tradisi Hindu di Bali telah dipercaya bahwa setiap kegiatan atau kerja yang dilakukan secara sungguh-sungguh sudah pasti mendatangkan hasil. Hukum *karmaphala* telah melekat dalam kehidupan masyarakat Bali dimana saja mereka bertempat tinggal dan telah dipercaya sebagai sebuah hukum sebab akibat dan sulit diabaikan atau diingkari. Dalam hukum *karmaphala* terkandung makna bahwa bagi siapa saja berbuat kebajikan pasti akan menerima hasil sesuai dengan perbuatan, begitu pula sebaliknya, bagi siapa saja berbuat kurang terpuji akan menerima risiko atas perbuatan tersebut.

Adanya rasa *jengah* juga dapat menjadi pendorong keberhasilan dalam mengembangkan ekonomi umat. Orang

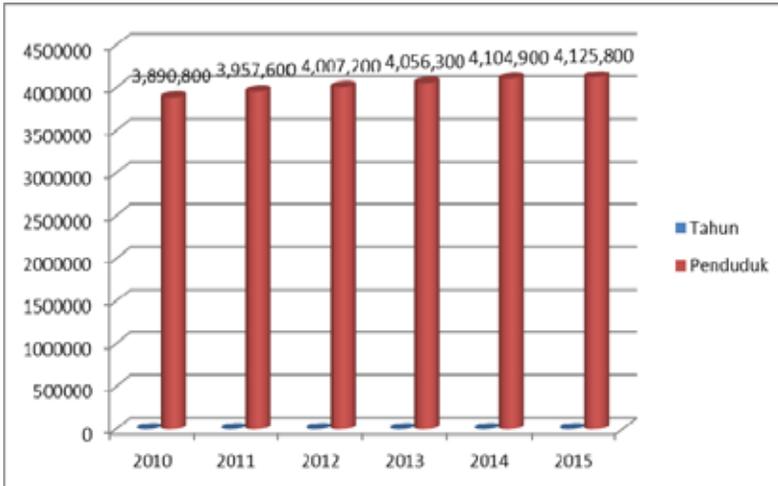
memiliki rasa *jengah*, cenderung produktif, percaya diri dan tidak berani berbuat untuk menyengsarakan orang lain, apalagi melakukan penipuan atau perbuatan tercela. Rasa *jengah* dapat memperkecil tindakan dan niat yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Namun, jika rasa *jengah* sudah tidak ada, maka orang dengan mudah dan berani melakukan perbuatan dengan menghalalkan segala cara. Menipu dan berbohong dianggap sebagai sesuatu perbuatan lazim dalam kehidupan mereka.

Disiplin kerja, semangat kerja dan produktivitas akan menurun secara pasti jika rasa *jengah* telah sirna. Oleh karena itu *pageh*, *puguh lan jengah* merupakan tiga kata saling berkaitan dan pantas dijadikan pegangan dan pedoman dalam melakukan usaha berbasis produktivitas dan kejujuran. Filosofi *puguh* sangat jelas terlihat dalam ekspresi para pengrajin tenun di Bali. Dengan mengacu pada slogan “sehari sehelai benang dan lama-lama menjadi selember kain”, membuat para pengrajin tidak pernah putus asa dalam merajut benang untuk dijadikan kain. Jadi, bagi mereka *pageh lan puguh*, tentu *tuyuh* dan dibalik semua itu, mereka mendapatkan kenikmatan dan bahkan pengakuan dari orang lain karena telah mengatualisasikan *pangeh*, *puguh lan rasa jengah* dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kualitas SDM Menentukan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi Bali

Pulau dengan penduduk jumlah besar dalam pembangunan diibaratkan seperti pisau bermata dua. Salah memegang pisau tersebut dapat menimbulkan luka, dan dilain sisi bilamana benar cara memegang dan memafaatkan, maka pisau tersebut akan bermakna, apalagi kedua sisi pisau tersebut memiliki ketajaman. Bila dua sisi pisau tersebut tumpul, maka membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk mengasah agar menjadi tajam. Bisa saja, pisau tersebut tidak berguna sama sekali, bahkan menimbulkan ekonomi biaya tinggi-*high cost economic*, manakala setelah diasah tidak semakin tajam, karena ternyata bahan baku pisau tersebut sangat jelek dan tidak bisa dibuat tajam sebagaimana diharapkan oleh pemilik pisau itu.

Gambar 04
Perkembangan Penduduk Bali
Tahun 2010–2015



Sumber : Data Bali Membangun, 2015

Perumpamaan tersebut menjadi sangat nyata, bila penduduk Pulau Bali yang saat ini telah mencapai 3 juta jiwa lebih, kalau tidak terkelola dengan baik, benar dan profesional. Secara teori penduduk besar dapat menjadi modal dasar pembangunan, namun sebaliknya penduduk besar dapat juga menjadi beban pembangunan. Menjadi modal pembangunan, manakala penduduk besar tersebut berkualitas dan produktif. Menjadi beban pembangunan kalau penduduk tidak berkualitas, lemah daya saing dan tidak memiliki *pageh, puguh lan jengah*.

Kata kunci masalah kependudukan adalah terletak pada manajemen kependudukan, kualitas penduduk dan spirit. Manajemen kependudukan kurang baik atau bobrok dan tidak profesional sulit mempetakan kualitas penduduk. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem administrasi kependudukan mudah, murah, aman dan cepat. Dapat akses oleh siapa saja yang membutuhkan. Teori kependudukan tersebut di atas, dapat menjadi realistis, bila penduduk besar itu berkualitas, terkelola dan memiliki spirit tinggi dan di Bali peran maksimal penduduk dalam pembangunan

ekonomi dapat diwujudkan melalui integrasi antara kualitas, manajemen dan spirit, seperti *pageh, puguh lan jengah*.

Episentrum dari penggerak pembangunan apapun dan dimanapun adalah manusia. Tidak ada teknologi secanggih apapun dapat dipergunakan menjadi penggerak utama, tanpa sentuhan manusia. Dapat dibayangkan, jika kualitas sumber daya manusia Bali sebanyak 3 juta jiwa lebih ini memiliki kualitas dan dilandasi atas spirit *pangeh, puguh lan jengah* dalam bekerja, tentu menimbulkan dampak progresif luar biasa terhadap pembangunan dan termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali. Mereka mampu mengisi semua peluang dan lini dalam berbagai jenjang pekerjaan, baik di tingkat lokal, nasional, regional bahkan internasional.

Sebagai contoh, pada sebuah desa di Bali, aktivitas ekonomi masyarakat semakin meningkat sejak sebagian orang-orang di desa tersebut keluar mencari pekerjaan. Sebagian pendapatan orang yang bekerja di luar desa tersebut, telah terbukti membangkitkan kegiatan ekonomi karena adanya perputaran uang. Lebih-lebih ketika sebagian orang bekerja di luar negeri, seperti di *cruise* atau dikenal dengan kapal pesiar. Setiap mereka pulang, membawa uang dalam jumlah tertentu dan dipergunakan untuk investasi atau perbaikan rumah dan sejenisnya. Tanpa sadar sebagian pendapatan orang tersebut telah memberikan *multiflier effect* terhadap tumbuh aktivitas ekonomi dan sebagai akibat terserap tenaga kerja dalam investasi atau perbaikan rumah tersebut.

Kualiatas SDM dimanapun mereka, telah terbukti secara nyata, mampu membangkitkan dan mendorong aktivitas ekonomi. Sumber daya manusia berkualitas, terkelola dan memiliki spirit serta ditandai dengan berbagai indikator telah menjadi tuntutan dunia saat ini. Tanda-tanda sumber daya manusia berkualitas secara tradisi adalah memiliki spirit sebagaimana telah diuraikan di atas. Sementara itu secara modern ditandai dengan kepemilikan profesionalisme dan beberapa indikator dari profesionalisme tersebut adalah seperti berikut ini.

- a. *Intelligence* (kecerdasan)
- b. *Supervisory ability* (mampu mengawasi)
- c. *Inisiative* (inisiatif)
- d. *Self assurance* (ketenangan diri)
- e. *Individuality* (kepribadian)
- f. *Fair* (adil)
- g. *Skill* (keahlian)
- h. *Perspective* (pandangan)
- i. *Integraty* (jujur/integritas)
- j. *Imagination* – daya hayal
- k. *Optimism* – optimisme

Bilamana kualitas penduduk kita memenuhi kriteria seperti yang disajikan di atas, katakan sebesar 30% saja dari jumlah penduduk, maka tersedia sumber daya manusia andalan sebagai modal pembangunan berdaya saing dan bernilai tinggi. Lihat saja, negara terangga kita Singapura, mereka memiliki luas wilayah 1/6 dari wilayah Bali, tetapi mengapa tingkat kesejahteraan rakyat lebih baik, dibandingkan dengan rakyat Bali? Jawaban ada pada kualitas SDM. Jadi maju, stagnasi atau bahkan bangkrut ekonomi kita sangat ditentukan oleh kualitas penduduk Bali. Oleh karena itu, merevitalisasi kearifan lokal kita untuk dijadikan pedoman, dasar, spirit dan roh memperbaiki kualitas penduduk, sehingga terbangun suatu sumber daya manusia mampu bersaing dalam segala jenjang, baru bisa mengantarkan Bali menuju suatu kemandirian dan *jagadhita*, sebagaimana Singapura

3. Strategi Pembangun SDM Berkualitas

Sumber daya manusia adalah motor penggerak pembangunan. Tohardi (2002) memberikan makna sumber daya manusia segala potensi yang ada pada manusia, baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri atau individu maupun untuk kepentingan bersama dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dilihat dari posisi dan peran sumber daya manusia dalam pembangunan, seperti pembangunan ekonomi bagi suatu

daerah dapat dilihat dalam tiga posisi dan peran.

Pertama adalah posisi dan peran sebagai manusia yang bekerja pada lingkungan tertentu, *kedua* adalah sebagai manusia yang berposisi dan berperan sebagai penggerak organisasi untuk mewujudkan keberadaanya. Posisi seperti itu lebih tertuju pada peran sebagai pemimpin, motivator, komunikator, dinamisator, fasilitator bahkan mediator. *Ketiga* adalah sebagai kekayaan atau aset yang nilainya tidak dapat dihitung sebagaimana dengan modal. Bahkan pada posisi dan peran sebagai aset suatu organisasi, maka sumber daya manusia dapat menjadi faktor penentu dalam menghantarkan pencapaian tujuan organisasi maupun tujuan pembangunan, seperti pembangunan ekonomi di Bali.

Begitu bermakna posisi dan peran sumber daya manusia berkualitas dalam menopang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, bangsa maju dan unggul dalam mengantarkan rakyat menuju kepada kehidupan sejahtera dan berkeadilan diawali dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai strategi. Secara sederhana strategi dapat diartikan sebagai sesuatu cara, teknik, pendekatan dan metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka strategi membangun sumber daya manusia Bali agar berkualitas dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan akademis dan pendekatan profesional. Salah satu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan akademis adalah melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan formal. Sedangkan pendekatan profesional dapat dilakukan melalui pendidikan informal, khususnya pada program pelatihan dan magang.

Melalui jalur pendidikan formal, sumber daya manusia diarahkan untuk memahami pengetahuan umum, kecakapan manajerial, kepandaian, ketegasan dan kelugasan sikap serta memiliki kelakuan dan perilaku berpijak pada moral dan agama. Sebaliknya, melalui pendekatan yang profesional dengan pola pelatihan dan magang, sumber daya manusia dimantapkan

untuk memahami dan mendalami berbagai kemampuan dan keterampilan, seperti (1) *human skill*, (2) *design skill*, (3) *technical skill*, (4) *soft skill* dan (5) *conceptual skill*. (Lihat Koontz dan Weihrich, 1990)

Bali sebagai suatu daerah dengan basis ekonomi adalah pariwisata, membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, bila tidak ingin penduduk Bali hanya menjadi penonton dalam gemerlap pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata. Mengapa banyak orang luar (pendatang) dengan datang tanpa modal, dapat hidup dan menjadi wirausaha tangguh di Bali. Sementara itu, penduduk lokal Bali, didukung dengan modal cukup, harus menjadi penonton. Terutama dalam pemanfaatan peluang usaha-usaha di sektor informal. Apa yang salah dalam pembangunan sumber daya manusia kita?

Banyak pendapat dan pandangan bahwa sebetulnya manusia Bali, sebagian besar belum siap menghadapi lompatan pergeseran struktur ekonomi dari dominasi sektor primer dan berlompat menjadi dominasi sektor tersier, terutama perkembangan dasyat industri pariwisata. Sebagian penduduk Bali belum dapat secara tuntas keluar dan menerima perubahan secara kultural ini, yakni mengubah *mindset* dari budaya agraris menuju budaya industri. Hal ini diduga disebabkan oleh dua faktor, yakni (1) masyarakat Bali telah terlalu lama, bahkan beratus-ratus tahun, secara turun-tumurun telah hidup dalam lingkaran budaya agraris, sehingga sulit keluar dan terlepas secara tiba-tiba dan (2) masuknya budaya industri yang terlalu cepat, secepat pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata, sehingga sebagian besar manusia Bali mengalami semacam *shock culture* atau kekegetan budaya. Kekegetan budaya bisa saja terjadi, karena pergerakan dan pergeseran struktur ekonomi Bali berjalan tidak lazim, sebagaimana pergerakan struktur ekonomi sebagian besar negara maju di dunia.

Kendatipun fenomena itu benar atau salah, kita tidak boleh terbelenggu begitu saja. Bila kita sepakat Bali adalah menjadi sebuah pulau hidup sepanjang zaman, tentu kita semua harus berbuat dan berbenah secara sistematis, terutama di bidang

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, strategi pembangunan Bali ke depan tidak boleh napak tilas dan stagnasi, yakni bertumpu dan berkutat pada tiga sektor, yakni sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier saja. Tetapi Bali harus mampu mengembangkan pembangunan dan didukung dengan empat (4) sektor dan sektor keempat itu adalah “**sektor kuartar**”, yakni suatu sektor pembangunan yang memfokuskan dan terpusat pada pembangunan sumber daya manusia.

4. Epilog

McClelland dalam *need for achievement theory*, menyatakan bahwa keberhasilan (kesuksesan) seseorang sangat ditentukan oleh adanya keinginan besar seseorang untuk mencapai prestasi dan biasanya dorongan besar tersebut diikuti dengan sukses dalam pelaksanaan. Dorongan besar itu, dalam tradisi Bali identik dengan hakikat dan roh dalam kearifan lokal, seperti *pageh, puguh lan jengah*. Hal ini berarti, tanpa kita sadari tetua atau leluhur Bali, telah memiliki yang diteorikan oleh McClelland.

Sebagaimana pepatah telah terbiasa kita dengar dalam keseharian, yakni rajin pangkal pandai dan hemat pangkal kaya adalah sejalan juga dengan hakikat terkandung dalam tiga rangkaian kata dalam tradisi masyarakat Bali, yakni *pageh, puguh lan jengah*. Dalam perspektif pembangunan pertanian, petani Bali telah terbukti berhasil menjadi petani dimana saja mereka bertani. Ketika masyarakat Bali dianjurkan oleh pemerintah untuk bertransmigrasi, maka sebagian besar tata cara, metode dan teknik bertani di wilayah transmigrasi dijadikan sebagai contoh oleh penduduk lokal. Ada sebuah cerita diungkapkan oleh mantan transmigrasi di Provinsi Timor-Timur. Tat kala masih menjadi wilayah NKRI adalah ketakjuban masyarakat lokal terhadap tata cara masyarakat Bali mengelola lahan pertanian. Berbagai pendekatan dan tata cara bertani dipergunakan petani asal Bali menjadi tontonan menarik masyarakat lokal Timtim kala itu.

Sebagai contoh saja, ketika petani asal Bali membangun organisasi tradisional, seperti subak dan mereka membuat

saluran irigasi bersama-sama, termasuk mengerjakan sawah secara bersama-sama dengan sistem kerja teratur dan terukur, masyarakat lokal terperangah. Apalagi melihat teknismengerjakan sawah dengan menggunakan binatang untuk membajak sawah, mereka terkaget-kaget. Mengapa mereka terbengong-bengong? Karena hasil bajakan sawah itu, sangat bagus dengan disertai sistem tera siring terlihat sangat indah dan tidak selama ini dijumpai oleh masyarakat lokal.

Di samping itu, konsep *pageh, puguh lan jengah* sebagaimana telah dijelaskan di atas, benar-benar diimplementasikan oleh para transmigran Bali dalam mengolah lahan pertanian mereka. Sebagai indikasi adalah petani Bali tidak pernah mengeluh menerima kenyataan lahan pertanian yang didapat berbeda dengan lahannya di Bali. Mereka menerapkan pola dan sistem kerja serta sistem tanam disesuaikan dengan kondisi geografis Timor-Timur. Mereka paham bahwa cuaca di siang hari jauh lebih panas di Timor-Timur pada jam sama, dibandingkan dengan cuaca di Bali. Oleh karena itu, strategi sistem kerja diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi kendala dalam menjalankan pekerjaan sebagai petani.

Petani di Bali biasa memulai bekerja sebagai petani di pagi hari adalah rata-rata antara jam 6.00 atau jam 7.00 wita dan kembali ke rumah rata-rata jam 10.00 atau jam 11.00 wita. Tetapi karena cuaca di Timor-Timur jam 9.00 wita sudah sama panasnya dengan jam 11.00 wita waktu Bali, maka mereka memajukan memulai bekerja di pagi hari. Waktu mulai kerja bertani di pagi hari adalah jam 4.30 atau jam 5.00 wita, sehingga jam 9.00 wita mereka sudah istirahat. Begitu pula jam kerja untuk sore hari disesuaikan dengan kondisi lokal.

Pola kerja petani Bali, seperti tumpang sari dan sejenis tidak lupa juga dilandasi dan diterapkan dengan dasar *pageh, puguh lan jengah*. Pekerjaan sambilanpun mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi pendapatan pendamping untuk menambah pendapatan utama keluarga mereka. Tatkala waktu istirahat karena udara panas di siang hari, tidak penuh untuk istirahat, tetapi dimanfaatkan untuk membuat beberapa

keperluan sarana prasarana produksi, seperti menganyam atau memperbaiki alat-alat produksi pertanian yang rusak atau patut mendapatkan perbaikan. Jadi pemanfaatan waktu, ruang, tenaga dan faktor produksi dan lain-lain benar-benar fungsional, sehingga secara realitas tidak sedikit putra-putri Bali bertransmigrasi berhasil dan sukses atau minimal mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka, seperti sandang, pangan dan papan. Terbukti, sangat kecil angka transmigran putra-putri Bali balik kandang karena tidak berhasil di lahan harapan baru tersebut. Ini karena mereka *pageh*, yakni setia dan cinta terhadap pekerjaan dan mereka *puguh*, yakni memiliki etos kerja serta memiliki rasa *jengah*, yakni malu balik kembali sebelum menunjukkan keberhasilan. Apalagi keterlanjuran mengikuti program transmigrasi adalah bukan semata-mata memperbaiki struktur pendapatan keluarga, tetapi lebih dari itu adalah bagian dari agenda menjalankan dharma negara berdasarkan dharma agama.

BAB VIII ASTA BRATA SEBAGAI PEDOMAN PEMIMPIN MEMBANGUN EKONOMI JAGADHITA

Pemimpin adalah orang yang mampu mengajak orang lain, bekerjasama dalam rangka mewujudkan tujuan. Seorang pemimpin berhasil dalam menjalankan tugas, tidak hanya mampu mempengaruhi bawahan bekerja keras, tetapi juga mampu bekerja cerdas. Ini adalah pemimpin yang memiliki landasan dan kejelasan konsep dalam menjalankan tugas, baik secara manajerial dan teknis. Dalam tradisi masyarakat (Hindu) Bali landasan dan kejelasan konsep seorang pemimpin termuat dalam “asta brata”.

1. Prolog

Kepemimpinan merupakan unsur penting dan strategis dalam organisasi, baik organisasi formal, informal atau organisasi dengan ruang lingkup kecil, sedang maupun besar. Maxweel (2001) memberikan hakikat kepemimpinan ialah pengaruh, sedangkan Rivai (2002) menekankan pemaknaan kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi semua kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh bawahan dalam organisasi atau kelompok. Masih banyak lagi para pakar di bidang kepemimpinan memberikan arti, makna dan hakikat, namun semua itu, sesungguhnya tidak ada perbedaan terlalu signifikan.

Secara sederhana konsep kepemimpinan dapat dipandang sebagai suatu kemampuan, kesungguhan dan kesediaan serta kesiapan seseorang untuk secara proporsional dan profesional membimbing, mendorong dan mengarahkan, termasuk mengelola orang lain, agar mereka mau, mampu dan berani untuk melakukan pekerjaan sehingga apa yang menjadi tujuan bersama tercapai sesuai rencana. Petaka bagi seorang

pemimpin dengan memahami dan menjunjung tinggi filosofi kepemimpinan, tetapi mengarahkan orang lain untuk berbuat dan bekerja menyimpang dari agenda yang disepakati bersama. Biasanya membedakan kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah gaya kepemimpinan. Pemimpin mengadopsi dan mengadaptasikan gaya tersebut sesuai dengan karakter masing-masing dan acapkali disesuaikan dengan kultur organisasi (lihat Thoha:2003, Robbin:1996, Meredith:1989, Kartono: 1994).

Esensi dasar menjadi seorang pemimpin adalah terletak pada ada atau tidak jiwa kepemimpinan. Dalam tradisi umum, baik di ranah tradisi maupun ranah modern ada atau tidak jiwa kepemimpinan pada seorang pimpinan dapat diukur dari 3 (tiga) indikator dan sekaligus menjadi kekuatan. *Pertama* adalah kemauan. Sehebat apapun seorang pemimpin, bila tidak memiliki dorongan kuat datang dari internal untuk menjadi pemimpin, maka dia tidak akan mampu mempengaruhi orang lain, karena mempengaruhi atau mengendalikan diri sendiri saja tidak mampu. Refleksi pemimpin tidak memiliki kemauan tinggi adalah malas dan sering mengingkari komitmen yang dibuat sendiri. *There is will, there is way*, dimana ada kemauan, tentu ada jalan. Slogan itu bukan lagi hanya wacana yang sulit dioperasionalkan, tetapi sangat mudah diterapkan oleh siapa saja yang memiliki kemauan untuk maju, berkembang dan mewujudkan cita-cita mereka.

Kedua adalah kemampuan. Seseorang pemimpin memiliki kemampuan dalam memimpin dapat dilihat dari sejauh mana dia dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengedepankan produktivitas. Pemimpin seperti itu, ditandai oleh beberapa indikator, seperti (a) memiliki pengetahuan umum dan luas, (b) adaptabilitas, (c) flaksibilitas, (d) orientasi masa depan-visioner, (f) ketegasan, (g) antisipatif, (h) memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif. Bahkan ditambah lagi dengan kepemilikan keterampilan, seperti (a) *managerial skill*, (b) *technical skill*, (c) *soft skill*, (d) *human skill*, (e) *design skill* dan (f) *conceptual skill*. (Lihat, Koontz dan Weihrich, 1990; Siagian, 2003; Timpe, 1991).

Kekuatan *ketiga* adalah keberanian. Pemimpin dimana-pun memimpin harus berani mengambil risiko dan bertanggung jawab secara penuh tentang apa saja yang telah menjadi wilayah tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Pemimpin dengan keberanian mengambil risiko, sangat diidolakan dan dibutuhkan oleh masyarakat kekinian dan di masa datang, termasuk oleh masyarakat Bali. Sudah tentu, pemimpin seperti itu, dalam mengambil suatu kebijakan tidak gegabah, sembarangan, sembrono, apalagi bermodalkan nekat. Keberanian mengambil risiko dan sekaligus bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan telah didasari atas logika, telaah, kajian dan argumentasi rasional dan berjalan dalam koridor hukum, sehingga memberikan kontribusi, berdampak ikutan positif, dan progresif terhadap masyarakat.

Dasar-dasar kepemimpinan dengan tiga kekuatan tersebut dan selalu membuat kebijakan sebagai acuan dalam membuat program dengan mengutamakan asas manfaat dan keadilan bagi orang banyak, tentu sejalan dengan semangat yang terkandung dalam kepemimpinan *asta brata*. Secara umum ciri-ciri kepemimpinan *astra brata* meliputi; (a) *indra brata*, (b) *yama brata*, (c) *surya brata*, (d) *candra brata*, (e) *bayu brata*, (f) *baruna brata*, (g) *kwera brata*, dan (h) *agni brata*. Semua unsur kepemimpinan *asta brata* dijabarkan dalam bagian berikut ini.

2. Konsep Kepemimpinan *Asta Brata*

Asta berarti 8 (delapan) dan *brata* berarti pantang, setia, tegar dan teguh. Secara singkat dan sederhana kepemimpinan *astra brata* dapat diberikan makna sebagai delapan bentuk sikap dasar pantang menyerah, tegas dalam melaksanakan aturan, tegar menghadapi berbagai hambatan, tantangan maupun ancaman, teguh dalam pendirian dan setia terhadap jabatan beserta atribut-atributnya. Jadi bentuk sikap dasar tersebut sangat sesuai dengan kriteria sebagaimana telah diuraikan dalam teori kepemimpinan modern selama ini.

Peradaban masyarakat lokal, seperti kepemimpinan tradisional, tidak tertinggal di tengah-tengah kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Banyak kearifan lokal kita, masih relevan dan sejalan dengan peradaban manusia modern, termasuk perkembangan pengetahuan dan teori-teori modern. Hanya saja kelemahan kita adalah terletak pada menorehkan dalam bentuk karya tulis dan apa yang telah kita miliki, seiring dengan perjalanan waktu dibungkus dan terpendam sehingga kita, cepat-cepat mengatakan usang dan mengadopsi serta membanggakan segala sesuatu beraroma impor.

Bagi masyarakat Bali, realitas seperti ini tak terbantahkan. Coba saja lihat dan perhatikan secara seksama tentang pengobatan tradisional disebut dengan *usadha*. Bali, jauh tertinggal dengan negara lain, seperti Cina. Negeri Cina, betul dan serius mencatat dan membukukan sistem pengobatan tradisional, sehingga produk obat-obatan telah menjadi suatu komoditas bernilai ekonomis tinggi dan telah mendunia. Kita sebagai masyarakat lokal Bali, telah punya itu sebagai warisan yang tidak kita manfaatkan, bahkan terkesan sudah mulai memudar, sehingga lebih mengutamakan obat-obat modern atau memanfaatkan obat tradisioal dari Cina. Jadilah kita sebagai bangsa konsumen, padahal kita mempunyai potensi itu.

Dalam perspektif kepemimpinan, realitas kehidupan kita telah mengalami nasib tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diceritakan tentang obat tradisional tersebut di atas. Kita punya konsep, walaupun belum kita akui sebagai teori, sebagaimana teori kepemimpinan modern, yakni kepemimpinan *asta brata*. Masih ada lagi kepemimpinan menurut sifat dasar Hindu, yakni (a) *juana wisesa budha*, yakni pemimpin yang memiliki ilmu tinggi & luhur, (b) *kaprahahitaning praja*, yakni pemimpin yang memiliki rasa belas dan kasihan kepada rakyat, (c) *kawiryanyan*, yakni pemimpin yang berani menegakkan kebenaran dan (d) *wibawa*, yaitu seorang pemimpin yang memiliki wibawa. Begitu pula kepemimpinan menurut tradisi Jawa, seperti (a) *ing arsa asung tulada*, (b) *ing madya mangun karsa* dan (c) *tut wuri handayani*.

Satu kekurangan kita, walaupun kita tidak akui sebagai kelemahan dalam konteks ini adalah belum secara nyata berani mengakui bahwa kita memiliki konsep kepemimpinan dan kita

deklir bahwa konsep itu telah kita terapkan dalam berbagai tingkatan kepemimpinan di Indonesia, khususnya Bali. Kita masih membangga-banggakan teori kepemimpinan modern dengan segala gaya dan tipe. Dan inilah menjadi inspirasi pendorong penerbitan terhadap buku ini.

a. Indra Brata

Tingkah laku dan keperibadian seorang pemimpin dengan menjunjung dan mengusung nilai *indra brata* adalah ditandai dengan sifat-sifat dan perilaku pengutamaan pada keadilan dan bijaksana dalam memimpin. Keadilan dalam memimpin diimplementasikan dalam bentuk memberikan dan membebani tugas pokok, fungsi dan kewenangan kepada bawahan tidak berdasarkan suka dan tidak suka, *like and dislike*. Termasuk dalam memberikan imbalan seperti gaji, insentif finansial dan insentif nonfinansial atau kenaikan pangkat. Begitu pula dalam mengangkat seseorang dalam jabatan. Diberikan berdasarkan prestasi kerja, bukan karena kedekatan sebagaimana dalam istilah asing disebut sebagai *on the right man, on the right place*.

Begitu pula dengan makna bijaksana. Salah satu ciri pemimpin seperti ini adalah tidak pernah menyalahkan bawahan tanpa kejelasan sebab. Dia tahu betul kapan marah dan kapan memberikan motivasi kepada bawahan. Setiap menemui kesalahan selalu mengedepankan perbaikan, bimbingan dan memberikan solusi. Sebab dia paham, siapa saja bisa marah dan siapa saja bisa menyalahkan, tetapi sebagai seseorang bijaksana, bukan hanya tahu seperti itu saja, unsur edukasi dan persuasi dikedepankan dan penyelesaian masalah menjadi prioritas pertama dan utama.

b. Yama Brata

Prinsip kepemimpinan dengan asas *yama brata* adalah menghukum sesuai dengan tingkat kesalahan. Kesalahan bawahan dipelajari dan dikaji secara seksama dan terukur, tidak gelap mata, apalagi membabi buta. Bagi mereka yang salah pasti mendapatkan ganjaran atau *punishment* sesuai dengan tingkat

kesalahan. Pemimpin dengan tipologi seperti ini, menempatkan segala bentuk hukuman lebih diarahkan dan ditekankan pada unsur mendidik, sehingga tidak menghambat dan mematikan karir, apalagi mematikan nasib bawahan.

Memberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan adalah suatu kewajiban bagi sebagai seorang pemimpin. Bila seorang pemimpin tidak memberikan hukuman kepada bawahan yang melakukan kesalahan, justru dianggap tidak mampu sebagai pemimpin dan melanggar etika dan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, jadilah pemimpin yang tahu betul tentang hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajiban bawahan, diri sendiri maupun pemilik.

c. Surya Brata

Sang surya atau istilah populernya matahari tidak pernah membeda-bedakan dalam membagi sinar atau menyinari segala isi jagat raya ini. Biarpun itu kotoran, apakah itu emas, perak dan intan, bahkan apakah itu manusia baik, penjahat, pejabat dan lain-lain selalu diberikan sinar yang sama. Semua sinar itu ditujukan secara adil untuk kehidupan. Bahkan kotoran, bangkai dan termasuk sampah organik disinari dan diubah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupan organisme lain.

Dapat kita bayangkan, bila seorang pemimpin dalam suatu organisasi berperilaku sebagai *surya brata*. Bawahan yang membandel, malas, tidak disiplin dan kurang bertanggungjawab, takut risiko, menunggu perintah sebagaimana oleh McGregor dikelompokkan sebagai penganut teori X, dalam teori X dan teori Y, tentu tidak dipasrahkan begitu saja. Pemimpin seperti ini akan selalu berusaha untuk membina, mengembangkan dan menambah pengetahuan manajerial dan teknis bawahan berdasarkan pengalaman, baik yang didapat dalam pendidikan formal, pelatihan maupun pengalaman pendidikan nonformal. Ia selalu termotivasi dan antusias mengembangkan kecakapan bawahan, karena ia tahu bahwa sepintar-pintar manusia butuh bantuan orang lain dan tidak bisa bekerja sendiri.

Pun dengan melakukan berbagai upaya masih ditemukan bawahan seperti itu, mereka akan diberikan beban sesuai dengan tingkat kecakapan, sehingga kenyamanan suasana kerja tetap terjalin dengan harmonis, sebagaimana matahari membagi sinarnya terhadap seluruh kehidupan di bumi ini. Sementara itu, bagi bawahan yang berprestasi tinggi dan responsif diberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi dan perhatian pimpinan terhadap bawahan.

d. Candra Brata

Pemimpin dalam suatu organisasi yang menerapkan prinsip *candra brata* adalah menekankan pada hiburan dan ketenangan. Seluruh keluarga dalam organisasi dibangun suatu nuansa dan kultur berdasarkan pada hiburan dan ketenangan. Oleh karena dengan hiburan bawahan akan terhindar dari kejenuhan, kelelahan, kejenuhan kerja yang semua itu dapat bermuara pada depresi dan bahkan konflik. Kejenuhan, kelelahan dan sejenisnya dapat menurunkan produktivitas organisasi dan turunnya produktivitas dapat membawa berbagai macam risiko, seperti terganggunya aliran kas-*cash flow* organisasi dan buruknya kinerja organisasi.

Begitu pula membangun ketenangan. Orang-orang yang bekerja dengan tenang, cenderung menghasilkan produktivitas tinggi dan produk yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Bagi pemimpin produktivitas tinggi dari bawahan dan kualitas produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas, tentu merupakan indikator keberhasilan dalam memimpin. Siapa yang tidak senang, jika terbukti berhasil menjadi pemimpin. Bukan hanya senang saja, tetapi memiliki nilai tersendiri dalam suatu kehidupan, karena telah mampu mengantarkan organisasi mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui sebuah kerjasama secara bersama-sama dengan seluruh kekuatan dan sumber daya organisasi tanpa tercela.

Adapun cara-cara yang dapat dilakukan memberi hiburan dan ketenangan adalah dengan mengajak bawahan *refreshing*, membangun kebersamaan, kekerabatan, solidaritas,

soliditas, dan dalam tradisi Bali disebut *sagilik saguluk sabayan taka*. Mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan selalu bergotong royong dalam menyelesaikan masalah yang membutuhkan kebersamaan. Jangan gotong bohong, atau *ngotong ngoyong* alias diam di tempat (tanpa berbuat sesuatu).

e. Bayu Brata

Esensi kepemimpinan mengadopsi nilai-nilai *bayu brata* adalah suatu sikap yang mana seorang pemimpin mampu membuat bawahan berada dalam posisi tenteram dalam melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaannya. Menjadikan bawahan merasakan ketenteraman dalam bekerja merupakan bagian dari tugas pemimpin yang cukup berat. Oleh karena indikator mengukur ketenteraman bawahan cenderung relatif. Lain halnya dengan kesejahteraan, sebagaimana dengan kesejahteraan penduduk pada umumnya yang dapat diukur dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan daya beli.

Ketenteraman lebih berorientasi pada kenyamanan kerja dan ketenangan kerja. Biasanya kenyamanan dan ketenangan kerja timbul disebabkan oleh faktor lingkungan fisik maupun lingkungan nonfisik. Lingkungan fisik seperti, tata letak sarana dan prasarana kantor atau pabrik, penerangan, kondisi dan sirkulasi udara, termasuk mesin pendingin atau AC. Sedangkan lingkungan nonfisik meliputi; suasana kerja yang kondusif, kerjasama, komunikasi dan koordinasi serta tingkat dan frekuensi konflik.

Konflik yang terjadi dalam organisasi, baik bersifat vertikal maupun horizontal merupakan suatu indikator tidak tercipta dan terbangun suatu kondisi tenteram dalam organisasi tersebut. Pemimpin demikian, tidak akan mampu membawa dan membangun organisasi yang progresif, unggul, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Sebab tingkat kepercayaan bawahan terhadap pemimpin semakin menurun dan pada titik tertentu konflik yang tidak sehat menjadi bom waktu.

Fakta menunjukkan tidak ada organisasi yang terbebas dari konflik. Mungkin yang membedakan antara konflik pada organisasi tertentu dengan organisasi lain, hanya terletak pada skala, cakupan dan intensitas konflik. Tatkala konflik dapat dikelola dengan cara-cara baik, benar dan betul oleh seorang pemimpin, maka konflik di antara bawahan acapkali dapat menjadi alat pengawasan internal. Ada kala dan saat konflik dalam suatu organisasi dimunculkan dan kemudian dikelola dengan pendekatan manajerial, sehingga muncul istilah manajemen konflik.

f. Baruna Brata

Pemimpin yang selalu hati-hati, cermat dan waspada dalam mempengaruhi dan mengajak bawahan melakukan aktivitas untuk mewujudkan tujuan organisasi adalah perwujudan dari implementasi nilai-nilai *baruna brata* dalam kepemimpinan *asta brata*. Pemimpin seperti itu, selalu dalam mengarahkan dan mengajak bawahan maupun dalam membuat dan merumuskan kebijakan selalu mempertimbangkan aspek resiko, sehingga menjadi penuh pertimbangan dan kewaspadaan sebelum mengambil keputusan.

Dalam organisasi bisnis, pemimpin dengan karakter seperti ini, dalam mengambil keputusan hal mendasar yang diperhatikan dan dipertimbangkan adalah dua hal utama, yakni (a) manfaat atau pendapatan dan, (b) biaya atau pengeluaran. Berapa besar biaya dan berapa besar manfaat atau pendapatan yang diterima dianalisis dengan cermat, hati-hati dan waspada. Berbeda dengan organisasi sosial. Kewaspadaan dalam organisasi sosial lebih menekankan pada aspek dampak negatif dan dampak positif mungkin ditimbulkan dari suatu kebijakan yang telah diputuskan oleh seorang pemimpin.

Jadi, begitu penting dan strategis arti dan manfaat dari sikap kewaspadaan dalam diri seorang pemimpin. Oleh karena itu, kemampuan seorang pemimpin terus menerus mendapatkan ujian dan seberat apapun ujian bagi seorang pemimpin akan dapat dilewati, jika pemimpin itu berkualitas. Ciri seorang pemimpin berkualitas adalah terletak pada pengambilan keputusan dan

bagaimana mengoperasional keputusan tersebut secara tepat guna dan berhasil guna.

g. Kwera Brata (kemakmuran)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya mampu membuat bawahan sebatas tenteram bekerja. Tetapi lebih dari itu adalah harus mampu mengantarkan bawahan untuk menjadi lebih sejahtera dalam bentuk mendapatkan kemakmuran. Seperti menjadi pemimpin di Bali, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi harus mampu membangun masyarakat untuk mencapai kemakmuran. Istilah dalam tradisi Jawa disebut *gemah ripah loh jinawi*. Kemakmuran bisa diukur dari terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni sandang, pangan dan papan dan ditambah dengan kemampuan pemimpin untuk memberikan subsidi kepada pengangguran.

Kalau pemimpin hanya baru sebatas memberikan atau memenuhi hak dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar tersebut, itu belum disebut mampu memberikan kemakmuran kepada rakyat. Contoh saja, suatu negara disebut makmur adalah bila negara tersebut mampu memberikan subsidi kepada pengangguran, sehingga tidak ada rakyat miskin, karena menganggur atau tidak bekerja. Jadi dengan demikian, negara kita belum memiliki pemimpin yang memenuhi unsur *kwera brata*, yakni mampu mengantar rakyat atau bawahan menggapai kemakmuran.

h. Agni Brata

Posisi dan peran pemimpin sangat strategis dalam menggerakkan suatu organisasi. Posisi pemimpin yang menganut nilai-nilai dalam *agni brata* dapat berada di belakang, di tengah dan di depan. Bila mengambil posisi di belakang, peran seorang pemimpin adalah sebagai regulator dan fasilitator. Peran sebagai regulator dan fasilitator ini adalah tiada lain untuk mempercepat laju pergerakan organisasi mencapai tujuan dan tidak melanggar aturan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sementara itu, tatkala posisi seorang pemimpin berada di tengah-tengah, maka ia harus menjadi motivator dan mediator untuk membangkitkan kebersamaan dan solidaritas serta profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi. Semua instrumen organisasi ditumbuhkembangkan melalui berbagai cara dan pendekatan, sehingga menjadi bersemangat dan produktif dengan menggelorakan semangat pantang menyerah dan maju terus sesuai dengan visi dan misi yang diemban oleh pemimpin dan organisasi. Jadi membangkitkan partisipasi merupakan salah satu posisi strategis pemimpin berada di tengah-tengah.

Jika posisi pemimpin berada paling depan, peran yang dilakukan adalah menjadi inisiator dan promotor. Sebab tanpa pemimpin memiliki daya tarik tertentu, maka tidak akan mampu menarik dan mengajak bawahan untuk maju mengatualisasikan sasaran yang ingin diwujudkan-nyatakan. Pemimpin harus memiliki daya dobrak dan spirit tinggi, sehingga seorang pemimpin membutuhkan dan dituntut memiliki kecemerlangan berfikir, kesehatan fisik yang prima dan inovatif, kreatif dan memberi contoh bekerja keras dengan cara kerja cerdas. Itulah sebutan seorang pemimpin menjadi panutan, berperilaku progresif dan bersikap berdasarkan *agni brata*.

3. Pemimpin dan Pembangunan Ekonomi Jagadhita

Posisi dan peran pemimpin dalam pembangunan sangat strategis dan sentral. Seorang pemimpin tidak hanya menempati posisi di depan, tetapi bisa di tengah, bahkan di belakang. Di depan pemimpin adalah seperti seorang derigen dan menjadi lokomotif pembangunan, sehingga mampu memanfaatkan, menyatukan dan menarik seluruh potensi untuk maju bersama mewujudkan tujuan pembangunan. Pemimpin pada posisi seperti ini, tidak hanya membutuhkan dukungan kekuatan fisik secara prima, tetapi dituntut dan diwajibkan memiliki kemampuan manajerial, teknis dan visioner, sehingga cermat dan cerdas mengidentifikasi hambatan, tantangan dan masalah yang mungkin akan terjadi di masa datang. Setelah mengidentifikasi berbagai masalah

secara terstruktur dan sistemik, kemudian berkemampuan mempersiapkan berbagai alternatif solusi dan mengawal serta menghantarkan agenda pembangunan sebagaimana diharapkan oleh pengikut atau masyarakat.

Posisi pemimpin di depan sangat berat. Sama dengan masuk dalam hutan belantara, apalagi pemimpin relatif baru menduduki jabatan. Tentu tidak saja dituntut dan diharapkan mampu memberi contoh atau panutan, tetapi harus mampu membuka jalan baru, sehingga mempermudah pengikut atau masyarakat yang dipimpinnya menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang dibebankan kepada mereka. Pemimpin seperti itu, memiliki tugas ganda. Di satu sisi, mempersiapkan posisi dan dirinya agar semakin kuat dan profesional serta di sisi lain, mempersiapkan kebutuhan pengikut atau masyarakat karena mereka tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Tidak bisa pemimpin membiarkan kelemahan dan kekurangan pengikutnya atau masyarakat serta meninggalkan begitu saja, sehingga terlalu jauh berada dibelakang dan dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan.

Tatkala posisi pemimpin berada di tengah-tengah adalah berkewajiban membangkitkan semangat dan memberikan motivasi, baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial kepada pengikut atau masyarakat. Pemimpin pada posisi seperti itu dapat menjadikan pengikut atau masyarakat sebagai mitra, teman dan sahabat. Segala masalah mudah dirumuskan karena solusi terbaik diperoleh berdasarkan pendekatan persuasif dan partisipatif. Semua pihak diberikan beban, tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk diselesaikan dengan pendekatan kekerabatan atau kebersamaan dan posisi pemimpin lebih dominan sebagai motivator dan mediator. Sedikit berbeda dengan pemimpin pada posisi terdepan, lebih menekankan sebagai inisiator dan promotor bahkan motor penggerak pembangunan, seperti pembangunan ekonomi.

Sejatinya, posisi pemimpin dimana saja berada, tetap sebagai penentu, strategis dan tidak mudah. Posisi di belakangpun sangat berat. Apabila tidak memiliki kemampuan manajerial

dan kecakapan teknis sebagai seorang pemimpin, cenderung tidak mampu membawa pengikut atau masyarakat ke arah yang diinginkan. Kemampuan dan kecakapan seperti terkandung dalam *asta brata* dapat menjadi landasan kuat dan kokoh bagi pemimpin mendorong pengikut atau masyarakat untuk bergerak memacu laju membangun ke arah yang dinamis dan progresif. Umumnya, posisi pemimpin di belakang dilandasi oleh suatu anggapan atau penilaian bahwa pengikut atau masyarakat, telah dipandang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk melakukan apa saja yang dibebankan kepada mereka, sehingga posisi pemimpin lebih utama sebagai fasilitator dan regulator. Pemimpin lebih dominan menyiapkan dan menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak seperti regulasi, agar pengikut atau masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tidak terhambat atau terkendala karena keterbatasan perangkat keras dan lunak (payung hukum), seperti UU, perda dan sejenisnya.

Mengapa pemimpin menempati posisi strategis? Pemimpin dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang tidak dapat mengabaikan strategi. Pemanfaatan metode, cara maupun pendekatan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang pemimpin, sehingga tercipta suatu lingkungan dan budaya kerja yang kondusif dan produktif. Implikasi kondisi seperti itu, dapat mendorong tumbuh dan berkembang kemandirian, kreativitas dan inovasi pengikut untuk menuju pencapaian prestasi.

Posisi pemimpin yang kuat sangat mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan. Sebaliknya posisi pemimpin yang lemah relatif terlambat dan terhambat dalam merealisasikan cita-cita pembangunan. Fakta telah membuktikan, bahwa hanya pemimpin kuat, mampu memainkan peran dalam pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. Peran utama pemimpin, baik dalam organisasi kecil maupun besar, termasuk dalam pembangunan adalah mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban pengikut atau masyarakat. Episentrum keberhasilan maupun kegagalan seorang pemimpin acapkali berangkat dari memainkan peran. Salah satu bentuk dari kelemahan peran

adalah konflik destruktif berkepanjangan terjadi pada pengikut atau masyarakat. Konflik ada yang bersifat konstruktif karena dapat dimanajementi dengan baik dan sistematis. Umumnya, konflik destruktif banyak bersumber dari ketidakmampuan pemimpin menyeimbangkan hak dengan kewajiban pengikut atau masyarakat. *Gap* seperti ini bermuara dari peran pemimpin yang lemah, kurang cermat dan cerdas dalam menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam kepemimpinan.

Prinsip *on the right man, on the right place* menjadi pegangan menata sumber daya manusia merupakan titik pangkal dan ujian seorang pemimpin bahwa telah meletakkan profesionalisme dalam kepemimpinannya. Oleh karena kesalahan seorang pemimpin dalam menempatkan orang, berpengaruh langsung terhadap kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Apalagi dalam pembangunan dengan kompleksitas permasalahan relatif banyak dengan intensitas tinggi. Tidak mudah karena digerakkan oleh sistem. Kegagalan satu sistem saja yang disebabkan kesalahan menempatkan orang dapat memperlambat pencapaian tujuan pembangunan.

Posisi dan peran pemimpin dalam pembangunan ekonomi menuju masyarakat sejahtera secara lahir dan bathin serta menjunjung tinggi asas keadilan yang dalam buku ini disebut ekonomi *jagadhita* sama dengan cerita di atas. Kekhasan dan keunikan Bali menyebabkan pemimpin dalam mengelola sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan dan berasas keadilan bagi masyarakat membutuhkan kriteria khusus. Tambahan kriteria khusus pemimpin Bali adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip kepemimpinan modern dengan prinsip-prinsip kearifan lokal, termasuk prinsip-prinsip dalam *asta brata*.

Kendatipun pembangunan ekonomi dengan pendekatan pertumbuhan (investasi) dapat diwujudkan oleh pemimpin Bali dan secara nyata dapat meningkatkan aktivitas ekonomi produktif dan kreatif, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, belum tentu sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemimpin di Bali. Pemimpin Bali wajib memahami kearifan lokal, sehingga tidak mendapatkan hambatan dalam

melaksanakan tugas-tugas pembangunan, seperti pembangunan ekonomi. Banyak hal tidak dapat dirasionalkan begitu saja dalam membangun ekonomi *jagadhita* di Bali. Dari sudut manajemen modern, teori pembangunan modern dan teori kepemimpinan modern rancangan pembangunan infrastruktur ekonomi sangat layak dan menguntungkan. Tetapi ketika dilihat dari perspektif budaya dan kearifan lokal Bali, termasuk peraturan daerah (perda) pembangunan infrastruktur ekonomi tersebut belum tentu layak dan ditolak oleh masyarakat.

Produk hukum, seperti perda mungkin dapat diubah atau disempurnakan sesuai dengan dinamika dan perkembangan peradaban masyarakat Bali. Namun, ketika dihadapkan dengan budaya atau kearifan lokal Bali, apalagi kearifan lokal itu bersentuhan dengan adat dan agama, cukup sulit dan banyak hambatan melakukan pembangunan. Oleh karena itu, posisi dan peran pemimpin sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi *jagadhita* di Bali.

Masyarakat (Hindu) Bali, tidak menolak pembangunan apa saja, termasuk pembangunan ekonomi beserta pembangunan infrastruktur penunjang lainnya. Namun persoalan mendasar Pulau Bali adalah terletak pada kekhasan dan keterbatasan *carrying capacity* Bali. Dapat saja dibangun atau dikembangkan berbagai investasi rakus lahan di hulu, tetapi persoalan ikutannya adalah menyangkut dan tersangkut dengan banyak masalah, seperti air dan degradasi kualitas lingkungan. Daya dukung dan sumber air di Bali mungkin saja belum berkurang, tetapi jumlah manusia yang membagi atau memanfaatkan air, semakin hari bertambah karena tekanan penduduk (urbanisasi) dan pemanfaatan untuk kepentingan industri maupun lainnya.

Di lihat dari perspektif pembangunan ekonomi, menjadi pemimpin di Bali lebih berat, dibandingkan menjadi pemimpin di daerah lain. Pemimpin tidak cukup mengadopsi dan kemudian mengadaptasikan prinsip kepemimpinan modern, tetapi dibutuhkan seni mensinergikan dengan kekuatan lokal, sehingga tidak terkendala dalam menjalankan kewajiban sebagai pemimpin, seperti yang terkandung dalam kepemimpinan *asta*

brata dengan menyajikan delapan (8) unsur yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemimpin.

Esensi delapan unsur dalam *astra brata* adalah menganjurkan pemimpin selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan jangka panjang dan bukan jangka pendek atau sesaat yang suatu ketika dapat menyesatkan masyarakat. Apabila pembangunan Bali berorientansi pada kepentingan jangka panjang dan berkelanjutan, tentu setiap pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi wajib dilihat dari berbagai aspek. Mungkin saja dari aspek ekonomi menguntungkan, tetapi dari aspek lingkungan, sosial dan budaya maupun adat dalam kurun waktu tertentu merugikan. Atau dalam bahasa lain, manfaat ekonomi yang diperoleh lebih kecil, dibandingkan dengan biaya sosial, sehingga tanggungjawab sosial dan beban sosial menjadi warisan yang sangat memberatkan anak dan cucu dikemudian hari. Pembangunan ekonomi seperti ini bukan pembangunan ekonomi jagadhita. Oleh karena pembangunan ekonomi *jagadhita* merupakan suatu pembangunan yang mampu menciptakan kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir maupun bathin berasaskan keadilan dan berkelanjutan.

4. Epilog

Pemimpin dengan berbagai posisi dan peran merupakan unsur dominan dalam menentukan keberlanjutan kehidupan suatu organisasi. Mengapa? Karena segala bentuk kebijakan maupun keputusan strategis dalam suatu organisasi berhulu dan berhilir pada pemimpin. Katakan seorang kepala daerah, apakah mereka berada pada posisi di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi memiliki peran sentral dalam memutuskan dan menjalankan kebijakan dan program pembangunan. Suatu kebijakan tidak mungkin dapat diambil begitu saja oleh pengikut-bawahan atau staf, tanpa ada perintah dari pimpinan. Oleh karena itu, menjadi pemimpin tidak mudah dan gampang.

Dibutuhkan kriteria tertentu untuk mampu memangku jabatan, agar dapat mengantarkan organisasi atau masyarakat tumbuh dan berkembang ke arah dinamis, progresif dan konstruktif, bukan sebaliknya, yakni regresif, apalagi destruktif.

Pemimpin Bali, dimana saja posisi mereka adalah layak, pantas dan patut memahami dan bercermin dalam memimpin masyarakat Bali mengacu dan berpedoman pada nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam kearifan lokal Bali, apalagi mengharapkan pembangunan di Bali dapat berlangsung secara berkelanjutan, termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Mengadopsi nilai-nilai dalam kearifan lokal, tidak berarti seorang pemimpin itu berfikir *setback*, apalagi tradisional, ortodok dan konservatif. Seperti nilai-nilai yang terkandung dalam kepemimpinan *astra brata*, sebagaimana telah diuraikan di atas. Masih sangat relevan dan sejalan dengan nilai-nilai dalam teori kepemimpinan modern. Tidak ada satu unsur dalam kepemimpinan *asta brata* bertentangan dengan teori kepemimpinan modern. Bahkan sesungguhnya, apa yang tertuang dalam teori kepemimpinan modern itu, terdapat pula dalam kepemimpinan *astra brata*, termasuk dalam kepemimpinan tradisional lain seperti kepemimpinan dalam tradisi Jawa, yakni (a) *ing arsa asung tulada*, (b) *ing madya mangun karsa* dan (c) *tut wuri handayani*.

BAB IX PENUTUP

Masyarakat Bali mempunyai sesuatu, tetapi belum sepenuhnya dipergunakan. Menjadi lebih tragis, bila masyarakat mempunyai sesuatu, tetapi tidak tahu menggunakan. Budaya Bali disanjung-sanjung karena keunikan dan hidup searah serta sejalan dengan aktivitas kehidupan masyarakat (Hindu) Bali, tetapi masyarakat sebagai pendukung budaya malahan buntung. Untaian kata-kata tersebut, jangan sampai terjadi di Bali. Cukup lama masyarakat Bali menjadi objek pembangunan dan saatnya kini menjadi subjek pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dengan motor penggerak industri pariwisata.

Masyarakat Bali memiliki kearifan lokal dan spirit maupun nilai dalam kearifan lokal tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk mendorong pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan ekonomi produktif dan kreatif. Masyarakat belum terlambat mengidentifikasi, menggali dan merevitalisasi kearifan lokal yang masih relevan dan dapat disinergikan dengan program pembangunan kekinian dan masa depan. Zaman boleh berubah, masyarakat Bali harus pula berubah dan beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah kita tinggalkan budaya lokal yang masih sejalan dengan peradaban manusia di era globalisasi ini?

Pulau Bali telah lama mengglobal. Paling tidak sejak ditetapkan sebagai destinasi pariwisata di Indonesia dengan ciri khas. Kekhasan Bali, di samping karena keterbatasan sumber daya alam, sehingga tidak ada industri besar, masyarakat Bali telah sepakat membangun berlandaskan budaya, termasuk dalam pengembangan industri pariwisata. Sebagai implikasi pembangunan berlandaskan budaya, seluruh aktivitas masyarakat

ditumbuhkembangkan dengan berhulu pada khasanah budaya. Di antara khasanah budaya tersebut, terdapat kearifan lokal. Suatu potensi lokal, tumbuh dan berkembang di tingkat lokal dan secara realitas sangat mudah dipahami serta diaktualisasikan oleh masyarakat lokal dalam segala aktivitas.

Keterbatasan alam Bali seperti diungkapkan di atas, wajib dimanajementi dengan baik dan profesional. Tanpa dikelola dengan baik, Bali mengalami berbagai kendala dan distorsi di masa yang akan datang, seperti keterbatasan air, kepadatan penduduk dan pencemaran lingkungan serta berbagai polusi yang menyebabkan Bali tidak memiliki daya tarik bagi wisatawan. Kala ini Bali tidak cukup dikelola dan dibangun dengan landasan manajemen modern saja, tetapi diperlukan sentuhan dan integrasi dengan kekuatan budaya lokal dalam semua pembangunan dan kehidupan. Oleh karena dengan integrasi itu, kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis, tertata, efektif, efisien, kreatif dan produktif secara ekonomis, sosial maupun religi.

Dalam melakukan aktivitas sosial seperti, pelaksanaan upacara adat, budaya dan agama Hindu pada masyarakat Bali, hampir semua telah berhulu pada kearifan lokal. Akan tetapi dalam melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan, kearifan lokal dipandang perlu dipadukan dengan teori pembangunan modern untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh pembangunan beberapa infrastruktur ekonomi relatif kacau-balau karena pernah “mengabaikan” manajemen dan kearifan lokal seperti konsep *tri hita karana* dan *bhisama*. Bahkan dalam konteks mikro, masih ada spirit kearifan lokal terpendam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong dan menunjang tumbuh dan berkembang usaha kecil dan menengah yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, belum terlambat bila dilakukan integrasi dalam rangka mengoptimalkan pembangunan. Memadukan teori pembangunan modern dengan nilai-nilai dan spirit terkandung dalam kearifan lokal, termasuk manajemen patut direnungkan kembali, sehingga pembangunan di bidang tertentu tidak meniadakan pembangunan lain. Pembangunan sosial dan

politik berlanjut terus-menerus, begitu juga pembangunan ekonomi berkembang sepanjang masa, tidak mencederai atau merusak alam bahkan di lain sisi, pembangunan ekonomi justru meningkatkan kualitas lingkungan dan kebudayaan Bali.

Menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan Bali. Begitu pula pengembangan ekonomi, jika kearifan lokal tidak diabaikan, niscaya tidak akan menimbulkan berbagai dampak negatif dan merugikan umat manusia. Para leluhur telah mewariskan kearifan lokal kepada kita. Sekarang tinggal memanfaatkan saja untuk dipakai sebagai pedoman, sendi, dasar dan bingkai pembangunan Bali. Tidak terkecuali pembangunan usaha kecil-menengah (ekonomi umat) yang sudah terbukti kenyal, lentur dan kokoh dalam menghadapi badai ekonomi, seperti multikrisis.

Bali tidak bisa terlepas atau melepaskan diri dengan tekanan kapital. Masyarakat Bali, suka maupun tidak suka membutuhkan investasi. Bali tanpa investasi dipastikan mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi dan itu berarti peluang kerja semakin terbatas dan semua itu bermuara pada pengangguran yang semakin meningkat. Masyarakat Bali tidak menginginkan kondisi ekonomi seperti itu dan di lain sisi, masyarakat Bali tidak suka pula dengan pembangunan ekonomi dengan menebas dan menggilas kearifan lokal, apalagi itu menyangkut kesucian. Konsep *hulu-teben* wajib dipertimbangkan oleh pemimpin dalam membangun, termasuk membangun ekonomi Bali berkelanjutan. Selama rambu-rambu lokal dan tradisi lokal tersebut dipatuhi, masyarakat tidak akan menghalangi investor datang membangun Bali.

Bali adalah untuk kita semua, untuk umat manusia dan “Kembalikan Baliku” kata Guruh Soekarno Putra dalam sebuah lagu. Siapa yang mengembalikan Baliku ? Ya *stakeholder* Bali, orang Bali sendiri. Orang Bali tidak bisa berdiam diri menunggu dan menikmati sanjungan sebagai manusia ramah, berbudaya, taat beragama, damai, humanis dan berbagai sanjungan lain, tapi apa yang dapat dibanggakan, diwariskan dan dinikmati dari

semua itu. Apakah keberuntungan atau kebuntungan? Jawab bersama-sama, termasuk pemerintah dan pemimpin yang telah diberikan mandat sebagai pemegang kekuasaan, baik sebagai inisiator, motor, motivator, mediator maupun sebagai fasilitator, regulator dan eksekutor.

REFERENSI

- Anonimous, 2006. *Data Bali Membangun*, Denpasar : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- Anggito Abimanyu, 2000. *Ekonomi Indonesia Baru Kajian dan Alternatif Solusi menuju Pemulihan*, Jakarta: Gramedia.
- Agger, Ben. 2003. *Teori Sosial Kritis : Kritik Penerapan dan Implikasinya* (Penerjemah Nurhadi), Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Archer, B. 1995. *Importance of Tourism for The Economic of Bermuda*. Bermuda: Annals of Trousim Research Vol. 23 Number 1.
- Bank Indonesia dan Puslit Unud, 2003. *Penelitian Dasar Potensi Ekonomi Bali: Prioritas Pengembangan Usaha Kecil*, Denpasar : BI.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1980. *Kebudayaan Bali Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Koentjaraningrat (redaksi) Cetakan V. Jakarta: Djambatan
- _____. 1996. *Masalah Tanah Dalam pembangunan, Khususnya Pengembangan Pariwisata di Bali: Dampak terhadap kehidupan Orang Bali*. Disampaikan Dalam Simposium Internasional Ilmu-ilmu Humaniora III. Yogyakarta: Panitia Dies Natalis ke-50 Faksas UGM.
- _____. 2002. *Karifan Lokal Dalam Menganeka-ragaman Menuju Pembangunan Bali Yang Berkelanjutan: Pemikiran Baru Untuk Pembangunan Bali yang Berkelanjutan dari Perspektif Budaya*. Denpasar: Program S-2 Kajian Budaya Unud.
- Bansi Pandit. 2005. *Pemikiran Hindu: Pokok-Pokok Pikiran Agama Hindu dan Filsafatnya* (terjemahan). Surabaya: Paramita.
- Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 55/08/51/Th. X, 5 Agustus 2016
- Dasi Astawa, I Nengah. 1998. *Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Ekonomi dan Sosial Jimbaran, Kuta Badung*: Hasil Penelitian (Tesis) pada S-2 Kajian Budaya

Unud.

- _____. 2005. *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Jembrana, Perspektif Kajian Budaya: Hasil Penelitian (Disertasi)* pada Kajian Budaya, Pascasarjana Unud Denpasar.
- _____. 2006. *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat*, disampaikan pada seminar nasional di Pura Cinere Jakarta, 18 Juni 2006.
- Dawam Rahardjo. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Erawan, I Nyoman, 1994, *Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi (Bali Sebagai Kasus)*, Denpasar: PT. Upada Sastra.
- Erwidodo, 1999. "Modernisasi dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan", dalam *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Peny, Hasan Basri)*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Faisal Baasir, 2003. *Pembangunan Krisis : Kritik dan Solusi menuju Kebangkitan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Geriya, 1996. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional dan Global*. Denpasar : PT Upada Sastra.
- Giddens, Antony, 2000. *Jalan Ketiga : Pembaharuan Demokrasi Sosial(terjemahan)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2001. *Runaway World : Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita (terjemahan)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Harold Koontz & Heinz Weihrich, 1990. *Essentials of Management*, Fifth Edition: Singapore: Mc Grow-Hill Book Co.
- Himawan S. Pamudi, dkk. 2003. *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Kartono, Kartini. 1994. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

- Kersten, S.V.D, 1984. *Bahasa Bali*, Flores: Nusa Indah.
- Killner, Douglas, 2003. *Teori Sosial Radikal (terjemahan)*, Jakarta: Syarikat Indonesia.
- Kodhyat, 1990. *Pariwisata Dalam Pembangunan Daerah*, Majalah Analisis Tahun XIX No. 3, Jakarta : CSIS.
- Kusnaka dan Harry H, 2003. *Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Mahbub ul Haq. 1983. *Tirai Kemiskinan Tantangan–tanggungan Untuk Dunia Ketiga (Edisi Bahasa Indonesia)*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mantra IB, 1993. *Bali Masalah Sosial dan Modernisasi*. Denpasar : PT. Upada Sastra.
- Maxwell C. John. 2001. *Mengembangkan Kepemimpinan*. Jakarta : Mitra Media
- Meredith, G. Geffery *at al.* 1989. *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. Jakarta : PPM
- Mubyarto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- _____. 2002. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mudrajad Kuncoro, 1999. *Kemitraan Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat : Antara Mitos dan Realitas*, dalam *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Nas, Peter, 1996. *Perlambangan di Denpasar Tentang Pariwisata dan Tradisi*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pariwisata.
- Mundardjito, 1986. “Hakikat *Local Genius* dan Hakikat Data Arkeologi” dalam Ayatrohaedi (ed), *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ogburn, WF, 1986. *Ketertinggalan Kebudayaan* (Penerjemah Soerjanto, S). Jakarta: Rajawali.
- Pendit, 1987. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Picard, Michel, 1990. *Kebalian Orang Bali : Tourism and the Uses of Balinese Culture in New Order Indonesia* : Review of

Indonesian and Malaysian Affairs.

- _____. 1996. *Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapore: Archipelago Press.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1986. "Pengertian *Local Genius* dan Relevansinya dalam Modernisasi, dalam Ayatrohaedi (ed), *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ranchore Prime, 2006. *Tri Hita Karana, Ekologi Ajaran Hindu : Benih-Benih Kebenaran (terjemahan)*. Surabaya: Paramita.
- Rata, IB, 1987. *Wujud Budaya Dalam Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata di Bali*. Denpasar : Makalah disampaikan pada seminar pembinaan dan pengembangan pariwisata menuju tahun 2000.
- Richard, G. 1997. *The Social Context of Cultural Tourism, dalam Cultural Tourism in Europe*, Netherlands: Departement of Leisure Studies Tilburg University.
- Rivai, Veithzal, 2002. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada
- _____. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Robbin, Stephen P. 1996. *Teori Organisasi*. Jakarta : Arcan
- Roth, D. and Sedana, G. 2015. Reframing Tri Hita Karana: From 'Balinese Culture' to Politics. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16(2), 157 - 175
- Rozi, Fachrur, 2003. *Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia*, Yogyakarta : NetBooxs Press.
- Semadi Astra, I Gde. 2004. "Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Memperkokoh Jatidiri Bangsa di Era Global", dalam *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Denpasar: Faksas Unud dan Balimangsi Press.
- Scott, James C, 1982. *Moral Ekonomi Petani : Pergokan dan Resistensi di Asia tenggara*, Jakarta : LP3ES.
- Schumacher, E.F. 1983. *Kecil Itu Indah (Edisi Bahasa Indonesia)*. Jakarta : LP3ES
- Sedana, G. 2013. *Modal Sosial Dalam Pengembangan Agribisnis*

- Petani Pada Sistem Subak Di Bali. Disertasi pada Pascasarjana Universitas Udayana.
- Sedana, G.W. Windia and I.G.A.A. Ambarawati. 2014. *Strengthening Social Capital for Agricultural Development: Lessons from Guama, Bali, Indonesia*. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 2014, vol. 11, issue 2, pages 39-50
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Asdi Mahayasa
- Soekadijo, 1995. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Spillane, J.J, 1989. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Soebadio, Haryati. 1986. "Kepribadian Budaya Bangsa", dalam Ayatrohaedi (ed), *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Sri Edi Swasono, 2000. *Pandangan Bung Hatta Terhadap Ekonomi Kerakyatan*, Bukit Tinggi, 15-6-2002 : www.ekonomirakyat.org 14-5-2003.
- Stoner, J.A.F & Freeman, R.E. 2000. *Management*, New Jersey : Prentice-Hall International Editions
- Supriono, A. Dance, J.F. dan Flassy, S.R. 2010. *Modal Sosial: Unsur-Unsur Pembentuk*. <http://p2dtk.bappenas.go.id/artikel-15-unsurunsur-pembentuk.html>.
- Tjatera, I Wayan, 2005. "Kearifan Lokal dalam Pembangunan Daerah Bali", pada *Jurnal Kajian Budaya*, Program S2 dan S3 Universitas Udayana Denpasar Bali.
- Titib, I Made. 2003. *Teologi dan Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Toha, Mitfah. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Timpe A.D. 1991. *Kepemimpinan, Seni Ilmu dan Seni Manajemen Bisnis (Edisi Bahasa Indonesia)*. Jakarta :Gramedia.
- Tohardi, Ahmad. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa*;

Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

- Wall, G. 1995. *Forces for Change: Tourism (Bali Balancing Environment, Economic and Culture)*. Ontario: Departement of geography University of Waterloo.
- Watra, I Wayan, 2006. *Filsafat Manusia Dalam Perspektif Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut, 2004. *Menuju Bali Jagadhita : Tri Hita Karana Sehari-hari dalam "Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif"*. Denpasar : Bali Post.
- Woolcock, M. 1998. *Social Capital and Economic Development; Toward a Theoretical Syntesis and Policy Framework. Theory and Society*, In Elinor O and T.K. Ahn.. *Foundation of Social capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Woolcock, M. and D. Narayan . 2000. Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. *World Bank Research Observer*, 2000, vol. 15, issue 2, pages 225-49

GLOSARI

- bhakti* : suatu prinsip dalam melakukan pekerjaan tidak semata-mata berorientasi pada hasil dan ada keyakinan bahwa hasil akan selalu mengikuti pekerjaan, bila dilakukan dengan kesungguhan.
- bhisama* : aturan kesucian yang diputuskan dan ditetapkan oleh PHDI untuk menjaga dan memberi batas wilayah kesucian pura bagi umat Hindu.
- briuk siu* : melakukan sesuatu secara bersama-sama, tanpa didahului dengan kajian secara baik dan benar.
- ceraki* : suatu sistem berdagang masyarakat tradisional Bali dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi pembeli, sehingga berbelanja pada satu tempat atau took semua kebutuhan pembeli terpenuhi.
- cenik* : suatu standar untuk mengatakan suatu memiliki ukuran kecil di Bali.
- cingkreman* : uang pangkal yang dikenakan kepada anggota sekaa atau perusahaan dalam desa
- gerubug* : penyakit yang mewabah dan mematikan hewan piaraan secara tiba-tiba.
- jagadhita* : suatu keadaan bumi beserta isinya yang berada dalam damai, sejahtera dan harmoni, baik lahir maupun batin.
- jengah* : suatu ungkapan perasaan seperti rendah diri, bila tidak melakukan sesuatu atau pekerjaan, padahal kalau mau mereka mampu melakukan pekerjaan tersebut (rasa malu atau rendah diri ini adalah dalam konteks positif)
- karma* : perbuatan dari seseorang dan hasilnya disebut dengan pahala
- karmaphala* : hasil dari suatu perbuatan manusia, jika berbuat baik, maka hasilnya akan baik, sedangkan jika

berbuat jelek, maka hasil yang akan diterima buruk.

- Lantang* : suatu standar untuk menyatakan sesuatu memiliki ukuran panjang.
- lawar* : makanan yang merupakan campuran sayur dengan daging yang telah menjadi tradisi masyarakat Bali dan memiliki rasa yang khas, sejenis cap cai pada masakan Cina.
- manyi* : kegiatan memotong padi atau menuai padi yang dilakukan petani atau buruh tani dengan menggunakan alat tertentu
- makepung* : perlombaan kerbau yang ada di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atau sejenis dengan karapan sapi di Madura
- mamirat* : tidak mau membayar hutang, padahal telah berjanji melunasi sesuai dengan kesepakatan
- mapiak* : model pembagian hasil antara pemilik modal dengan pekerja
- milu-milu tuwung*: ikut-ikutan melakukan pekerjaan, walaupun tidak memiliki kecakapan
- mutranin* : meminjam uang pada organisasi tradisional atau sekaa
- mutranang* : para pihak atau seseorang yang membungakan uang kepada anggota atau seseorang dengan dibebani kewajiban tertentu
- nandu* : pola kontrak kerja di bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap
- nanduang* : sebutan kepada seseorang atau bisa juga organisasi yang memiliki lahan pertanian yang menyerahkan pengelolaan lahan pertanian kepada orang lain melalui pola kontrak kerja
- ngadas* : pola kontrak kerja di bidang peternakan antara pemilik ternak atau hewan dengan orang lain untuk pemeliharaan ternak.
- ngayah* : bekerja tanpa mempertimbangkan hasil dan dilakukan dengan tulus ikhlas.

- ngadasang* : sebutan kepada seseorang atau bisa juga organisasi yang memiliki hewan atau ternak yang pengelolaannya diserahkan kepada orang lain melalui pola kontrak kerja
- ngawit* : memulai suatu kegiatan
- nyakap* : pola kontrak kerja di bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap
- nyakapang* : sebutan kepada seseorang atau bisa juga organisasi yang memiliki hewan atau ternak dan pengelolaannya diserahkan kepada orang lain melalui pola kontrak kerja
- pahala* : hasil dari suatu perbuatan manusia
- padewasan* : hari baik untuk memulai suatu kegiatan
- pageh* : setia dan cinta terhadap pekerjaan
- penandu* : sebutan kepada seseorang yang mengerjakan lahan pertanian milik orang lain dan atas pengelolaan itu mendapatkan bagian hasil atau kontribusi sejumlah tertentu
- pengadas* : sebutan kepada seseorang yang memelihara hewan milik orang lain dan atas pemeliharaan itu mendapatkan bagian hasil atau kontribusi sejumlah tertentu
- penyakap* : sebutan seseorang yang mengerjakan lahan milik orang lain dan atas pengelolaan lahan tersebut mendapatkan pembagian hasil sejumlah tertentu.
- piakan* : hasil yang dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dengan pekerja dalam tradisi Bali
- puguh* : tekun dan bekerja keras dalam melakukan dan mengerjakan suatu pekerjaan
- rasa* : suatu nilai yang berciri khas dan berbeda, seperti penjual nasi, ketika orang lain yang melayani, ternyata memiliki citarasa yang berbeda.
- rwa bhinneda* : filosofi hindu tentang dua sisi yang berhadapan, seperti adanya siang-malam, putih-

- hitam, baik-buruk, kuat-lemah, dan seterusnya
- sangkepan* : pertemuan rutin di tingkat kelompok (subak)
- sapi grumbungan* : sejenis lomba sapi secara tradisional di wilayah Bali Utara, yakni Kabupaten Buleleng.
- sasonggan* : seperti pepatah atau memiliki arti mirip dengan pepatah
- sraddha* : meningkatkan rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- sekaa* : sejenis kelompok, kumpulan atau organisasi sosial tradisional yang banyak tumbuh di Bali
- subak* : organisasi tradisional di Bali yang memiliki salah satu tugas mengatur pembagian air pertanian secara adil dan merata
- taksu* : nilai atau spirit yang terkandung dalam suatu kegiatan atau hasil kegiatan.
- tirta yatra* : melakukan perjalanan sembahyang ke beberapa tempat suci untuk mohon keselamatan terhadap Tuhan yang Maha Esa
- tukad bangsa* : sebuah istilah yang melambangkan orang-orang yang boros dan tidak bisa menggunakan uang dengan baik, konsumtif.
- usadha* : sistem pengobatan tradisional Bali
- urunan* : suatu kegiatan bersama-sama menyerahkan sejumlah uang untuk kemajuan atau modal organisasi

INDEKS

A

agni brata 128, 135, 136
Alih fungsi lahan iii, 3, 25
Anggito Abimanyu 8, 147
angka partisipasi kasar 67
angka partisipasi murni 67
Asia Tenggara 15
astra brata 128, 141, 142
awig-awig 29, 31, 34, 35, 36, 37

B

Badung 3, 24, 28, 29, 41, 42, 52, 147
Bagus 2, 7, 147
Bali i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xiii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147
Bali Utara 1, 156
Bangli 20, 24, 40
banjar 31
Bank Indonesia 85, 147
baruna brata 128, 134
bayu brata 128, 133

Bhagawadgita 62
bhakti 14, 62, 66, 116, 153
Buchari Alma 111
budaya Bali 13, 17, 39, 61, 70, 77, 104
Bukit Pecatu 28
Buleleng 20, 21, 22, 23, 39, 41, 43, 100, 156

C

candra brata 128, 132
Carrying capacity 11
cenik lantang vi, viii, 14, 80, 81, 83, 90, 94, 103
Cina v, 129, 154
cingkreman vii, viii, 46, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 153
conceptual skill 14, 122, 127
corporate social responsibility 75

D

Dasi Astawa ii, ix, 3, 52, 57, 86, 147, 159
Dawam Raharjo 83
demonstration effect 103
Denpasar ii, ix, 41, 42, 52, 94, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 159, 160
design skill 14, 122, 127

E

Ebert 111

F

Fukuyama 37, 148

G

Gandhi 9
Ganjar Kurnia 113
Gianyar 20, 41, 52
Giddens iv, 16, 148
globalisasi ix, 5, 16, 58, 143
Gorontalo 28
Griffin 111
grumbungan 100, 156

H

Heine Geldern 15
high cost economic 2, 117
Hindu 10, 33, 36, 37, 44, 59, 61,
62, 63, 64, 66, 67, 70, 94,
107, 116, 126, 129, 140, 143,
144, 147, 150, 151, 152, 153
human invesment 74
human skill 14, 122, 127

I

I Gusti Ketut Kaler 62
Indonesia 1, 8, 9, 12, 14, 15, 16,
43, 44, 59, 62, 85, 88, 90,
130, 143, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 159
indra brata 128, 130
Isa Upanishad 63
Islam 58, 83, 148
I Wayan Mertha Suteja 62

J

jagadhita 1, 10, 44, 120, 139, 140,
141, 153
Jawa 24, 39, 129, 135, 142
Jawa Timur 24
Jembrana 24, 38, 39, 41, 45, 52,
57, 58, 100, 101, 148, 154,
159
Jepang 14

K

Karangasem 20, 21, 28

kearifan lokal iv, v, vi, vii, viii,
ix, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
27, 38, 39, 44, 45, 46, 53, 59,
61, 79, 104, 107, 114, 120,
123, 129, 139, 140, 142, 143,
144, 145

Klungkung 20, 28, 40
Kuta iii, 3, 76, 147, 159
kwera brata 128, 135

L

Lembaga Perkreditan Desa 113
local genius 15

M

Mahbub ul Haq 8, 13, 149
makepung 38, 100, 154
managerial skill 14, 127
mapiakan 49, 50
Ma'rie Muhammad 83
Masao Kikuchi 8, 151
Maxweel 126
milu-milu tuwung lan briuk siu
21
modal sosial 29, 35, 37, 87
Mohamad Ikhsan 111
Mubyarto 82, 83, 149
Mundardjito 15, 149
mutranin 106, 109, 154

N

nandu v, viii, 48, 49, 50, 51, 56,
57, 154
Narayan 31, 152
Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia 1
ngadas v, viii, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 154
ngawit lan padewasan 10
ngayah 14, 116, 154
Nusa Ceningan 1
Nusa Lembongan 1
Nusa Penida 1, 28
nyakap v, viii, 48, 49, 54, 55, 56,

57, 58, 155
nyeraki xiii, 14, 18, 19, 20, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

O

one stop shopping v, 17, 25
orang kaya baru iii, 4

P

PAD 79
pageh lan jengah 14
Palemahan 62, 75
Panca Srada 37
Parahyangan 62, 66
paruman 31
Paruman 31
Pawongan 62, 68
perarem 34
PHDI 76, 153
Picard 60, 149
profit sharing v, vi, viii, 48, 49,
50, 51, 53, 55
Provinsi Bali 3, 5, 6, 147, 154
puguh vii, viii, ix, 14, 43, 115,
116, 117, 118, 119, 123, 124,
125, 155
Pulau Bali xiii, 1, 2, 11, 12, 25,
27, 41, 43, 44, 58, 81, 94,
118, 140, 143
Pulau Menjangan 1
Pulau Serangan 1
Pulau Seribu Pura. *Lihat juga* Pu-
lau Bali
Pulau Sorga 5. *Lihat juga* Pulau
Bali
Pura Ulun Empelan 32

Q

Quaritch Wales 15

R

Rivai 126, 150

S

sangkepan 31, 33, 156
Sapi Grumbungan 39
Sarbini Sumawinata 99
satya wacana 108
Schumacher 1, 9, 58, 99, 150
sekaa manyi 109
sesonggan 61
shock culture 9, 122
simbiosis-mutualistik 104
sistem ayahan 35
Soebadio 15, 151
Soerata 112
soft skill 14, 122, 127
sraddha 62, 156
subak iii, 13, 17, 20, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 53,
76, 109, 123, 156
Subak Guama xiii, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 37
Subak Selanbawak 34
Subak Sengempel 29
surya brata 128, 131
Susilo Priyono 112
sustainable development vii, ix,
64, 80

T

Tabanan 27, 28, 29, 34, 39, 40,
42, 45
taksu 9, 16, 27, 53, 61, 94, 156
technical skill 14, 122, 127
tirta yatra 66, 156
tri hita karena vi, 14, 36, 37, 59,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 72,
74, 79, 144
tri kaya parisudha 115
tukad bangka 103, 156

U

Universitas Udayana 85, 151,
159, 160
urunan 108, 156

W

Wall 60, 152

Wiana 62, 152

win-win solution 70

Woolcock 31, 34, 152

Y

yama brata 128, 130

Yujiro Hayami 8, 151

Z

Zarkasih Nur 83

TENTANG PENULIS



Nengah Dasi Astawa, Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar. Lahir di Jembrana 9 Pebruari 1960, suami dari Dra. Nyoman Kayun Emilawati dan telah memiliki 2 putra; Made Satria Pramanda Putra dan Komang Satria Wibawa Putra. Aktif dalam kegiatan OSIS sejak di SMP maupun SMA dan telah mendirikan LSM di Yogyakarta tahun 1979 yakni Lantera Satria Bahana (LSB) bersama dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain sebagai dosen Kopertis Wilayah VIII Bali, NTB, NTT dan ditugaskan mengajar pada Fakultas Ekonomi Undiknas, juga mengajar pada program S-2 UNHI Bali serta aktif sebagai pengamat ekonomi dan sosial, memegang beberapa LSM, baik nasional maupun lokal. Menamatkan S-1 pada Fakultas Ekonomi Atmajaya Yogyakarta 1985, S-2 dan S-3 diselesaikan di Universitas Udayana Bali.

Di samping itu, sangat rajin melakukan kegiatan penelitian, baik lokal, nasional dan internasional serta kegiatan ilmiah lain dan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Beberapa jenjang jabatan pernah di pegang, diantaranya Ketua Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Undiknas Denpasar dan sekarang menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Bali International Institute of Tourism Management, Sahid Kuta Bali. Mudah bergaul dan senang menghadapi tantangan. Dan ia merasa bersyukur dan berterima kasih atas dianugerahi penghargaan jabatan akademik tertinggi dalam bidang ilmu manajemen tertanggal 1 September 2007 oleh pemerintah pusat.



Gede Sedana. Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra Denpasar. Lahir di Singaraja pada 1 Desember 1964, suami dari Ir. Made Widiani dan telah dikaruniai dua putra/putri yaitu Putu Dianisa Rosari Dewi dan Made Aditya Artha Nugaraha. Gelar Sarjana Pertanian (Ir) diperoleh pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian

Universitas Udayana (1987). Menyelesaikan studi Strata 2 di Ateneo de Manila University, Filipina tahun 1994 pada Program *Studi Social Development, Department of Sociology and Anthropology* dengan gelar M.Sc. Pada tahun 2006, menyelesaikan studi pada Program Studi Manajemen Agribisnis Pascasarjana Universitas Udayana dengan gelar MMA. Selanjutnya pada tahun 2013, memperoleh gelar Dr. Program Studi Agribisnis pada Pascasarjana Universitas Udayana. Pada tahun 2012, pernah mengikuti Program Sandwich ke Wageningen University and Research (Belanda) selama tiga bulan saat mengambil program S3.

Kegiatan lain yang pernah ditekuni adalah sebagai konsultan pada berbagai proyek-proyek irigasi dan pertanian baik yang berskala internasional maupun nasional, seperti dengan Asian Development Bank, JBIC, Uni Eropa dan USAID dan AUSAID dan International-NGO. Buku yang telah diterbitkan, yaitu *Menghentikan Kepunahan Subak di Bali* (2017).



Cukup banyak kearifan lokal itu dapat disandingkan dengan teori pembangunan modern dewasa ini. Masih banyak kearifan lokal butuh revitalisasi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai landasan pembangunan. Kelemahan mendasar dalam tradisi Bali, terletak pada pencatatan atau dokumentasi terhadap kearifan lokal. Contoh, sistem pengobatan tradisional Bali, disebut *usadha*, semakin tertinggal di tengah-tengah perkembangan obat-obatan modern. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi Cina. Masyarakat Cina benar-benar mendokumentasikan dengan lengkap sistem pengobatan tradisional, sehingga mudah ditumbuhkembangkan dan diwariskan pada generasi berikutnya. Bahkan media pernah mewartakan, bahwa Cina bukan sebagai negara penghasil bahan baku obat-obatan tradisional terbesar di dunia. Penghasil bahan obat-obatan tradisional terbesar di dunia, justru Negara Brasil.

Bali mempunyai teori pembangunan lokal dan sejalan dengan teori pembangunan modern. Dalam sistem pasar modern, orang telah mengenal pasar supermarket dan hypermarket. Padahal tata cara meletakkan barang-barang dalam pasar tersebut indentik dengan tata cara leluhur kita, menaruh beberapa barang dalam sistem perdagangan tradisional, disebut *ceraki*. Sistem meletakkan barang pada *ceraki* ini, memberikan banyak kemudahan kepada pembeli karena dilandasi konsep yang sejalan dengan sistem pasar modern, yakni *one stop shopping*.

